

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN TAHUN 1948**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

**Andina Putri Nugraheni**

**NIM : 031314027**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2008**

**PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN TAHUN 1948**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

**Andina Putri Nugraheni**

**NIM : 031314027**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2008**

SKRIPSI

PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN TAHUN 1948

Oleh :

**Andina Putri Nugraheni**

**NIM : 031314027**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

  
Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 28 Agustus 2021

Pembimbing II

  
Drs. Sutardjo Adikusilo, J.R., S.Th.

Tanggal 18 Desember 2020

SKRIPSI

PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN TAHUN 1948

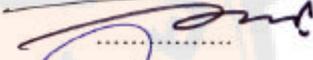
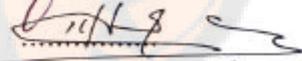
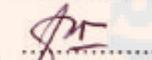
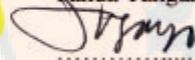
Dipersiapkan dan ditulis oleh  
Andina Putri Nugraheni  
NIM: 031314027

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 18 Januari 2008  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.
Anggota	Drs. Sutardjo Adikusilo, J.R., S.Th.
Anggota	Drs. Y.R. Subakti, M. Pd.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 18 Januari 2008  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan



Drs. Tarsisius Sarkim, M.Pd., Ph.D.

## **moto**

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali jika mereka mau berusaha untuk mengubah nasib mereka sendiri.

**QS AR-RA'AD ayat 11**

Anda boleh bersekolah setinggi-tingginya.

Tapi kalau tidak berkarya, Anda akan hilang dari masyarakat dan sejarah.

**Pramoedya Ananta Toer**

Guru yang malas belajar pada dasarnya tidak akan dapat menghasilkan murid-murid yang cinta belajar. Guru yang kemampuannya membeo, serta tidak mampu berpikir sendiri, pada dasarnya tidak akan dapat membuahakan murid-murid yang berani berpikir sendiri, kritis dan kreatif.

**Mochtar Buchori**



## **Persembahan**

**Dengan segala rasa cinta dan puji syukur**

**kepada Allah SWT,**

**skripsi ini kupersembahkan kepada...**

**Papa dan Mamaku tercinta.**

**Terimakasih atas limpahan kasih sayang yang**

**telah diberikan padaku...**

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : **Andina Putri Nugraheni**  
Nomor Mahasiswa : **031314027**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :  
**PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN TAHUN 1948**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupaun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Maret 2008

Yang menyatakan



(**Andina Putri Nugraheni**)

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 18 Desember 2007

Penulis



Andina Putri Nugraheni

**ABSTRAK**

**PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN TAHUN 1948**

Oleh : Andina Putri Nugraheni

NIM : 031314027

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : (1) latar belakang PKI melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948, (2) proses meletusnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, (3) usaha pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu suatu metode penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teori atau kerangka konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) latar belakang pemberontakan di Madiun tahun 1948 adalah kekecewaan PKI karena tidak diikutsertakan dalam Kabinet Hatta. Ketika PKI sedang berusaha untuk masuk kembali dalam pemerintahan, Muso kembali ke Indonesia dengan membawa program-program baru dari Moscow untuk merebut kekuasaan pemerintah ke tangan kaum komunis.. Madiun dipilih sebagai pusat pemberontakan karena letaknya yang strategis. ; (2) PKI telah membuat persiapan yang cukup matang untuk melakukan pemberontakan. Meletusnya pemberontakan PKI pada tahun 1948 diawali dengan adanya pertempuran antara pasukan Siliwangi dan pasukan PKI di kota Solo. Pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Siliwangi, sehingga pasukan PKI terusir dari kota Solo. Pasukan PKI yang terusir dari kota Solo kemudian melarikan diri ke Madiun dimana rekan-rekan mereka memproklamasikan “Soviet Republik Indonesia” pada tanggal 18 September 1948 ; (3) upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 adalah mengerahkan Divisi Siliwangi dengan kekuatan 3 brigade menyerang dari arah barat. Sedangkan penyerang dari arah timur adalah Brigade Surakhmad. Polri, Laskar Hisbullah dan Barisan Banteng juga dikerahkan untuk mempekuat pasukan pemerintah. Pada tanggal 30 Oktober 1948 Muso tertembak mati dalam pertempuran dengan pasukan Kompi Sumadi di desa Semanding. Sedangkan Amir Syarifuddin, Suripno, dan beberapa tokoh PKI lainnya tertangkap di desa Klambu pada tanggal 29 November 1948.

ABSTRACT

THE REBELLION OF INDONESIAN COMMUNIST PARTY  
IN MADIUN IN 1948

By : Andina Putri Nugraheni  
NIM : 031314027

This writing is intended to describe and analyze: (1) the background of the Indonesian Communist Party rebelled in Madiun in 1948, (2) the process of rebellion of the Indonesian Communist Party in Madiun in 1948, (3) the government's effort to exterminate the rebellion of the Indonesian Communist Party in Madiun in 1948.

The method applied in this research covers : heuristic, verification, interpretation, and historiography, while the writing method is descriptive analytical, a method of writing which needs a basic theory and a conceptual framework.

The result shows that : (1) the background of the Madiun rebellion in 1948 was their despair of being excluded from Hatta's Cabinet. When they were trying to get into the cabinet, Muso came back to Indonesia with some new programs from Moscow to make a Communist coup d'etat. Madiun was chosen as the base for the rebellion for its strategic location; (2) the Indonesian Communist Party was sufficiently prepared to go into rebellion. The breaking off of the rebellion of Indonesian Communist Party was preceded by a battle between Siliwangi troops and those of Communist Party's in Solo. In the battle, the Communist Party's troops were destroyed and chased away from Solo. The Communist Party's troops then headed to Madiun where their comrades proclaimed an "Indonesian Soviet Republic" on September 18, 1948; (3) in the efforts to entirely destroyed the rebellion of Indonesian Communist Party in Madiun in 1948, the government engaged three brigades from Siliwangi Division to attack from the west, while Surakhmad Brigade was to attack from the east. The Police, armed peasants *Hisbullah / Laskar Hisbullah*, and *Barisan Banteng* were also mobilized to assist the government troops. Muso was shot dead on October 30, 1948 in a battle against the government troops under the commander Sumadi at the village of Semanding. Whereas Amir Syarifuddin, Suripno, and some other communist leaders were arrested at the village of Klambu on November 29, 1948.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H. selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing, memberikan pengarahan, masukan serta sumbangan pemikiran hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing, memberikan pengarahan, masukan serta sumbangan pemikiran hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Drs. Y.R. Subakti, M.Pd. selaku dosen penguji skripsi.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Ibu Dra. Theresia Sumini, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini menuntun belajar dan memberikan nasehat-nasehat pada penulis.
8. Seluruh dosen Pendidikan Sejarah dan petugas sekretariat yang telah banyak membantu penulis sejak Insadha sampai dengan Wisuda.
9. Seluruh petugas perpustakaan yang telah banyak membantu penulis mencari buku-buku dalam rangka penulisan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tuaku, Bapak Suhadi dan Ibu Nanik Dwi Utari yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang, dan mencukupi semua keperluan pendidikan yang dibutuhkan penulis.
11. Sahabat-sahabatku Tata, Ika, Yudhita, Yayuk, Titin, Kristien, Icha, Lusi, Siska, Dwi, Trijay, Budi, Nova, Feri, Anton, Mas Njoo, Mas Leo, Mas Hendrik, Mas Bayu, Mas Bram, Pak Guru Catur, Mbak Tyas, dan masih banyak lagi teman-teman seperjuanganku. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian pada umumnya, dan bagi keluarga besar Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Penulis

Andina Putri Nugraheni

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Manfaat Penulisan.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Landasan Teori.....	19
G. Hipotesis .....	42
H. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	43
1. Metode Penelitian .....	43

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pendekatan Penelitian.....	47
3. Metode Penulisan.....	49
I. Sistematika Penulisan .....	49

## **BAB II : FAKTOR PENDORONG PEMBERONTAKAN PKI**

### **DI MADIUN TAHUN 1948**

A. Latar Belakang Politik Pemerintahan Pusat.....	51
1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin .....	51
2. Pembentukan FDR .....	60
3. Reorganisasi dan Rasionalisasi APRI.....	63
B. Kedatangan Muso dari Moskow.....	67
1. PKI sampai dengan kedatangan Muso dari Moskow.....	67
2. Situasi Internasional yang mengiringi kedatangan Muso dari Moskow .....	72
3. Muso.....	75
C. Latar Belakang Kondisi Geografi, Sosial, Ekonomi, Kepartaian, dan Pemerintahan di Madiun.....	83
1. Latar Belakang Kondisi Geografi di Madiun.....	83
2. Latar Belakang Sosial di Madiun.....	84
3. Latar Belakang Ekonomi di Madiun.....	85
4. Latar Belakang Kepartaian di Madiun .....	85
5. Latar Belakang Pemerintahan di Madiun.....	86

**BAB III : PROSES MELETUSNYA PEMBERONTAKAN PKI**

**DI MADIUN TAHUN 1948**

A. Persiapan Pemberontakan.....	87
B. Jalannya Pemberontakan.....	90
1. Pertempuran di Kota Solo .....	90
2. Pecahnya pemberontakan PKI di Madiun.....	97
C. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemberontakan.....	101
D. Korban Pemberontakan.....	103
E. Dampak Pemberontakan.....	106
1. Dampak Politik .....	106
2. Dampak Ekonomi .....	107
3. Dampak Militer.....	108
4. Dampak Sosial .....	109
5. Dampak Internasional .....	109

**BAB IV : USAHA PEMERINTAH MENUMPAS PEMBERONTAKAN**

**PKI DI MADIUN TAHUN 1948**

A. Persiapan Operasi Penumpasan .....	113
1. Operasi Penumpasan dari arah barat .....	113
a. Rencana Operasi .....	113
b. Pasukan TNI yang dikerahkan.....	114
2. Operasi Penumpasan dari arah timur .....	115
a. Rencana Operasi .....	115
b. Pasukan TNI yang dikerahkan.....	116

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Pelaksanaan Operasi Penumpasan PKI.....	117
1. Operasi Penumpasan dari arah barat .....	117
2. Operasi penumpasan dari arah timur .....	124
C. Strategi PKI menghadapi Operasi Penumpasan Pasukan RI ..	129
D. Tertangkapnya Muso dan para pemimpin PKI lainnya .....	132
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>144</b>
<b>SUPLEMEN .....</b>	<b>165</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Susunan Kabinet Amir Syarifuddin sebelum reshuffle .....	144
Lampiran 2	: Susunan Kabinet Amir Syarifuddin sesudah reshuffle .....	145
Lampiran 3	: Susunan Kabinet Hatta.....	147
Lampiran 4	: Pidato Presiden Soekarno .....	148
Lampiran 5	: Pidato Muso .....	151
Lampiran 6	: Undang-Undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden dalam keadaan bahaya .....	153
Lampiran 7	: Peta daerah-daerah yang diduduki PKI sebelum melakukan pemberontakan.....	155
Lampiran 8	: Peta jalannya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 ....	156
Lampiran 9	: Peta operasi penumpasan PKI melalui poros barat dan timur	157
Lampiran 10	: Peta pelaksanaan operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 .....	158
Lampiran 11	: Struktur organisasi PKI.....	159
Lampiran 12	: Dokumen Politbiro CC PKI terkait nama Muso .....	160
Lampiran 13	: Paspor Muso.....	161
Lampiran 14	: Gambar Muso.....	162
Lampiran 15	: Gambar Suripno .....	163
Lampiran 16	: Gambar Amir Syarifuddin .....	164

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1913, menjelang Perang Dunia I, seorang aktivis politik yang berhaluan marxis berkebangsaan Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet tiba di Hindia Belanda dari negeri Belanda.<sup>1</sup> Sejauh penelitian yang sudah berlangsung nama Sneevliet adalah pembawa ideologi komunisme ke Indonesia.<sup>2</sup> Nama lengkap dari Sneevliet adalah Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet, lahir di Rotterdam pada tanggal 13 Mei 1883. Dia mulai aktif dalam dunia politik ketika bergabung dalam *Sociaal Democratische Arbeid Partij* (SDAP) di Nedherland pada tahun 1902.

Setibanya di Hindia Belanda Sneevliet bekerja sebagai staf redaksi surat kabar perdagangan "*Soerabajaasch Handelsblad*" milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di Jawa Timur. Tetapi tidak lama kemudian pindah ke Semarang dan menjadi sekretaris di perusahaan "*Semarangsche Handelsvereniging*". Bagi Sneevliet tinggal di Semarang sangat menguntungkan karena Semarang adalah pusat dari *Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP), serikat buruh tertua di Indonesia dan pada masa itu merupakan suatu perkumpulan yang sudah tersusun baik.<sup>3</sup> Selanjutnya, Sneevliet mengadakan kontak dengan orang-orang

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI : Latar belakang, aksi, dan penumpasannya*, Jakarta, PT Cipta Lamtoro Gung Persada, hlm. 7.

<sup>2</sup> Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), 1983, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*, Jakarta, LSIK, hlm. 9.

<sup>3</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5*, Jakarta, PT Balai Pustaka, hlm. 198.

Belanda yang berhaluan sosialis yang ada di Hindia Belanda, dan pada tahun 1914 bersama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma mendirikan organisasi marxis yang pertama di Asia Tenggara, dengan sebutan *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV).<sup>4</sup> Sneevliet dan teman-temannya dalam ISDV giat menyebarkan propaganda-propaganda komunis terutama kepada pemuda-pemuda di Hindia Belanda dengan menerbitkan majalah *Het Vrije Woord* (Suara Kebebasan), *Soeara Mardika*, dan *Soeara Rakyat* sebagai medianya.

Tidak mudah bagi Sneevliet untuk menanamkan ajaran marxisme di kalangan masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu, sehingga para pengurus ISDV berusaha mendekati masyarakat dengan menggunakan organisasi lain sebagai perantaranya. Mula-mula ISDV bersekutu dengan *Insulinde*.<sup>5</sup> Namun kerjasama itu hanya mampu bertahan selama satu tahun, karena tujuan dari ISDV untuk mendapat simpati rakyat tidak tercapai. Sasarannya kemudian ditujukan kepada Sarekat Islam (SI) yang pada waktu itu (1916) merupakan suatu kekuatan raksasa didalam pergerakan nasional dengan ratusan ribu anggotanya.<sup>6</sup> Caranya adalah dengan memasukkan anggota ISDV menjadi anggota SI, dan sebaliknya anggota SI dibolehkan menjadi anggota ISDV atau dengan sistem keanggotaan rangkap.<sup>7</sup>

Taktik ini ternyata berhasil menarik simpati Semaun dan Darsono yang sebelumnya terdaftar sebagai anggota Sentral Sarekat Islam cabang Surabaya. Mereka kemudian pindah ke Semarang dan menjadi pimpinan SI cabang

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>5</sup> NN, 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12*, Jakarta, PT Cipta Adi Pustaka, hlm. 204.

<sup>6</sup> *Idem*.

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hal 8.

Semarang. Pengaruh ajaran komunisme dari Sneevliet dengan mudah merasuk dalam diri mereka. Hubungan dengan teman-teman seperjuangannya makin renggang dan keduanya sangat mudah untuk berbuat radikal. Keberhasilan ISDV melakukan infiltrasi dalam tubuh SI disebabkan karena dua hal. Pertama karena Sentral Sarekat Islam sebagai badan koordinasi cabang-cabang SI sangat lemah kekuasaannya. Kedua karena kondisi kepartaian pada masa itu sangat memungkinkan orang untuk menjadi anggota lebih dari satu partai.

Pada kongres SI ketiga di Bandung, Semaun secara terang-terangan menentang agama sebagai dasar pergerakan SI. Ia kemudian memasukkan rencana-rencana komunis sebagai dasar pergerakan. Tindakan Semaun tersebut menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai. SI terbagi menjadi dua kelompok yaitu SI merah yang terdiri dari anggota-anggota SI pengikut aliran komunis dan SI putih yang terdiri dari anggota-anggota SI penentang ajaran komunis. SI merah dipimpin oleh Semaun, Darsono, Muso, dan Alimin.<sup>8</sup> Sedangkan SI putih dipimpin oleh Abdul Muis, Agus Salim, dan Suryopranoto.

---

<sup>8</sup> Terdapat perbedaan dalam penulisan nama Muso. Dalam buku berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan* jilid 8 yang ditulis oleh A.H. Nasution penulisan Muso menggunakan 1 huruf s. Begitu juga dalam buku berjudul *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI : Latar belakang, aksi, dan pemumpasannya* yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, buku berjudul *Madiun : Dari Republik ke Republik* yang ditulis Himawan Soetanto, buku berjudul *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan PKI di Indonesia* yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, buku berjudul *Lubang-lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun* yang disusun oleh tim Jawa Pos, dan buku berjudul *Indonesia Abad Ke-20* jilid I dan II yang ditulis oleh G. Moedjanto. Ada pula buku-buku yang menuliskan nama Muso dengan menggunakan 2 huruf s, yaitu Muso. Buku-buku tersebut adalah *Sejarah Nasional Indonesia* yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo dkk., buku berjudul *Peristiwa Cuop Berdarah PKI September 1948 di Madiun* yang ditulis oleh Pinardi, buku berjudul *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004* yang ditulis oleh Ricklefs, buku terjemahan berjudul *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* yang ditulis oleh George Mc. Turnan Kahin, buku berjudul *Rakyat dan Negara* yang ditulis oleh Onghokham, dan buku berjudul *“Yang Berlawanan”* karangan Imam Soedjono. Penulis menggunakan penulisan nama Muso dengan 1 huruf s karena sesuai dengan ketiga buku primer yang dijadikan sumber dalam menyusun Skripsi ini. Alasan ini diperkuat dengan dokumen-

Keberhasilan Revolusi Rusia tahun 1917 dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Sneevliet untuk menyerukan secara terang-terangan agar penganut marxis di Hindia Belanda meniru perjuangan kaum marxis Rusia. Demikian juga surat kabar ISDV memuat hasutan-hasutan agar dikobarkan pemberontakan dan dikibarkan bendera merah.<sup>9</sup> Sneevliet dan teman-temannya semakin memperluas pengaruh komunis ke kalangan yang mempunyai posisi penting di masyarakat. Sasaran mereka adalah anggota AD, AL, dan para pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir tahun 1917 ISDV mulai mengerahkan tentara-tentara dan para pelaut untuk mendukung aksi-aksi mereka.

Perkembangan ISDV yang semakin membahayakan mendorong pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan tegas dengan jalan mengusir Sneevliet dari Hindia Belanda pada tahun 1918, Brandsteder pada tahun 1919, Baars pada tahun 1921, dan sisa-sisa kelompok radikal lainnya pada tahun 1923.<sup>10</sup> Setelah diusir, Sneevliet kemudian tinggal di Cina. Kini ISDV berada di tangan Semaun dan seorang pemuda bangsawan Jawa yang bernama Darsono.<sup>11</sup>

Pada tahun 1918 SDAP mengumumkan perubahan nama partainya menjadi Partai Komunis Belanda. Perubahan tersebut ternyata mendorong ISDV untuk mengikuti langkah yang ditempuh SDAP. Pada kongres ISDV yang ketujuh tanggal 23 Mei 1920 diputuskan bahwa ISDV berganti nama menjadi Partai

---

dokumen Politbiro PKI yang dilampirkan dalam buku *Madiun dari Republik ke Republik*. Dalam dokumen-dokumen itu nama Muso dituliskan dengan 1 huruf s.

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>10</sup> *Idem*.

<sup>11</sup> M.C. Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, hlm. 362.

Komunis Indonesia. Semaun terpilih menjadi ketua dan Darsono sebagai wakil ketua. Jadi ISDV merupakan perkumpulan yang merintis berdirinya PKI.<sup>12</sup>

Pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 1920 berlangsung kongres kedua Komintern di Petrograd dan Moskow.<sup>13</sup> Dalam kongres itu Sneevliet yang hadir sebagai wakil Indonesia dengan nama samaran Maring menjadi sekretaris komisi.<sup>14</sup> Dia berusaha agar PKI diijinkan untuk bekerjasama dengan SI, karena merupakan satu-satunya jalan agar PKI bisa berkembang dan mencapai kemenangan komunis. Sesungguhnya Komintern menentang adanya Pan-Islamisme yang menjadi dasar pergerakan SI, namun akhirnya diputuskan bahwa Komintern menyetujui taktik tersebut.

Pertentangan didalam tubuh SI mencapai puncaknya pada kongres nasional keenam SI bulan Oktober 1921 di Surabaya.<sup>15</sup> Disini Haji Agus Salim mengadakan pertentangan dengan memprakarsai suatu tindakan yang didukung oleh Abdul Muis yang menegaskan perlunya disiplin partai dan meminta agar tidak ada anggota SI yang juga menjadi anggota partai lain pada waktu yang bersamaan.<sup>16</sup> Sedangkan Semaun yang didukung oleh Tan Malaka sangat menentang tindakan itu. Haji Agus Salim menjawab penolakan Semaun dengan menegaskan bahwa Nabi Muhammad sudah mengajarkan tentang ekonomi

---

<sup>12</sup> G. Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad ke-20 jilid 1*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 36.

<sup>13</sup> Komintern atau Komunis Internasional adalah organisasi tertinggi bagi partai komunis di beberapa negara. Organisasi ini berdiri pada tahun 1919 sebagai tempat untuk menyatukan perjuangan kaum komunis secara internasional. Prinsip dasar dari Komintern perang rakyat, diktatur prolerariat, pemerintahan soviet, dan aksi internasional. Bagi Komintern, kaum komunis menghadapi 2 front, yaitu front negara-negara Barat dengan perjuangan kelas dan front negara-negara Timur dengan dasar pergerakan pembebasan nasional.

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk, *op. cit.*, hlm. 203.

<sup>15</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>16</sup> Goerge Mc Turnan Kahin, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta, PT Pustaka Sinar Harapan, hlm. 98.

sosialis 12 abad sebelum Marx lahir. Sanggahan Agus Salim ini berhasil meyakinkan para anggota kongres dan akhirnya mayoritas suara menyetujui adanya disiplin partai.

Semaun kemudian meninggalkan Hindia Belanda untuk menghindari penangkapan akibat kegiatan politiknya yang semakin membahayakan pemerintah Hindia Belanda. Pimpinan PKI kemudian dipegang oleh Tan Malaka, seorang Minangkabau yang berusaha memulihkan kerjasama PKI dan SI. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menangkap Tan Malaka dan berencana untuk membuangnya ke Kupang. Tetapi Tan Malaka menolak rencana tersebut dan memilih pergi ke luar negeri.

Kepergian Tan Malaka ke luar negeri menimbulkan kekosongan kepemimpinan dalam tubuh PKI. Namun kejadian ini tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 24 Mei 1922 Semaun kembali lagi ke Hindia Belanda. Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari 1923 Darsono kembali dari Moskow atas perintah Komintern untuk mendampingi Semaun.<sup>17</sup> Berkat bantuan Alimin dan Muso dari PKI cabang Jakarta, peranan PKI dalam percaturan politik di Hindia Belanda semakin besar. PKI tidak segan-segan mempergunakan kepercayaan rakyat seperti ramalan Joyoboyo dan Ratu Adil sebagai daya tariknya. PKI juga mulai membentuk organisasi pemuda dengan nama Barisan Muda, dan mulai memperhitungkan partisipasi wanita didalam organisasinya.<sup>18</sup>

PKI berhasil tumbuh menjadi partai politik dengan pengikut yang semakin hari terus bertambah. Tujuan dari perjuangan PKI itu sendiri adalah mewujudkan

---

<sup>17</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk, *op. cit.*, hlm. 207.

<sup>18</sup> *Idem.*

masyarakat komunis di Hindia Belanda. Upaya PKI tersebut berhasil mencetuskan pergolakan rakyat di beberapa tempat, yaitu pada tanggal 12 – 14 November 1926 di Karesidenan Jakarta, tanggal 12 November – 5 Desember 1926 di Banten, tanggal 12 – 18 November 1926 di Priangan, tanggal 12 November – 15 Desember 1926 di Kediri, dan tanggal 1 Januari – akhir Februari 1927 di Silungkang, Sumatra Barat.<sup>19</sup>

Pemberontakan yang dilancarkan PKI di berbagai wilayah Hindia Belanda tersebut berhasil ditumpas seluruhnya oleh pemerintah. PKI kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ribuan pengikut PKI ditangkap, dipenjarakan, dan ada yang dibuang ke Papua (dahulu Irian Jaya). Namun Alimin dan Muso berhasil lolos dari pengejaran pemerintah dan melarikan diri ke luar negeri. Kegagalan pemberontakan di berbagai wilayah itu benar-benar mematikan aktivitas PKI. Hampir 10 tahun lamanya kegiatan PKI tidak muncul kembali.

Muso kembali menginjakkan kaki di Hindia Belanda pada tahun 1935. Komintern mengirimnya untuk menjalankan suatu kebijakan baru, yaitu Doktrin Dimitrov. Doktrin Dimitrov adalah doktrin yang menekankan bahwa komunis harus bekerjasama dengan kekuatan manapun juga termasuk kekuatan imperialis untuk menghadapi kekuatan Fasisme dan Naziisme. Doktrin ini dicetuskan oleh Georgi Dimitrov yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekjen Komintern tahun 1935 – 1943. Dengan bantuan Djoko Sudjono, Pamudji dan Achmad Sumadi, Muso melakukan kegiatan komunis bawah tanah dengan membentuk organisasi PKI ilegal. Tetapi kegiatan ini tidak memberikan hasil apapun, sehingga pada

---

<sup>19</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 13.

tahun 1936 Muso kembali lagi ke luar negeri. Kegiatan utama kaum komunis disalurkan melalui Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dimana tokoh utamanya adalah Amir Syarifuddin.

Tahun 1940-an dapat dikatakan sebagai tahun yang paling memprihatinkan bagi kaum komunis di Indonesia.<sup>20</sup> Mereka sama sekali tidak memiliki pemimpin yang berkaliber nasional. Hampir semua aksi-aksi PKI selalu bisa ditumpas oleh pemerintah. Pada tanggal 21 Oktober 1945 PKI muncul kembali dibawah pimpinan Moh. Yusuf.<sup>21</sup> Dengan dipelopori oleh Moh. Yusuf PKI melakukan provokasi, penculikan, pembantaian, dan kerusuhan di kawasan Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Percobaan pemberontakan ini juga berhasil ditumpas oleh pemerintah. Tinggal Amir Syarifuddin satu-satunya tokoh komunis Indonesia yang tersisa dan dinilai cukup memiliki kemampuan untuk mengembangkan sayap kiri.

Dalam gerakan selanjutnya Amir Syarifuddin melakukan konsolidasi dengan kelompok sosialis yang dimotori oleh Sutan Syahrir dalam Partai Sosialis (PS).<sup>22</sup> Konsolidasi ini dilakukan untuk menyusun kekuatan sayap kiri sehingga mampu bergerak secara terang-terangan sebagai sebuah partai komunis. Para tokoh komunis yang berada di luar negeri mendukung upaya penyusunan kekuatan tersebut dan secara berangsur-angsur datang ke Indonesia. Sardjono tiba dari Australia pada pertengahan bulan Mei 1946. Kemudian pada tanggal 12 Agustus

---

<sup>20</sup> Maksum, dkk, 1990, *Lubang-lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 1.

<sup>21</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 126.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

1946 Alimin pulang dari pengembaraannya di Cina. Selanjutnya disusul oleh Maruto Darusman, Setiadjit, Abdul Madjid, Tamzil, dan Mulawadi dari Belanda.

Pada tanggal 27 Juni 1947, Kabinet Syahrir jatuh akibat tikaman Amir Syarifuddin beserta kelompoknya.<sup>23</sup> Akibatnya hubungan antara Amir Syarifuddin dan Sutan Syahrir pecah. Tanggal 30 Juni 1947, Presiden Soekarno menunjuk 4 orang formatur kabinet untuk menyusun kabinet koalisi berdasar nasional, yaitu : Mr. Amir Syarifuddin (Partai Sosialis), DR. A. K. Gani (PNI), Dr. Sukiman (Masyumi) dan Setiajid (PBI).<sup>24</sup> Namun mereka gagal membentuk kabinet baru karena partai Masyumi menuntut kursi Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Amir Syarifuddin, A. K. Gani, dan Setiajid sebagai formatur kabinet. Dalam tempo 14 jam mereka berhasil membentuk kabinet dengan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Jabatan penting ini dimanfaatkan oleh Amir Syarifuddin dengan menjadikan Kementrian Pertahanan sebagai basis kekuatan sayap kiri. Dia menyusun sebuah konsep tentara model Tentara Merah Uni Soviet. Tetapi Jendral Soedirman dan Jendral Oerip Soemohardjo dengan tegas menolak konsep tersebut karena TRI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang, bukan tentara model asing.

Pada tanggal 17 Januari 1948 Amir Syarifuddin mewakili pemerintah RI menandatangani hasil kesepakatan Renville yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 diatas kapal "USS Renville" milik Amerika Serikat yang datang dari Shanghai ke Tanjung Priok. Namun sehari sesudah penandatanganan, Partai

---

<sup>23</sup> Maksum, dkk, *op. cit.*, hlm. 2.

<sup>24</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2003, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*, Jakarta, Djambatan, hlm. 51.

Masyumi dan PNI menolak persetujuan itu, bahkan menuntut pembubaran kabinet Amir Syarifuddin. Dengan persetujuan ini Amir dianggap terlalu banyak memberikan konsesi kepada Belanda. Masyumi dan PNI menarik menteri-menterinya dari kabinet koalisi Amir.<sup>25</sup> Pada tanggal 23 Januari 1948 Amir terpaksa mengembalikan mandat kabinet kepada presiden. Mengingat sulitnya membentuk kabinet baru, maka Presiden Soekarno tidak menyerahkan mandat kabinet pada salah satu dari partai yang menjatuhkan kabinet Amir Syarifuddin. Presiden Soekarno justru menunjuk Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet presidensial dengan tugas : (1) menyelenggarakan Perjanjian Renville; (2) mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat; dan (3) rasionalisasi dan pembangunan.<sup>26</sup> Semula Hatta ingin mengikutsertakan semua partai besar dalam kabinetnya, namun karena kelompok sayap kiri terlalu banyak menuntut kursi kabinet termasuk mengembalikan Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan, maka Hatta memilih Partai Masyumi dan PNI saja yang duduk dalam kursi kabinet.

Perpecahan antara Amir dan Syahrir menjadi nyata ketika pada tanggal 13 Februari 1948 Syahrir keluar dari Partai Sosialis dan mendirikan PSI (Partai Sosialis Indonesia).<sup>27</sup> Syahrir juga berhasil menarik tokoh-tokoh cendekiawan termasuk anggota KNIP dan BP-KNIP kedalam partainya. Mereka kemudian memberikan dukungan sepenuhnya pada kabinet Hatta. Pengembalian mandat kabinet dan keluarnya tokoh-tokoh cendekiawan dari Partai Sosialis

---

<sup>25</sup> Himawan Soetanto, 1994, *Perintah Presiden Soekarno : "Rebut Kembali Madiun..."*, Jakarta, PT Pustaka Sinar Harapan, hlm. 107.

<sup>26</sup> Maksum, dkk, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>27</sup> G. Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad ke-20 jilid 2*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 31.

merupakan kerugian besar bagi Amir Syarifuddin. Ia kemudian menggalang persatuan front sayap kiri untuk mengadakan oposisi terhadap pemerintahan Hatta. Dan pada tanggal 26 Februari 1948 dalam sebuah rapat umum di Solo, golongan kiri memperkuat lagi oposisinya terhadap pemerintah dengan jalan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yang merupakan fusi dari kekuatan-kekuatan golongan sayap kiri.<sup>28</sup> Rencana perebutan kekuasaan mulai disusun sejak waktu itu, baik melalui cara-cara politik (parlementer), atau non-parlementer. Rencana perebutan kekuasaan diawali dengan persiapan berupa agitasi, demonstrasi, dan tindakan-tindakan pengacauan lainnya di kota Solo, antara lain penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh.<sup>29</sup> Untuk lebih mengarahkan garis perjuangannya yang lebih agresif, FDR menetapkan sikap politiknya didalam bentuk program kerja sebagai berikut :

1. Tuntutan dibatalkannya persetujuan Renville.
2. Penghentian perundingan-perundingan dengan Belanda sampai ia menarik kembali dari Indonesia.
3. Melakukan nasionalisasi semua kekayaan Belanda tanpa memberikan kompensasi.
4. Menuntut dibubarkannya kabinet presidential Hatta dan dibentuknya kabinet Parlementer dimana diikutsertakan wakil-wakil dari FDR untuk menduduki kursi-kursi penting.<sup>30</sup>

Perjuangan FDR dengan tidak terduga-duga sebelumnya mendapat angin yang kuat dengan datangnya Muso, seorang tokoh komunis *kawakan* yang tiba di tanah air dengan menyamar sebagai sekretaris Soeripno, yaitu seorang pejabat yang pernah diutus Pemerintah RI untuk mengadakan perundingan dengan

---

<sup>28</sup> Pinardi, 1967, *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*, Jakarta, Inkopak-Hazera, hlm. 29.

<sup>29</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>30</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 29.

Pemerintah Uni Soviet.<sup>31</sup> Keduanya tiba di Bukittinggi melalui Rangoon pada tanggal 3 Agustus 1948. Muso bisa masuk kembali ke Indonesia dengan menggunakan nama samaran Soeparto. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1948, Soeripno dan Muso tiba di Yogyakarta setelah berhasil menembus blokade Belanda dengan pesawat amfibi “Catalina” dan mendarat di Campurdarat, Tulungagung. Tiga hari kemudian mereka menghadap Presiden Soekarno di Yogyakarta.

Sesudah kedatangan Muso ke Yogyakarta, Amir Syarifuddin dan sebagian besar pemimpin FDR lainnya mengakui Muso sebagai pemimpin mereka. Muso kemudian mengambil alih kepemimpinan FDR dan menjadikan organisasi itu menjadi organisasi komunis. Pada tanggal 1 September 1948, dibentuklah suatu politbiro baru PKI yang beranggotakan tokoh-tokoh komunis muda seperti D.N. Aidit, H.M. Lukman, Nyoto, dan Sudisman. Dan pada pertengahan bulan September 1948, pertempuran terbuka antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang pro-PKI dan pro-Pemerintah telah meletus di Surakarta.<sup>32</sup>

Pada tanggal 17 September 1948 pasukan-pasukan yang menentang program Re-Ra Kabinet Hatta karena hasutan PKI mulai melakukan serangan terbuka. Keesokan harinya tanggal 18 September 1948 pukul 03.00, ketika seluruh perhatian ditujukan ke kota Solo, meletuslah di kota Madiun tiga kali tembakan pistol sebagai tanda dimulainya pemberontakan yang dilakukan PKI.<sup>33</sup> Sejak dahulu daerah Madiun merupakan daerah pembuangan pangeran-pangeran yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>32</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 68.

<sup>33</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm 21.

tidak setia kepada raja dan pemberontak-pemberontak.<sup>34</sup> Dengan didukung oleh kekuatan satu brigade FDR dibawah pimpinan Soemarsono dan kolonel Djokosujono, kaum komunis melakukan perebutan kekuasaan di Madiun dan memproklamasikan berdirinya “Soviet Republik Indonesia”. Pada tanggal 19 September 1948 Muso membentuk Pemerintah Front Nasional.<sup>35</sup> PKI berhasil menguasai obyek-obyek vital yang ada di Madiun, seperti kantor-kantor pemerintah, Bank, Kantor Pos dan Telepon, Markas Sub-Teritorial Komando Madiun, dan Markas Staf Pertahanan Djawa Timur (SPDT). Dalam tempo singkat Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Sukoharjo, Wonogiri, Blora, Pati, Cepu, dan Kudus telah dikuasai oleh laskar merah.<sup>36</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa latar belakang PKI melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948 ?
2. Bagaimana meletusnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 ?
3. Bagaimana usaha Pemerintah RI menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang PKI melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948.

---

<sup>34</sup> Onghokham, 1983, *Rakyat dan Negara*, Jakarta, PT Grafitas, hlm. 163.

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>36</sup> Maksum, dkk, *op. cit.*, hlm. 15.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses meletusnya pemberontakan di Madiun tahun 1948.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis usaha dari Pemerintah RI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian, yaitu penelitian ilmu pengetahuan sosial dan dapat menambah bahan bacaan yang berguna bagi pembaca dan pemerhati sejarah di lingkungan Universitas Sanata Dharma.

2. Bagi Dunia Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pelengkap dalam pengajaran Sejarah Nasional Indonesia.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 sehingga diharapkan dapat menjadi bekal mengajar kelak di kemudian hari.

4. Bagi Para Pembaca

Menambah pengetahuan pada para pembaca sekalian tentang sejarah masuk dan berkembangnya PKI di Indonesia sehingga diharapkan dapat memperkuat semangat nasionalisme.

### E. Kajian Pustaka

Pengumpulan sumber merupakan bagian yang penting dalam penulisan sejarah. Sumber (Sumber sejarah disebut juga data sejarah ; bahasa Inggris *datum* bentuk tunggal, *data* bentuk jamak ; bahasa latin *datum* berarti pemberian) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.<sup>37</sup> Menurut sifatnya sumber terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari para saksi mata atau pelaku peristiwa sejarah itu sendiri yang terlibat secara langsung maupun yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu terjadi ; atau berupa dokumen resmi dan penting pada masa peristiwa itu terjadi. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata atau hasil karya orang lain yang berasal dari kesaksian seorang saksi.<sup>38</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber tertulis yang berupa buku-buku. Adapun buku-buku sumber primer yang digunakan penulis adalah :

*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948.*

Buku ini ditulis oleh Abdul Haris Nasution. Penerbitan diselenggarakan oleh Disjarah Militer-AD dan penerbit Angkasa Bandung pada tahun 1979. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi pengarang yang ikut berperan dalam perang kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Dalam buku ini diuraikan secara detail bagaimana PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Penjelasan dimulai dari kegentingan yang terjadi di dalam negeri pada masa revolusi 1948,

---

<sup>37</sup> Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, hlm. 96.

<sup>38</sup> Louis Gottschalk, 1985, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, UI Press, hlm. 35.

baik dalam bidang politik, ekonomi, dan hubungan dengan Luar Negeri yang dimanfaatkan oleh PKI untuk merebut kekuasaan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan terjadinya pemberontakan PKI sekaligus usaha dari pemerintah untuk menumpasnya. Buku ini juga membahas bagaimana situasi yang terjadi di sekitar Madiun pada saat meletusnya pemberontakan.

*Perintah Presiden Soekarno : “Rebut Kembali Madiun...”*. Buku ini ditulis oleh Himawan Soetanto dan diterbitkan oleh PT Pustaka Sinar Harapan pada tahun 1994.<sup>39</sup> Buku ini ditulis sesuai dengan pengalaman pengarang selama perang kemerdekaan. Buku ini menguraikan tentang hijrah yang dilakukan pasukan Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa tengah sebagai bentuk kepatuhan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah RI. Setibanya di daerah hijrah pasukan Siliwangi masih harus mamatuhi program Re-Ra Angkatan Perang. Pada saat itu pula mereka mendapat tugas untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin Muso.

*Madiun : Dari Republik ke Republik.*<sup>40</sup> Buku ini ditulis oleh Himawan Soetanto dan diterbitkan oleh PT Kata Hasta Pustaka pada tahun 2006. Buku ini

---

<sup>39</sup> Himawan Soetanto lahir di Magetan Jawa Timur pada tanggal 14 September 1929. Dia adalah putra dari R.H. Muhammad Mangundiprodjo, seorang mayjen NNI dan pernah menjabat sebagai gubernur Propinsi Lampung. Pada tahun 1945 Himawan Soetanto menjadi salah satu anggota TKR. Kemudian pada tahun 1946 ia diterima sebagai siswa Akademi Militer yang baru dibuka di Yogyakarta. Sehari setelah ia dilantik menjadi leNan dua infantri oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Yogyakarta, Belanda menyerang ibukota RI tersebut. Program Re-Ra Kabinet Hatta mengharuskannya ikut berhijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah bersama dengan Divisi Siliwangi. tahun 1971 merupakan puncak karier Himawan Soetanto dalam dinas kemiliteran, yaitu ketika ia menjabat sebagai panglima Kodam IV/ Sriwijaya. Setelah pensiun, ia ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia (1984 – 1988) dan ketua Kwarnas Gerakan Pramuka (1994 – 1998). Sesudah itu Himawan Setanto memilih untuk melanjutkan studinya. Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) ia dapatkan dari STIA, kemudian gelar M.M. dan M.Hum. didapat dari STIM dan UI.

<sup>40</sup> *Madiun : Dari Republik ke Republik* merupakan tesis Himawan Soetanto untuk mendapatkan gelar Magister Humaniora (M.Hum) dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, dan ia dinyatakan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 2006 tesis ini dijadikan buku dan diterbitkan oleh PT Kata Hasta Pustaka.

ditulis berdasarkan pengalaman pengarang selama perang kemerdekaan. Buku ini mengisahkan aspek militer dari pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan yang meletus pada bulan September 1948 terjadi ketika TNI sedang mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi agresi militer Belanda II. Sebagian besar pasukan TNI telah ditempatkan di daerah perbatasan dengan Belanda. Ketika pemberontakan PKI meletus, pasukan Divisi Siliwangi yang berhijrah dari Jawa Barat sedang berada di Solo, sehingga pasukan inilah yang mendapat tugas menumpas pemberontakan.

Sedangkan buku-buku yang termasuk sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah :

*Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia.* Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan pada tahun 1983. Isi dari buku ini dimulai dengan penjelasan singkat tentang ajaran Karl Marx sebagai sumber gerakan Komunis Internasional. Kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai masuknya ajaran komunis ke Indonesia hingga berhasil melakukan tiga kali pemberontakan besar, yaitu tahun 1926, 1948, dan 1965.

*Lubang-lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun.* Buku ini ditulis oleh Tim Jawa Pos, yaitu Maksum, Agus Sunyoto, dan A. Zainuddin, diterbitkan oleh PT Pustaka Utama Grafiti pada tahun 1990. Buku ini menguraikan tentang kebodohan rakyat yang buta huruf, buta informasi, buta bahasa Indonesia dan hidup dalam kemiskinan yang dimanfaatkan oleh kaum komunis untuk mendukung revolusi mereka. PKI juga menyusun kekuatan secara sospol dan militer. Buku ini menyajikan deskripsi secara jelas bagaimana PKI melakukan

pembantaian terhadap siapa saja yang mencoba menghalangi perjuangan kaum komunis.

*Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun.* Buku ini ditulis oleh Pinaridi dan diterbitkan oleh Inkopak – Hazera Jakarta pada tahun 1967. Buku ini dimulai dengan penjelasan mengenai pasang surutnya revolusi Indonesia selama tiga tahun (1945 – 1948). Kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap peristiwa Madiun secara detail, mulai dari prolog peristiwa, bagaimana meletusnya Peristiwa Madiun, Gerakan Operasi militer untuk menumpas para pemberontak sampai dengan berakhirnya riwayat Muso beserta para pemimpin PKI lainnya.

*Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis di Indonesia : Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya.* Buku ini diterbitkan oleh PT Cipta Lamtoro Gung Persada pada tahun 1994. Buku ini menguraikan tentang perkembangan PKI di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, masa demokrasi liberal dan pada masa demokrasi terpimpin. Didalam buku ini juga dijelaskan bagaimana PKI menyusun taktik dan strategi untuk merebut kekuasaan pemerintah.

*Menyingkap Tabir Fakta-Fakta Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun.* Buku ini ditulis oleh Djamal Marsudi dan diterbitkan oleh Merdeka Press Jakarta pada tahun 1965. Buku ini menjelaskan secara singkat faktor politik, militer dan ekonomi yang mendorong PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1948 dan juga kedatangan Muso dari luar negeri yang menambah kekuatan PKI. Didalam buku ini juga memuat pidato Presiden Soekarno, Wakil Presiden

Moh. Hatta, dan Menteri Negara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam menanggapi pemberontakan tersebut. Uraian buku ini diakhiri dengan laporan penangkapan Muso pada tanggal 30 Oktober 1948.

*Negara Madiun ? Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan.* Buku ini ditulis oleh Hersri Setiawan dan diterbitkan oleh Forum Studi Perubahan dan Peradaban pada tahun 2002. Buku ini ditulis sebagai hasil dari wawancara dengan Soemarsono, tokoh komunis yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Bersama dengan Muso dan Amir Syarifuddin, Soemarsono menggerakkan massa untuk melakukan pemberontakan. Buku ini memang bersifat subyektif, karena Soemarsono menilai bahwa Peristiwa Madiun 1948 merupakan pertentangan antara pendukung garis politik pemerintahan Soekarno-Hatta, tetapi ditafsirkan sebagai kup PKI terhadap negara.

## **F. Landasan Teori**

Sebelum masuk pada pembahasan permasalahan diatas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu landasan teori dan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Dari judul skripsi *Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948* dapat dijelaskan teori konflik Marx, konsep pemberontakan, partai politik dan komunisme.

### **1. Teori Konflik Marx**

Di dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan adanya konflik. Konflik adalah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap

masyarakat dalam setiap kurun waktu.<sup>41</sup> Jadi, selama masih terdapat masyarakat, maka selama itu pula terjadi konflik. Sama halnya dengan teori konflik dalam ilmu-ilmu sosial, teori konflik Marx berusaha untuk menjelaskan penyebab terjadinya konflik, kelompok-kelompok yang berkonflik, perkembangan konflik, penyelesaian konflik, dan perkembangan pasca penyelesaian konflik dilihat dari sudut pandang ekonomi.

#### **a. Penyebab terjadinya konflik**

Menurut Marx, konflik yang terjadi antara kelas borjuis dan kelas proletar disebabkan karena adanya penindasan dalam proses produksi. Di dalam proses produksi kelas proletar atau buruh memberikan tenaganya untuk mengoperasikan alat-alat produksi yang dimiliki oleh kelas borjuis. Yang dimaksud dengan alat-alat produksi adalah setiap alat yang dapat menghasilkan komoditas, yaitu barang kebutuhan masyarakat.<sup>42</sup> Karena dibutuhkan masyarakat maka berapapun harganya pasti akan laku terjual. Keuntungan dari penjualan tersebut akan menjadikan kelas borjuis semakin kaya, sehingga mereka mampu memperbanyak alat-alat produksi. Penindasan terjadi karena gaji yang diterima buruh adalah lebih kecil dari nilai tenaga kerja yang diberikan oleh buruh dalam proses produksi.<sup>43</sup> Gaji tersebut sangat pas-pasan, hanya cukup untuk bertahan hidup sehingga dapat datang ke tempat kerja keesokan harinya.

Penindasan yang dilakukan kelas borjuis terhadap kelas proletar bukan saja berdampak secara fisik, tetapi juga psikologis. Penindasan itu menimbulkan

---

<sup>41</sup> Maswadi Rauf, 2001, *Konsensus dan Konflik Politik : Sebuah Studi Penjajagan Teoritis*, Jakarta, Depdiknas, hlm. 2.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

gangguan kejiwaan yang negatif bagi kelas proletar. Marx menyebut hal tersebut sebagai alienasi atau keterasingan. Yang dimaksud dengan keterasingan adalah terpisahnya buruh dari beberapa hal yaitu dirinya sendiri, pekerjaannya, dan masyarakat.<sup>44</sup> Proses produksi membuat buruh tidak bisa lagi menggunakan sebagian tenaganya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan demikian buruh teralienasi dari dirinya sendiri. Buruh juga teralienasi dengan hasil pekerjaannya, karena meskipun mereka yang menjalankan proses produksi tetapi tidak dapat menikmati hasil kerjanya. Keterasingan terhadap masyarakat ditunjukkan dengan tidak tersedianya waktu yang cukup bagi buruh untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya karena panjangnya waktu kerja.<sup>45</sup>

#### **b. Kelompok-kelompok yang berkonflik**

Di dalam teori konflik Marx, kelompok yang berkonflik adalah kelas borjuis dan kelas proletar. Kedua kelas ini dibedakan oleh kepemilikan alat-alat produksi.<sup>46</sup> Kelas borjuis terdiri dari orang-orang yang memiliki alat-alat produksi. Sedangkan kelas proletar terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki alat-alat produksi dan bekerja pada kelas borjuis. Mereka mengoperasikan alat-alat produksi yang dimiliki kelas borjuis untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat.

Konflik antara kedua kelas itu bukanlah konflik dengan sebab yang dangkal, tetapi dengan sebab-sebab yang mendalam karena telah melibatkan unsur-unsur kejiwaan dan pola pikir.<sup>47</sup> Hidup dalam kemewahan akan menentukan kejiwaan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>45</sup> *Idem.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

atau pola pikir kelas borjuis. Mereka akan selalu berusaha untuk mempertahankan kedudukannya dan menumpuk kekayaan. Sedangkan di sisi lain, kelas proletar yang selalu hidup miskin dan tertindas akan memiliki pola pikir untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam rangka memperbaiki kehidupannya. Sehingga kedua kelas tersebut tidak mungkin untuk didamaikan.

Marx membagi masyarakat dalam dua kelas didasarkan pada teori dialektika Hegel. Menurut Hegel, masyarakat berkembang karena cara berpikir manusia yang bersifat dialektis berupa pertentangan antara sesuatu (thesis) dengan sesuatu yang berbeda dari thesis tersebut (antithesis).<sup>48</sup> Pertentangan tersebut akan menghasilkan suatu hal baru yang disebut synthesis. Pertentangan antara thesis dan antithesis digambarkan oleh Marx menjadi dua kelas dalam masyarakat yang saling bertentangan. Kedua kelas yang bertentangan tersebut nantinya akan menghasilkan masyarakat baru yang oleh Marx disebut masyarakat tanpa kelas.

### **c. Perkembangan konflik**

Penindasan terhadap kelas proletar yang berlangsung terus-menerus tentu saja semakin menguntungkan kelas borjuis. Dengan keuntungan tersebut kaum borjuis memperluas usahanya. Sementara kelas proletar tidak bisa menghindar dari penindasan tersebut. Bagi para buruh, gaji yang pas-pasan lebih baik daripada menganggur. Pada perkembangan selanjutnya, kelas borjuis akan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan para penguasa politik. Kelas borjuis membutuhkan perlindungan dari para penguasa politik dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan para penguasa politik mendapatkan bantuan finansial dari

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

kelas borjuis. Dengan semakin kuatnya penindasan yang dilakukan oleh kelas borjuis dan semakin hebatnya kemiskinan yang dialami kelas proletar, semakin kuat alasan yang diberikan Marx bagi terjadinya revolusi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik proletar-borjuis.<sup>49</sup>

#### **d. Penyelesaian konflik**

Menurut Marx, konflik antara kelas borjuis dan kelas proletar hanya dapat diselesaikan dengan cara koersif atau kekerasan. Cara koersif yang dianjurkan Marx adalah revolusi proletariat yakni tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelas proletar untuk menghancurkan masyarakat borjuis secara menyeluruh dalam waktu singkat agar dapat membangun masyarakat baru yang berbeda sama sekali, yakni masyarakat komunis.<sup>50</sup>

#### **e. Perkembangan pasca penyelesaian konflik**

Perjuangan kelas yang dilakukan oleh kelas proletar akan melahirkan pemerintahan baru yang disebut diktatur proletariat. Sesuai dengan namanya, diktatur proletariat menjalankan kekuasaan mutlak atas nama kelas proletariat.<sup>51</sup> Selain terbentuk pemerintahan baru, pasca revolusi juga akan terbentuk masyarakat tanpa kelas.

## **2. Pemberontakan**

Pemberontakan berasal dari kata berontak yang artinya melawan terhadap pemerintah (kekuasaan) secara serentak. Pemberontakan berarti proses, cara,

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

perbuatan memberontak. Berarti juga penentangan terhadap kekuasaan yang sah.<sup>52</sup> Pemberontakan adalah bentuk revolusi yang disertai dengan tindakan kekerasan yang kejam, penuh tipu daya dan tidak berperikemanusiaan.<sup>53</sup> Biasanya pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu sistem politik atau negara. Menurut Aristoteles, motivasi dasar yang mendorong manusia melakukan pemberontakan adalah keinginan untuk mencari keuntungan dan kehormatan. Dua sifat yang sangat manusiawi ini apabila tidak diimbangi dengan tingkat keimanan dan moralitas yang tinggi dari manusianya, maka akan mengarah pada cara-cara yang licik, tidak terpuji, bahkan terkotor sekalipun. Aristoteles selanjutnya menjelaskan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan. Pertama adalah kondisi manusia, khususnya kondisi sosial dan psikologis yang berupa rasa ketidakpuasan dan ketidaksamarataan. Kedua adalah keinginan dan impian yang hendak diraih. Faktor yang kedua ini berada dalam diri manusia. Sedangkan faktor yang ketiga adalah kondisi politik yang tidak sehat. misalnya tidak adanya keadilan didalam proses pemungutan suara.

Konsep pemberontakan tentu saja berbeda dengan konsep gerakan (*movement*), kerusuhan, kudeta, dan demonstrasi. Gerakan (*movement*) merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik, atau kadang malahan ingin menciptakan suatu tata

---

<sup>52</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Balai Pustaka, hlm. 142.

<sup>53</sup> Johannes Rudolf Gerzon Djopari, 1993, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta, PT Grasindo, hlm. 6.

masyarakat yang sama sekali baru dengan memakai cara-cara politik.<sup>54</sup> Kerusuhan menunjuk pada suatu keadaan tidak aman karena banyak terdapat gangguan keamanan seperti perampokan, pembegalan, atau huru-hara.

Kudeta berasal dari bahasa Prancis *coup d' état* yang artinya suatu pergantian atau perubahan pemerintahan tanpa melalui proses peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku. Kudeta dapat pula dikatakan sebagai pergantian atau perubahan pemerintahan dengan jalan melanggar tata peraturan perundangan yang berlaku. Kudeta hanya menyangkut pergantian atau perebutan pimpinan negara atau pemerintahan.<sup>55</sup> Di suatu negara, kudeta dapat terjadi karena adanya konflik intern maupun ekstern. Konflik intern biasanya ditimbulkan karena jalannya pemerintahan yang buruk atau karena tidak adanya pemimpin yang berkualitas sehingga masalah-masalah yang menyangkut kepentingan rakyat tidak dapat diselesaikan.

Dalam kehidupan politik, demonstrasi diartikan sebagai usaha dari sekelompok orang untuk menyatakan kritik atau ketidaksetujuan mereka terhadap suatu kebijaksanaan pihak pemerintah. Oleh karenanya, demonstrasi biasanya dilakukan oleh orang yang ada diluar pemerintahan.<sup>56</sup> Demonstrasi sering terjadi di negara baru atau sedang berkembang karena kesadaran politik masyarakatnya masih rendah. Akibatnya, demonstrasi mengarah pada tindakan-tindakan yang negatif seperti pengrusakan, perkelahian, dan pembunuhan.

Pemberontakan PKI di Madiun sendiri sebenarnya merupakan pemberontakan yang kesekian kalinya dilakukan oleh kaum komunis Indonesia.

---

<sup>54</sup> Miriam Budiarjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm. 162.

<sup>55</sup> NN, 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 9*, Jakarta, PT Cipta Adi Pustaka, hlm. 207.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

Sebagian diantara tokoh penting dalam peristiwa tersebut adalah tokoh komunis yang pernah gagal mengadakan pemberontakan tahun 1926.<sup>57</sup> Pada semua pemberontakan PKI telah jatuh korban beribu-ribu rakyat biasa, pejabat, pemimpin-pemimpin masyarakat yang dianggap tidak sejalan dengan PKI disamping para anggota-anggota PKI sendiri.<sup>58</sup> Sesuai dengan ajaran marxisme untuk melancarkan revolusi sosial, maka dalam setiap pemberontakan PKI selalu menonjolkan sifat yang radikal.

PKI selalu berhasil melibatkan kelompok-kelompok lain ikut terlibat didalam pemberontakannya. Pada pemberontakan tahun 1926, Sarikat Islam yang mestinya secara ideologi berlawanan, ikut terseret karena infiltrasi kaum komunis kedalam SI. Pada pemberontakan tahun 1948 kaum komunis mencoba aliansi dengan kaum sosialis agar PKI mendapat kursi dalam kabinet, sampai pada akhirnya Amir Syarifuddin sempat menjadi perdana menteri.

### 3. Partai Politik

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.<sup>59</sup> Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya

---

<sup>57</sup> Maksun, *op. cit.*, hlm. xi.

<sup>58</sup> Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>59</sup> Ramlan Subakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 116.

partai politik. Kedua teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.<sup>60</sup>

Di negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan partai politik menjadi penting bagi partisipasi rakyat dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin untuk menentukan kebijakan umum negara. Di negara yang menganut sistem totaliter, partai politik dianggap sebagai alat negara untuk membimbing rakyatnya dalam rangka menciptakan stabilitas yang kuat.<sup>61</sup> Adapun fungsi dari partai politik adalah :

- a. Sebagai sarana untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui jalur yang sah berupa pemilu atau dengan paksaan fisik dan psikologis seperti yang biasa dilakukan partai tunggal didalam negara totaliter.
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik sehingga masyarakat memiliki sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung di suatu negara. Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui pendidikan politik dan indoktrinasi politik.
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>61</sup> Abdul Syukur, dkk, 2005, *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar jilid 8*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 15.

pada khususnya.<sup>62</sup> Fungsi ini merupakan kelanjutan dari fungsi partai politik sebagai sarana untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.

- d. Sebagai sarana partisipasi politik yang dilakukan dengan cara membuka kesempatan dan mengajak warga negara untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan politik.
- e. Sebagai wadah untuk memadukan berbagai kepentingan sejumlah warga negara sehingga memunculkan alternatif kebijakan umum dan mampu menciptakan kestabilan politik.
- f. Sebagai sarana penyampaian informasi mengenai keputusan dan penjelasan dari pemerintah kepada masyarakat.
- g. Sebagai suatu lembaga untuk mengendalikan konflik-konflik politik.
- h. Sebagai sarana kontrol politik sehingga mampu meluruskan suatu kebijakan ataupun pelaksanaan politik yang dianggap menyimpang.

Partai politik mulai muncul di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sebagai bentuk manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Partai-partai politik yang muncul menunjukkan keanekaragaman azas politik. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah dia bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) ataukah terang-terangan menganut azas politik keagamaan (seperti SI dan Partai Katholik) atau azas politik sekuler (seperti PNI dan PKI) memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional.<sup>63</sup>

Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920, namun sebenarnya partai yang berhaluan komunis di Indonesia sudah ada

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>63</sup> Miriam Budiarjo, *op. cit.*, hlm. 171.

sebelumnya dengan nama *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV). Perubahan nama ISDV menjadi PKI juga mengikuti jejak SDAP yang pada tahun 1918 merubah nama partainya menjadi Partai Komunis Belanda. Strategi PKI berpegang pada Doktrin Dimitrov yang isinya membenarkan kerjasama kubu komunisme internasional dengan kubu kapitalisme dalam menghadapi fasisme dan naziisme. Berdasarkan doktrin itulah maka pada masa pendudukan Jepang kaum komunis mau bekerjasama dengan Belanda.

Pada tahun 1947 terjadi perubahan strategi gerakan Komunis Internasional yang dipimpin oleh Stalin. Pergantian itu dijalankan dengan pembentukan Biro Informasi Komunis yang lazim disebut *Cominform* (*Communist Information Bureau*) pada tanggal 22 September 1947 di Warsawa.<sup>64</sup> Strategi baru komunis didasarkan pada Doktrin Zhadanov yang menyatakan secara tegas bahwa dunia dibagi dalam dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu “imperialis dan anti demokrasi” dibawah Amerika Serikat dan kubu anti “imperialis yang demokratis” dibawah Uni Soviet. Doktrin Zhadanov selanjutnya menganjurkan agar partai-partai komunis di seluruh dunia merapatkan barisan untuk berjuang atas pola dasar perjuangan yang sama, yaitu “anti imperialis yang demokratis”, dan menganjurkan pula agar kaum komunis melepaskan kerjasamanya dengan sosialis kanan.<sup>65</sup> Doktrin ini dikemukakan dalam konferensi pemuda se Asia Tenggara di Calcuta pada tanggal 19 – 26 Februari 1948.

Dari latar belakang perubahan strategi tersebut, maka sejak itu PKI kemudian menuntut pembatalan persetujuan Renville dan mengancam Hatta yang

---

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 17.

<sup>65</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 28.

hendak merealisasi persetujuan itu.<sup>66</sup> Kaum komunis menilai bahwa Hatta telah menjual tanah air dan bangsa Indonesia kepada kaum kapitalis, meskipun sebenarnya perancang dan penanda tangan persetujuan itu adalah Amir Syarifuddin, pimpinan kaum komunis Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa PKI mengikuti kebijakan yang digariskan Uni Soviet. Tetapi PKI tidak bisa disamakan dengan Partai Komunis Uni Soviet atau Partai Komunis Cina.

Partai Komunis Uni Soviet muncul pada tahun 1912 ketika kelompok Bolshevik dalam Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia memisahkan diri dan mendirikan partai sendiri.<sup>67</sup> Hanya partai Bolsheviklah yang setia pada perjuangan yang besar daripada internasionalisme revolusioner dan dengan teguh memegang pendirian marxis untuk berjuang melawan otokrasi Tsar, melawan kaum tuan tanah, kaum kapitalis, dan menentang perang imperialis.<sup>68</sup> Perjuangan partai Bolshevik ini mendapat dukungan dari masyarakat kelas buruh.

Sejak bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 1917, partai Bolshevik menarik massa dari kaum buruh dan kaum tani untuk melancarkan revolusi sosialis. Kedatangan Lenin dari pembuangannya di luar negeri merupakan sumber kekuatan bagi kaum buruh dalam menyokong revolusi. Lenin kemudian menjadi pemimpin kaum Bolshevik dan mendirikan Partai Komunis Uni Soviet. Ia selalu mengajarkan bahwa tanpa revolusi yang dilancarkan oleh kelas buruh maka

---

<sup>66</sup> Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno : "Rebut Kembali Madiun..."*, op. cit., hlm 111.

<sup>67</sup> Bolsjevik adalah kelompok radikal dari Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia yang menghendaki cara-cara perubahan secara revolusioner dengan pimpinan pusat yang ketat. Kaum Bolsjevik menyetakan bahwa merekalah satu-satunya pengikut Marx yang setia.

<sup>68</sup> Komisi CC PKSU (B), 1956, *Sejarah Partai Komunis Soviet Uni (Bolshevik)*, Jakarta, Yayasan Pembaruan, hlm. 193.

kapitalisme tidak dapat digulingkan. Lenin juga meyakinkan pada kelas buruh bahwa mereka akan meraih kemenangan dalam revolusi tersebut.

Dibawah pimpinan Lenin Partai Komunis Uni Soviet dengan didukung oleh kelas buruh dan kaum tani merebut kekuasaan di Petrograd yang pada waktu itu merupakan ibukota Uni Soviet. Mereka menggulingkan kekuasaan pemerintahan nasional yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Usai merebut kekuasaan, Partai Komunis Uni Soviet menyingkirkan semua pesaing-pesaingnya dan menjadi penguasa diseluruh Uni Soviet. Usaha tersebut berhasil dan Partai Komunis Uni Soviet merupakan satu-satunya partai di Uni Soviet dan menjadi pemimpin pemerintahan. Jadi tidak ada bedanya antara Partai Komunis Uni Soviet dan pemerintah Uni Soviet.

Partai ini bisa bertahan hidup sampai dengan tahun 1991. Sejak revolusi berakhir, Lenin dan partai komunisnya selalu memaksakan tujuan-tujuannya dengan metode teror dan pembunuhan. Mereka tidak pernah memanfaatkan motivasi masyarakatnya.<sup>69</sup> Di bawah rezim komunis, masyarakat mau bekerja hanya karena takut akan dibunuh. Tekanan-tekanan dan teror-teror telah membuat masyarakat kehilangan daya kreatif dan motivasi. Itulah sebabnya mengapa komunisme di Uni Soviet runtuh.

Di Cina komunisme dikembangkan oleh Mao Ze Dong dengan ajarannya Maoisme yang menekankan peranan desa sebagai pusat revolusi dan peranan petani sebagai pelaku revolusi. Revolusi Rusia berhasil memberikan wawasan baru pada rakyat Cina bahwa marxisme ternyata sebuah ideologi yang dapat

---

<sup>69</sup> <http://www.kompas.com./kompas-cetak/0004/17/nasional/marx07.htm>. 13 April 2007, pukul 14.35.

diterapkan pada masyarakat agraris seperti mereka. Pada pertengahan tahun 1918 seorang kepala perpustakaan Universitas Beijing, Li Da Jau mendirikan perhimpunan penelitian marxisme.<sup>70</sup> Salah satu dari anggota perhimpunan tersebut adalah Mao Ze Dong, yang bekerja sebagai asisten Li Da Jau di perpustakaan Universitas Beijing.

Konferensi perdamaian Paris pada awal tahun 1919 menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi rakyat Cina, karena Republik Cina yang secara formal berpihak pada sekutu yang menjadi pemenang dalam perang dunia tidak mendapatkan keuntungan dari kemenangan tersebut. Sidang menolak tuntutan Cina agar pendudukan Jepang atas jazirah Shang Dong diakhiri. Rasa kecewa dari rakyat Cina tampak pada demonstrasi mahasiswa tanggal 4 Mei 1919, yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan 4 Mei.<sup>71</sup> Suasana pada saat itu yang diselimuti oleh perasaan anti imperialisme dan anti kolonialisme Barat memudahkan jalan bagi masuknya komunisme. Komunisme ternyata mempunyai daya tarik yang sangat kuat bagi banyak orang intelek Cina, karena mengajari bahwa Cina dijadikan miskin dan terbelakang oleh semacam kombinasi dari imperialisme kapitalis dan feodalisme dari para gembong perang.<sup>72</sup>

Setelah diusir dari Hindia Belanda pada tahun 1918 karena kegiatannya yang radikal, Komintern mengirim Sneevliet ke Cina. Di Shanghai ia mengumpulkan orang-orang dari organisasi-organisasi berhaluan marxis di Cina dan kemudian

---

<sup>70</sup> Warin Diya Sukisman, 1992, *Sejarah Cina Kontemporer (Dari Nur Ha Ci sampai Deng Xiao Ping)*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 161.

<sup>71</sup> *Idem.*

<sup>72</sup> Willem G.J. Rummelink, 1982, *Sejarah Cina : Ikhtisar Sejarah dan Kebudayaan Cina dari Zaman Prasejarah sampai Masa Kini*, Yogyakarta, Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, hlm. 117.

mendirikan PKC pada tanggal 21 Juli 1921 mengikuti contoh dari Uni Soviet. Sneevliet mendorong komunis Cina untuk menyesuaikan dengan pemikiran Lenin dan bekerjasama dengan kaum revolusioner borjuis sekitar Sun Yat Sen.<sup>73</sup> Ia yakin bahwa partai Sun Yat Sen, yaitu Kuomintang dapat dimanfaatkan oleh PKC dalam melawan imperialisme barat. Pada mulanya kedua partai ini dapat saling bekerjasama terutama karena desakan penasihat-penasihat Uni Soviet yang mengarahkannya dan membantu kedua kelompok tersebut.<sup>74</sup> kerjasama tersebut berakhir ketika terjadi pertikaian antara Chiang Kai-Shek sebagai pemimpin Kuomintang yang berencana memusnahkan kaum komunis dan tidak menangani masalah-masalah dalam negeri.

Pada tahun 1927 pertikaian itu berubah menjadi perang saudara terbuka. Perang Chiang Kai-Shek melawan kaum komunis ini berjalan dengan sukses karena dalam beberapa saat saja tentara Kuomintang dapat menguasai sebagian besar wilayah Cina.<sup>75</sup> Kaum komunis mundur ke daerah pedesaan agar terbebas dari serangan tentara Kuomintang. Sampai dengan tahun 1934 perkembangan PKC dalam usaha merebut kekuasaan pemerintah tidak begitu bagus.

Mao Ze Dong diangkat menjadi pimpinan PKC pada tahun 1935. Sejak saat itu kekuatan PKC terus meningkat dan semakin berkembang. Ia mendasarkan gerakan komunis di wilayah pedesaan, bukan di kota-kota. Alasannya karena PKC gagal merebut kota-kota yang dikuasai Kuomintang, dan juga karena pada saat *Long March*, PKC mendapat bantuan dari desa-desa yang dilewati. Mao Ze Dong menekankan pada kemampuan revolusioner petani daripada kaum buruh kota. Di

---

<sup>73</sup> *Idem.*

<sup>74</sup> William Ebenstein dan Edwin Fogelman, *op. cit.*, hlm. 85.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 85 – 86.

tahun 1947, PKC sudah siap bertempur menumbangkan pemerintahan partai nasionalis pimpinan Chiang Kai-Shek.<sup>76</sup> Dua tahun kemudian PKC berhasil merebut dan menguasai seluruh daratan Cina dan segera berupaya untuk merombak struktur pemerintahan dengan ideologi komunis. Kebijakan pertama yang mereka lakukan condong ke satu pihak yaitu ke Uni Soviet.<sup>77</sup>

Pada bulan Februari 1950 Cina dan Uni Soviet menandatangani perjanjian persahabatan dan persekutuan saling membantu. Kemudian secara besar-besaran Uni Soviet memberikan bantuan kepada Cina berupa barang-barang, penasehat politik, ekonomi dan militer. Namun hubungan harmonis tersebut hanya bertahan sampai dengan bulan Februari 1956, tepatnya ketika kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-20. Dalam kongres tersebut Khrushchev mengemukakan kebijakan de-Stalinisasi yang sangat mempengaruhi program-program pembaharuan di Cina. Mao Ze Dong yang sesungguhnya pengagum Stalin sangat terpuak dengan kebijakan tersebut.

Mao Ze Dong kemudian tidak berpegang pada Leninisme. Pemikirannya juga menyimpang dari ajaran Marx yang menegaskan bahwa kekuatan revolusioner yang utama dalam masyarakat kapitalis ialah kelas buruh industri. Cina adalah negara agraris yang luas dan Mao Ze Dong justru menyerang lembaga-lembaga yang merupakan pilar penyangga masyarakat. Itu bisa terjadi karena pada dasarnya tujuan Mao Ze Dong dan PKC bukan membangun sosialisme, melainkan untuk membangun ekonomi nasional yang kuat.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> <http://media.isnet.org/ipitek/100/Mao.html>. 13 April 2007, pukul 14.35.

<sup>77</sup> Sutarjo Adikusilo J.R. (ed), 2003, "Revolusi Kebudayaan Cina", 1938 : *Ngablak dan Dunia dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, hlm. 160.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

### 3. Komunisme

Komunisme adalah suatu paham yang mendasarkan diri pada Marxisme dan Leninisme.<sup>79</sup> Marxisme merupakan ajaran yang dicetuskan oleh Karl Heinrich Marx, seorang ilmuwan sosialis dan revolusioner dari Jerman. Vladimir Ilyic Ulyanov atau yang lebih dikenal dengan nama Lenin adalah orang yang mengembangkan ajaran Marx menjadi Marxisme-Leninisme. Karl Heinrich Marx lahir di kota Trier, distrik Moselle, Prussian Rhineland pada tanggal 5 Mei 1818.<sup>80</sup> Ayahnya adalah seorang pengacara yang sangat mengagumi Immanuel Kant dan Voltaire. Marx menjadi mahasiswa di Universitas Bonn pada tahun 1835, namun setahun kemudian ia pindah ke Universitas Berlin untuk mendalami hukum dan filsafat. Disinilah Marx terpengaruh pada pemikiran Wilhelm Friedrich Hegel dan Bruno Bauer, yang kemudian menjadikannya seorang pengikut filsafat Hegelianisme. Sejak tahun 1837 Marx terlibat serius dalam pergerakan Hegelian Muda. Keterlibatannya dalam gerakan itu menyulitkan dirinya untuk mendapatkan gelar doktor. Gelar itu barulah ia dapatkan di Universitas Jena pada tahun 1841.

Gelar doktor sebenarnya memberikan peluang yang besar bagi Marx untuk menjadi seorang mahaguru, tetapi ia lebih memilih untuk terjun ke dunia jurnalistik. Pada tahun 1842 Marx bekerja sebagai editor *Rheinische Zeitung*, harian liberal terbitan Cologne yang didukung oleh para industrialis Rhenish. Artikel-artikel tajam yang ditulis Marx khususnya yang membahas masalah-masalah ekonomi mendorong pemerintah untuk menutup harian tersebut.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> NN, jilid 9, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>80</sup> Adam Kuper dan Jessica Kuper, 2000 : *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial jilid 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 615.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 616.

Setelah menikah dengan Jenny, anak dari Baron von Westphalen pada tahun 1843, Marx pindah ke Paris yang pada waktu itu merupakan pusat pemikiran sosialis. Di tempat ini ia bertemu dan menjalin kerjasama dengan salah satu tokoh sosialis Prancis yang bernama Friedrich Engels. Perkenalannya dengan Friedrich Engels telah merubah Marx dari seorang liberal radikal menjadi seorang sosialis. Berkat Engels, Marx menjadi semakin paham terhadap masalah-masalah ekonomi, khususnya tentang kehidupan para pekerja. Keduanya kemudian menyatakan diri sebagai kaum komunis untuk membedakan dengan kelompok-kelompok sosialis Prancis lainnya. Marx dengan cepat menjadi seorang komunis yang meyakinkan dan meletakkan pandangan-pandangannya dalam seri manuskrip yang dikenal dengan *Ekonomish-philosophische Manuskripte* (Manuskrip ekonomi dan Filsafat) pada tahun 1844. dalam manuskrip ini ia menguraikan konsepsi humanis mengenai komunisme, yang dipengaruhi filsafat Ludwig Feurbach dan didasarkan pada suatu kontras antara karakteristik tenaga kerja yang teralienasi dibawah kapitalisme.<sup>82</sup>

Pada tahun 1847 Marx menulis sebuah buku yang berjudul '*Misere de la philosophie*' (kekuatan filsafat). Disini ia meletakkan dasar-dasar pemikirannya tentang interpretasi ekonomi dari sejarah.<sup>83</sup> Marx tidak mengklaim bahwa hanya faktor ekonomi yang menciptakan sejarah, tetapi menyatakan bahwa faktor ini yang terpenting sebagai dasar atau landasan untuk membangun suprastruktur kebudayaan, perundang-undangan, dan pemerintahan.<sup>84</sup> Ajaran dari Marx ini

---

<sup>82</sup> *Idem.*

<sup>83</sup> Lembaga Studi Ilmu -ilmu Kemasyarakatan, *op. cit.*, hlm. 1.

<sup>84</sup> William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1987, *Isme-isme Dewasa Ini*, Jakarta, Erlangga, hlm. 2.

disebut materialisme dialektis. Marx dan Engels memadukan pemikiran mereka dalam buku berjudul *Manifest der Communistischen Parthey* (Manifesto Komunis) yang diterbitkan pada tahun 1948. Marx dan Engels menyebut diri mereka kaum komunis. Di dalam “Manifesto Komunis”, Karl Marx menulis :

*“ The Communists openly declare, that their ends can be attained only by forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling classes tremble at a communistic revolution. The proletariat have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries, unite!”*

*(Kaum komunis secara terbuka mengatakan, bahwa tujuan mereka hanya dapat dicapai dengan menggulingkan secara paksa segala kondisi social yang sedang bercokol. Biarlah mereka yang sedang berkuasa gemetar pada revolusi komunis. Kaum proletar tidak akan kehilangan apa-apa, selain belunggu-belenggunya. Mereka akan memenangkan dunia. Kaum buruh sedunia, bersatulah!)<sup>85</sup>*

Pada tahun 1867 Marx menerbitkan 1 jilid buku hasil karyanya berjudul *Das Kapital* yang dikhususkan sebagai studi proses produksi kapitalis. Tulisan Marx ini didasarkan atas keprihatinannya pada kaum proletar yang bekerja berjam-jam, namun mereka tetap miskin karena mendapat upah yang sangat rendah. Marx yakin bahwa masalah kaum proletar ini disebabkan adanya lembaga “milik pribadi” dan penguasaan kekayaan secara individual. Persoalan ini hanya dapat dipecahkan apabila kapitalisme diganti dengan komunisme.<sup>86</sup>

Lenin yang mengembangkan ajaran-ajaran Marx, sehingga dikenal sebagai Marxisme-Leninisme, kemudian mendirikan negara komunis yang pertama di Rusia.<sup>87</sup> Leninisme ditandai oleh keyakinan bahwa perubahan sosial hanya dapat dilakukan melalui revolusi karena proses perubahan yang lebih lunak seperti

<sup>85</sup> Lembaga Studi Ilmu -Ilmu Kemasyarakatan, *op. cit.*, hlm 3 – 4.

<sup>86</sup> NN, 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 10*, Jakarta, PT Cipta Adi Pustaka, hlm. 170.

<sup>87</sup> Lembaga Studi Ilmu -Ilmu Kemasyarakatan, *op. cit.*, hlm. 2.

reformasi cenderung merugikan kaum tertindas.<sup>88</sup> Lenin menamakan gerakan marxis Rusianya sebagai sebuah partai komunis. Menurutnya, revolusi proletar itu harus dipimpin oleh sebuah partai. Partai terdiri atas kaum intelegensia dan para kadernya yang bertugas memberikan kesadaran kelas yang revolusioner kepada kaum buruh dengan mendidik, mereka, mempertajam pertentangan kelas, memanaskan situasi, dan akhirnya, bilamana persyaratan revolusi telah matang, partai akan memimpin revolusi itu.<sup>89</sup> Revolusi Rusia pada tahun 1917 yang dilancarkan oleh Lenin merupakan penyesuaian teori Marx dengan kebutuhan revolusi. Ajaran revolusi Lenin dilebur dengan ajaran sosialisme Marx menjadi ajaran Marxisme-Leninisme atau lebih dikenal dengan sebutan Komunisme.

Komunisme adalah sebuah ideologi yang didasarkan atas pemilikan bersama harta kekayaan dan alat-alat produksi dengan cara revolusioner untuk menghapuskan kapitalisme dan menuju masyarakat tanpa kelas.<sup>90</sup> Komunisme bersifat totaliter, karena memaksa para pengikutnya mengakui ideologi itu sebagai satu-satunya pandangan hidup yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Jadi komunisme bukan saja memberikan pandangan hidup dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, melainkan juga merupakan sumber pemikiran ilmiah. Di sini kelihatan bahwa ilmu pun harus tunduk kepada ideologi.<sup>91</sup>

Ideologi komunis memberikan gambaran mengenai masyarakat yang harus dicapai dan prasarana yang diperlukan untuk mencapainya. Selain itu, setiap anggota partai komunis secara mutlak wajib menerima ajaran komunis sebagai

---

<sup>88</sup> Adam Kuper dan Jessica Kuper, *op. cit.*, hlm. 144.

<sup>89</sup> NN, jilid 9, *op. cit.*, hlm. 88.

<sup>90</sup> Fadli Zon dan M. Halwan Aliudin, 2005, *Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948*, Jakarta, Komite Waspada Komunisme, hlm. 3.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

satu-satunya keseluruhan kebenaran, sehingga siapa berani menolak ia akan dikucilkan.<sup>92</sup> Dalam masyarakat komunis, pandangan hidup bukanlah masalah pribadi setiap manusia, melainkan masalah partai. Agama dan hak milik harus dilenyapkan dan diganti oleh atheisme (ajaran tidak mengenal Tuhan) serta masyarakat yang tak mengenal hak milik, dimana rakyat tidak boleh memiliki apa-apa.<sup>93</sup> Ajaran itu mempunyai pengaruh yang cukup besar sebagai semacam ideologi bagi partai-partai buruh.<sup>94</sup> Bahkan menjadi landasan dari gerakan Komunisme Internasional (Komintern) yang berdiri pada tahun 1919. Dengan demikian, Komunisme adalah sebuah ideologi yang tertutup, karena sama sekali tidak menerima pemikiran-pemikiran diluar ajaran komunis. Adapun dasar pokok dari komunisme yang didasarkan pada pemikiran Marx adalah :

1. Kelas Borjuis dan kelas proletar.

Kelas borjuis adalah mereka yang mempunyai alat-alat produksi, dan karena itu menjadi tuan bagi kelas proletar.<sup>95</sup> Sedangkan kelas proletar adalah kelas buruh. Dalam pandangan Marx, kelas buruh adalah rakyat pilihan yang berdisiplin tinggi, tidak mau mementingkan diri sendiri, berbadan kuat, dan memiliki rasa persaudaraan dengan sesamanya. Dari pandangan Marx inilah kaum komunis memilih kelas proletar sebagai kekuatan untuk mendukung aksi mereka.

---

<sup>92</sup> *Idem.*

<sup>93</sup> Judojono, 1966, *Apakah Komunisme itu? : Bahan-Bahan Indoktrinasi Untuk Dekomunisasi*, Solo, Muhaco, hlm. 3.

<sup>94</sup> Frans Magnis Suseno, 1977, *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*, Jakarta, STF Driyarkara, hlm. 140.

<sup>95</sup> Abdoerraef, 1971, *Komunisme Dalam Toeri dan Praktek*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 14.

2. Perjuangan kelas.

Dalam sejarah hidup umat manusia, masyarakat terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang tertindas dan ditindas. Kedua kelompok itu selalu bertempur sesamanya, budak melawan tuannya, petani melawan tuan tanah, dan di masa kapitalisme buruh melawan borjuis.<sup>96</sup> Jadi didalam perjalanan sejarah selalu terjadi perjuangan kelas, dan tingkat perjuangan tertinggi akan muncul apabila kaum buruh mampu mengalahkan kaum borjuis.

3. Alat-alat produksi dimiliki bersama.

Menurut Marx, segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup harus dimiliki oleh masyarakat, bukan perseorangan. Dengan demikian maka perjuangan kelas berakhir dan terwujud masyarakat tanpa kelas.

4. Revolusi dengan kekuatan dan kekerasan.

Jikalau komunisme harus didirikan dalam suatu negeri, pemerintah negeri itu harus digulingkan.<sup>97</sup> Penggulingan kekuasaan pemerintah itu dilakukan dengan berbagai macam cara baik legal maupun illegal, parlementer maupun non-parlementer, atau secara damai maupun kekerasan. Sabotase, pembunuhan, dan pemberontakan bersenjata dibenarkan untuk menggantikan pemerintah yang ada dengan pemerintah komunis.<sup>98</sup> Jadi, sukses atau tidaknya perjuangan yang

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>98</sup> *Idem.*

dilancarkan oleh kelas proletar tergantung pada kepandaian mereka menggunakan segala macam bentuk perjuangan.

5. Diktator proletar.

Kelas proletar akan mengambil alih kekuasaan politik dan menghancurkan semua kekuatan yang bersifat kapitalis. Partai komunis menjadi organisasi yang akan mewakili kepentingan kelas proletar dalam upaya pengambilan kekuasaan tersebut hingga tercapai suatu pemerintahan komunis.

6. Ekspansi Komunisme.

Komunisme tidak akan selamat jika tidak didirikan di seluruh dunia, karena negeri-negeri yang bukan komunis selalu berusaha untuk menghancurkannya. Karena itu, kaum komunis tidak bermaksud hendak memulai perang, tetapi mereka akan melakukan segala yang dapat mereka lakukan untuk menggulingkan pemerintah yang menjadi lawan mereka dan untuk mendirikan pemerintah yang dikuasai oleh kaum komunis di seluruh dunia.<sup>99</sup>

7. Uni Soviet dan gerakan Komintern.

Kesuksesan revolusi kaum Bolsjewik pada tahun 1917 menjadikan Uni Soviet sebagai pusat revolusi dunia. Dari Uni Soviet inilah diharapkan revolusi komunis akan menjalar di seluruh penjuru dunia. Dua tahun setelah revolusi Bolsjewik dibentuklah Komintern sebagai organisasi

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

bagi gerakan komunis dunia. Kaum komunis dan gerakan Komintern dengan marxismenya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Merupakan gerakan internasional dan dengan demikian mempunyai jaringan internasional yang dapat saling membantu antar gerakan komunis.
- b. Mempunyai kecenderungan radikal, doktriner dan tidak demokratis. Didalam perjuangannya, kaum komunis menghalalkan semua cara, dengan kekerasan dan menindas golongan yang lain.
- c. Perjuangan kaum komunis ditempuh dengan perjuangan kelas yang terus menerus sampai terbentuk masyarakat tanpa kelas, yaitu masyarakat komunis.
- d. Secara filosofis, kaum komunis tidak mengenal Tuhan atau agama. Bagi mereka, keadaan sosial akan menentukan spirit. Bahkan agama dianggap sebagai candu masyarakat.
- e. Ajaran Marxisme/Komunisme mempunyai daya tarik luar biasa pada kalangan masyarakat atau rakyat yang tertindas/miskin.<sup>100</sup>

### G. Hipotesis

Hipotesis dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Kalau Muso datang ke Indonesia dan berhasil bersekutu dengan Amir Syarifuddin beserta kelompoknya, maka PKI melakukan pemberontakan di Madiun.

Amir Syarifuddin adalah tokoh Partai Sosialis yang pada tanggal 3 Juli 1947 memegang jabatan perdana menteri sekaligus menteri pertahanan menggantikan Perdana Menteri Syahrir. Namun setelah menandatangani persetujuan “Renville” dengan pihak Belanda, ia harus menyerahkan mandat kabinet pada Presiden. Karena kecewa pada pemerintah, ia kemudian mencari dukungan dari kelompok sayap kiri dengan menyatakan bahwa dirinya telah menjadi komunis sejak tahun 1935. Pada tanggal 26 Februari 1948 dibentuk

---

<sup>100</sup> Lembaga Studi Ilmu -ilmu Kemasyarakatan, *op. cit.*, hlm. 4-5.

FDR sebagai front persatuan sayap kiri dan Amir Syarifuddin diangkat menjadi ketuanya. Setelah Muso kembali ke Indonesia PKI menyatakan diri sebagai organisasi yang sah. Amir Syarifuddin mengakui bahwa Muso adalah pemimpinnya. FDR kemudian meleburkan diri kedalam PKI.

2. Kalau PKI berhasil menyusun kekuatan dan melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang pro-pemerintah, maka PKI akan berhasil mendirikan sementara “Soviet Republik Indonesia”.
3. Kalau pemerintah berhasil mengerahkan pasukan TNI bersama-sama Polri dan organisasi-organisasi kelaskaran yang lain, maka pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berhasil ditumpas.

## H. Metode dan Pendekatan Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau langkah-langkah kerja dalam rangka membuat analisis dan sintesis dari bahan yang dikaji.<sup>101</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan skripsi berjudul “*Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948*” meliputi 4 tahap :

#### a. Heuristik

Heuristik adalah proses pengumpulan sumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Kolese St. Ignatius, Perpustakaan Pusat UGM dan Perpustakaan Pusat DIY. Sumber primer yang

---

<sup>101</sup> Program Studi Pendidikan Sejarah, 2003, *Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Sejarah*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, hlm. 38.

digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948* yang ditulis oleh Abdul Haris Nasution, kemudian buku yang berjudul *Perintah Presiden Soekarno : "Rebut Kembali Madiun..."* dan buku yang berjudul *Madiun : Dari Republik ke Republik* yang ditulis oleh Himawan Soetanto. Kedua penulis buku tersebut adalah saksi mata dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku berjudul *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan PKI di Indonesia* yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Sosial. Kedua buku berjudul *Lubang-lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun* yang ditulis oleh Maksum, Agus Sunyoto dan A. Zainuddin. Ketiga buku berjudul *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun* yang ditulis oleh Pinardi. Keempat adalah buku berjudul *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis di Indonesia : Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kelima adalah buku berjudul *Menyingkap Tabir Fakta-fakta Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun* yang ditulis oleh Djamal Marsudi. Selain itu masih ada beberapa buku yang digunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

#### **b. Verifikasi**

Verifikasi adalah kritik sejarah atau keabsahan sumber. Ada dua macam verifikasi, yaitu kritik ekstern atau otentisitas dan kritik intern atau kredibilitas. Kritik ekstern dapat dilihat dari sifat bahan, tinta, gaya penulisan, bahasa maupun jenis huruf yang digunakan. Kritik ekstern didalam melihat keaslian dari sumber

yang digunakan penulis tidak perlu dilakukan karena buku-buku sumber primer ditulis sendiri oleh orang-orang yang mengalami peristiwanya. Dalam buku karangan Himawan Soetanto berjudul *Perintah Presiden Soekarno : "Rebut Kembali Madiun"* yang diterbitkan pada tahun 1994 penulisan nama-nama tokoh dituliskan dengan menggunakan ejaan lama, misalnya saja Moeso. Namun buku *Madiun : Dari Republik ke Republik* yang diterbitkan pada tahun 2006 dituliskan Muso. Ini menunjukkan bahwa penulisan buku sesuai dengan jamannya.

Kritik intern bertujuan untuk menguji apakah isi dari suatu sumber sejarah bisa diterima sebagai kenyataan. Kritik intern bisa dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber yang ada sehingga bisa dilakukan rekonstruksi. Dari sejumlah sumber yang digunakan penulis terdapat pernyataan bahwa pada tanggal 18 September 1948 PKI memproklamasikan berdirinya " Soviet Republik Indonesia" dan melakukan pembunuhan massal. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Namun ada sumber lain yang menyatakan bahwa peristiwa di Madiun merupakan usaha kelompok komunis untuk memperbaiki arah revolusi Indonesia yang dinilai defensif, dan bukanlah suatu pemberontakan. Dengan demikian harus dilakukan koraborasi (pendukungan) terhadap fakta bahwa pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun.

Sebuah unsur primer yang telah disimpulkan dari sebuah dokumen melalui proses kritik ekstern dan intern yang telah dilukiskan hingga sekarang, belum dapat dianggap tegak sebagai fakta sejarah.<sup>102</sup> Para sejarawan memiliki

---

<sup>102</sup> Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm 114.

kesepakatan bahwa yang dapat diterima sebagai fakta sejarah adalah kesaksian dari dua atau lebih saksi yang dapat dipercaya. Terjadinya kesepakatan antara dua saksi disebabkan karena adanya kesaksian dari pihak ketiga mengenai suatu fakta yang sama. Dapat juga terjadi karena kedua saksi tersebut dipengaruhi oleh pihak atau saksi ketiga. Dengan demikian saksi ketiga merupakan koraborasi (pendukungan) terhadap suatu fakta sejarah.

Koraborasi dalam mengungkap kebenaran fakta sejarah sulit untuk dilakukan karena saksi-saksi yang terlibat dalam peristiwanya sudah mati, sehingga tidak mungkin diwawancarai. Koraborasi dilakukan dengan menafsirkan dokumen-dokumen maupun sumber-sumber yang ada. Tidak adanya kontradiksi dalam isi dokumen-dokumen, tidak adanya kontradiksi dengan sumber-sumber lain, tidak adanya anakronisme dapat digunakan sebagai koraborasi. Koraborasi terhadap fakta bahwa pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan di Madiun dilihat dari dokumen-dokumen PKI yang berhasil disita oleh pasukan TNI dalam operasi penumpasan. Dokumen-dokumen itu berisi persiapan-persiapan pemberontakan oleh PKI untuk menggulingkan kabinet Hatta dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis.

### **c. Interpretasi**

Setelah melalui tahap heuristik dan verifikasi, maka tahap selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran data. Interpretasi terdiri dari dua unsur, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan. Kadang-kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan.<sup>103</sup> Sedangkan sintesis berarti menyatukan

---

<sup>103</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 103.

sejumlah data-data sejarah yang saling berkaitan kemudian ditarik satu kerangka konseptual. Setelah melakukan interpretasi penulis bisa menyimpulkan bahwa *Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948* disebabkan oleh kedatangan Muso dari Moskow, dan berhasil bersekutu dengan Amir Syarifuddin beserta kelompoknya yang pada saat itu kecewa dengan kabinet Hatta. Amir Syarifuddin dengan dukungan dari sayap kiri membentuk FDR agar dapat merebut kembali kekuasaan pemerintah, khususnya kedudukan Menteri Pertahanan.

#### **d. Historiografi**

Historiografi adalah suatu proses rekonstruksi masa lampau yang merupakan suatu totalitas yang utuh.<sup>104</sup> Ini merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Aspek kronologis dan sistematis menempati posisi penting dalam historiografi. Penulisan penelitian ini sudah disusun secara kronologis dan sistematis, dimulai dari latar belakang PKI melakukan pemberontakan, bagaimana meletuskan pemberontakan di Madiun dan usaha pemerintah menumpas para pemberontak.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Semua tulisan sejarah yang melibatkan penelitian suatu gejala sejarah dengan jangka waktu yang relatif panjang (aspek diakronis) dan yang melibatkan penelitian aspek ekonomis, masyarakat, atau politik (aspek sinkronis) pastilah memakai juga pendekatan ilmu-ilmu sosial.<sup>105</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional untuk membahas permasalahan yang diteliti dari berbagai sudut pandang. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan peristiwa

---

<sup>104</sup> Sartono Kartodirjo, 1922, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 62.

<sup>105</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm 117.

pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 secara utuh dan jelas. Pendekatan multidimensional dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan historis, politik, ekonomi, sosial, dan militer.

Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui secara kronologis peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Indonesia masih berada dalam masa-masa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan tahun 1945.

Pendekatan politik digunakan untuk mengetahui konflik politik yang terjadi pada tahun 1948, khususnya dalam sistem kepartaian dan pembentukan kabinet. Situasi politik yang diwarnai dengan konflik tidak terlepas dari campur tangan golongan sayap kiri yang berusaha untuk merebut kekuasaan pemerintah.

Pendekatan sosial digunakan untuk melihat bagaimana keadaan masyarakat Indonesia pada tahun 1948 khususnya yang tinggal di Karesidenan Madiun. Kebodohan rakyat yang buta huruf, buta informasi, buta bahasa Indonesia, dan hidup dalam kemiskinan dimanfaatkan oleh kaum komunis untuk mendukung revolusi mereka.<sup>106</sup>

Pendekatan ekonomi digunakan untuk memberikan gambaran tentang situasi perekonomian Indonesia yang pada saat terjadi pemberontakan PKI sedang mengalami krisis ekonomi akibat pengaruh imperialisme Belanda. Dengan meletusnya pemberontakan tersebut maka perekonomian Indonesia semakin terpuruk, karena banyak gedung-gedung vital dan juga pabrik-pabrik sumber keuangan negara dirusak. Para pemberontak juga mengedarkan uang palsu.

---

<sup>106</sup> Maksun, *op. cit.*, hlm. x.

Pendekatan militer digunakan untuk mengetahui aspek militer dari pemberontakan PKI di Madiun, dimana kaum komunis berusaha untuk menyusun kekuatan di tubuh militer. Bahkan ketika Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, dia memanfaatkan Kementerian Pertahanan sebagai basis kekuatan sayap kiri.

### 3. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah model penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teori atau kerangka konseptual.<sup>107</sup>

#### I. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948” ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis, metode dan pendekatan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Menguraikan tentang latar belakang PKI melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Dalam bab ini dijelaskan tiga hal penting yang menjadi latar belakangnya, yaitu situasi politik pemerintahan pusat, kembalinya Muso ke Indonesia setelah sekian

---

<sup>107</sup> Program Studi Pendidikan Sejarah, *op. cit.*, hlm. 38.

lama bermukim di Moskow, dan kondisi di Madiun sehingga PKI menjadikannya tempat pemberontakan. Kondisi di Madiun mencakup kondisi geografi, sosial, ekonomi, kepartaian, dan pemerintahan di Madiun.

Bab III : Menguraikan bagaimana PKI berusaha menyusun kekuatan dalam mendirikan “Soviet Republik Indonesia”. Usaha itu dilakukan dengan jalan parlementer dan non-parlementer. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari persiapan pemberontakan, jalannya pemberontakan, keterlibatan masyarakat dalam pemberontakan, korban pemberontakan, dan dampak pemberontakan.

Bab IV : Menjelaskan bagaimana pemerintah RI mengerahkan Divisi Siliwangi yang pada waktu hijrah sedang berada di Solo bersama-sama dengan Brigade Surakhmad, Polri, laskar Hisbullah, dan Barisan Banteng menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Operasi penumpasan PKI dilakukan dari dua arah, barat dan timur.

Bab V : Berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab II, III, dan IV.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG PEMBERONTAKAN PKI**

#### **DI MADIUN TAHUN 1948**

##### **A. Latar Belakang Politik Pemerintahan Pusat**

###### **1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin**

Setelah Kabinet Syahrir jatuh, maka berdasarkan Maklumat Presiden No. 6 tertanggal 27 Juni 1947 semua kekuasaan pemerintahan diambil alih oleh Presiden. Tiga hari kemudian Presiden menunjuk Amir Syarifuddin, A. K. Gani, Sukiman, dan Setiajid menjadi formatur kabinet koalisi yang baru. Namun keempat orang formatur kabinet tersebut gagal membentuk kabinet koalisi yang bersifat nasional karena Masyumi menuntut 4 kursi, yaitu kursi perdana menteri, menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan menteri dalam negeri. Tanggal 1 Juli 1947 pukul 22.00 para formatur menyerahkan kembali mandat kabinet kepada presiden. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1947 pukul 23.15 Presiden Soekarno menunjuk kembali Amir Syarifuddin, A.K. Gani, dan Setiajid untuk membentuk kabinet nasional. Kali ini Sukiman tidak diikutsertakan sebagai formatur kabinet. Kabinet nasional yang baru harus sudah terbentuk pada tanggal 3 Juli 1947 sebelum pukul 12.00 siang. Tetapi pada kenyataannya kabinet baru yang bercorak nasionalis dengan Amir Syarifuddin sebagai perdana menterinya selesai dibentuk pada pukul 14.15. Kabinet baru tersebut disahkan dengan Maklumat Presiden No. 7 tertanggal 3 Juli 1947. Kabinet ini terdiri dari 2 wakil perdana menteri, 14 kementrian (departemen), 6 menteri negara dan 11 menteri muda. Sedangkan

komposisi partai politik dalam kabinet adalah PNI 7 menteri, Partai Sosialis 7 menteri, PSII 5 menteri, PBI 4 menteri, dan Badan Kongres Pemuda, Parkindo, PKI, PKRI, BTI, masing-masing 1 menteri serta dari tidak berpartai 6 menteri.<sup>108</sup>

Partai Masyumi menolak untuk ikut duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin. Namun PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) yang merupakan anggota dari partai Masyumi mengambil keputusan sendiri untuk ikut dalam kabinet sebagai wakil dari golongan islam. Syahrir yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri tidak ikut duduk dalam kabinet karena pada tanggal 30 Juni 1947 ia diangkat sebagai penasehat presiden. Pada awal pembentukan kabinet, presiden memberikan ketentuan bahwa kabinet harus bercorak nasional, artinya mencakup semua partai politik dan golongan yang ada. Dengan demikian Perdana Menteri Amir Syarifuddin harus *mereshuffle* kabinetnya dan memasukkan partai Masyumi kedalam kabinet.<sup>109</sup> Pada tanggal 11 November 1947, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mereshuffle kabinetnya yang kemudian diumumkan dalam sidang BP-KNIP.<sup>110</sup> Masyumi menempatkan 5 wakilnya dalam kabinet. Jadi, reshuffle kabinet ini semata-mata untuk memenuhi sifat kabinet yang bercorak nasional.<sup>111</sup>

Pihak Belanda masih meneruskan politik pecah belahnya di Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1947 Pemerintah Indonesia menolak ultimatum Belanda tentang pemberhentian permusuhan dari satu pihak saja.<sup>112</sup> Dampak dari penolakan tersebut Pemerintah Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 melancarkan agresi

---

<sup>108</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm 52.

<sup>109</sup> Reshuffle Kabinet artinya pergantian susunan (pergeseran atau perubahan) menteri-menteri dalam kabinet.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 56. Susunan Kabinet Amir Syarifuddin sebelum dan sesudah reshuffle secara lengkap lihat lampiran 1 dan 2 halaman 144-146.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

militernya. Pasukan TNI menggunakan taktik perang gerilya guna menghadapi serangan Belanda tersebut. Sementara itu di luar negeri, wakil-wakil dari India dan Australia dalam PBB mengajukan usul agar persoalan Indonesia dibahas oleh Dewan Keamanan PBB. Usulan tersebut diterima Dewan Keamanan PBB dan selanjutnya memerintahkan kedua belah pihak untuk segera menghentikan pertempuran.

Amerika Serikat mengajukan usul pada Dewan Keamanan PBB agar membentuk komisi jasa-jasa baik untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda secara damai. Usulan tersebut diterima Dewan Keamanan PBB pada tanggal 25 Agustus 1947. Dua hari kemudian Pemerintah Indonesia menerima usul tentang pembentukan KTN (Komisi Tiga Negara) yang memberikan jasa-jasa dalam membantu menyelesaikan persengketaannya dengan Belanda. Pihak Belanda memilih Belgia sebagai anggota KTN, dan pihak Indonesia memilih Australia. Belgia dan Australia kemudian memilih Amerika Serikat sebagai anggota KTN. Tugas KTN adalah mengawasi pelaksanaan penghentian tembakan dan mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda.

Atas usul KTN, pada tanggal 8 Desember 1947 dimulai perundingan di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat "Renville" yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.<sup>113</sup> Perundingan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa politik antara Indonesia dengan Belanda. Kedua belah pihak menyetujui pelaksanaan perundingan di atas kapal "Renville" karena dianggap sebagai tempat yang netral. Delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Amir

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

Syarifuddin, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Ien, M. Muhammad Roem, H. Agus Salim, Mr. Nasrun, dan Ir. Djuanda, serta Mr. Muhammad Natsir sebagai cadangan. Delegasi Belanda terdiri atas Abdulkadir Widjoatmojo, Van Vredenberg, Dr. Soumokil, Pangeran Kertanegara dan Zulkarnaen.<sup>114</sup> KTN hanya bertugas mengawasi jalannya perundingan dan tidak berwenang mengambil keputusan.

Masalah penting dan harus segera diselesaikan adalah garis demarkasi setelah agresi militer Belanda pada bulan Juli 1947. Menurut KTN, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 1 November 1947, garis demarkasi itu adalah garis demarkasi tanggal 4 Agustus 1947 pada saat kedua belah pihak mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak.<sup>115</sup> Pada sidang tanggal 9 Desember 1947 KTN mengusulkan supaya tentara Belanda mengosongkan berbagai daerah yang diduduki dan sebaliknya tentara Indonesia mengosongkan daerah-daerah kantong gerilya yang diduduki. Namun pihak Belanda bersikukuh bahwa garis demarkasi yang harus diakui adalah garis demarkasi “van Mook” yang diumumkan tanggal 27 Agustus 1947.<sup>116</sup>

Pada tanggal 9 Januari 1948 Belanda mengultimatum pemerintah Republik Indonesia agar bersedia memenuhi tuntutan. Apabila pemerintah Republik Indonesia tidak bersedia maka Belanda akan menghentikan perundingan. KTN tidak dapat berbuat banyak, mereka hanya berhasil meminta Belanda menunda

---

<sup>114</sup> Maksun, *op. cit.*, hlm. 3-4.

<sup>115</sup> Himawan Soetanto, 2006, *Madiun dari Republik ke Republik*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka, hlm. 18.

<sup>116</sup> Garis demarkasi “van Mook” adalah garis yang menghubungkan pos-pos militer Belanda terdepan yang mereka anggap sebagai batas wilayah kekuasaannya. Tetapi dalam kenyataannya garis ini merupakan garis demarkasi antara daerah-daerah yang ada dibawah keusaan RI dan Belanda.

batas waktu ultimatum. Batas waktu ultimatum Belanda akan berakhir pada tanggal 15 Januari 1948.<sup>117</sup> Disamping itu, Belanda melancarkan politik gertaknya dengan mengancam akan menyerang Yogyakarta. Dengan demikian pihak Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika menolak tuntutan tersebut, maka kemungkinan besar Belanda akan melancarkan agresi militernya ke Yogyakarta. Tentu saja Indonesia harus melakukan perlawanan gerilya yang akan memakan waktu dan korban yang cukup banyak. Selain itu penolakan Indonesia juga berarti kurang menghargai komisi jasa-jasa baik yang diberikan Dewan Keamanan PBB. Tetapi jika pemerintah Republik Indonesia menerima tuntutan Belanda, maka daerah kekuasaannya akan semakin sempit dan Belanda semakin leluasa di Indonesia.

Akhirnya Pemerintah Republik Indonesia menerima tuntutan Belanda untuk mengakui garis “van Mook” sebagai garis demarkasi. Pada tanggal 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin menandatangani persetujuan tersebut. Salah satu alasan penandatanganan persetujuan ini adalah mementingkan simpati dari dunia internasional, khususnya KTN. Pemerintah Republik Indonesia ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa pihak Indonesia tetap berkeinginan untuk mengutamakan penyelesaian masalah secara damai (berdiplomasi). Persetujuan ini menempatkan Republik Indonesia pada kedudukan yang semakin sulit. Wilayah Republik Indonesia semakin sempit, dikurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Kesulitan itu

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

ditambah lagi dengan blokade ekonomi yang dilaksanakan Belanda secara ketat.<sup>118</sup>

Sehari setelah persetujuan Renville ditandatangani oleh Amir Syarifuddin, PNI memutuskan menolak hasil kesepakatan tersebut. Penolakan itu dinyatakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh dewan partai dan para menteri wakil dari PNI. Bahkan dewan partai menuntut agar kabinet Amir Syarifuddin dibubarkan, karena tidak memenuhi kewajibannya untuk mempertahankan tanah air dan bangsa. Partai Masyumi juga menarik dukungannya terhadap kabinet Amir Syarifuddin. Terbukti pada tanggal 22 Januari 1948 lima orang menteri wakil dari Masyumi menyatakan mengundurkan diri. Mereka adalah Mr. Sjamsudin (wakil perdana menteri I), Mr. Moh. Roem (menteri dalam negeri), K.H. Masjkur (menteri agama), Mr. Kasman Singodimejo (menteri muda kehakiman), dan Anwar Tjokroaminoto (menteri negara).<sup>119</sup> Penolakan Masyumi didasarkan pada sikap Amir Syarifuddin sebagai ketua delegasi Indonesia yang mau menerima tuntutan Belanda. Padahal persetujuan itu hanya menguntungkan pihak Belanda saja. PNI juga ikut menuntut pembubaran kabinet, karena Amir Syarifuddin tidak dapat meneruskan perjuangan bangsa Indonesia menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam negeri.

Pada hari yang sama, kelompok sayap kiri yang diwakili oleh D.N. Aidit, Tan Ling Jie, Luat Siregar, Asmu, dan Sudisman menyatakan bahwa tuntutan PNI tidak memiliki landasan politik. Mereka juga mengecam partai Masyumi sebagai organisasi rakyat yang tidak bertanggung jawab. Namun usaha kelompok sayap

---

<sup>118</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

kiri untuk mempertahankan kabinet Amir Syarifuddin ternyata sia-sia. Sehari kemudian, yaitu tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyatakan mengundurkan diri sebagai perdana menteri. Berdasarkan Maklumat Presiden No. 2 tertanggal 23 Januari 1948 kabinet Amir Syarifuddin dinyatakan bubar.

Presiden Soekarno tidak menyerahkan mandat kabinet pada salah satu partai yang menjatuhkan kabinet Amir Syarifuddin. Tujuannya agar pertikaian dalam tubuh partai-partai politik tidak semakin meruncing. Presiden Soekarno justru menunjuk wakilnya, yaitu Moh Hatta sebagai formatur kabinet. Mulai tanggal 24 Januari 1948 Moh. Hatta menyusun suatu kabinet yang mendapat dukungan dari semua partai. Hatta menawarkan masing-masing 4 kursi pada Masyumi, PNI dan kelompok sayap kiri. Tetapi Amir Syarifuddin sebagai pemimpin sayap kiri menuntut 10 kursi, termasuk kursi menteri pertahanan dan menteri dalam negeri. Moh Hatta menolak permintaan tersebut karena tidak menginginkan kabinetnya didominasi oleh kelompok sayap kiri. Begitu juga Masyumi dan PNI tidak menginginkan kelompok sayap kiri mendominasi dalam kabinet. Tuntutan Amir Syarifuddin kemudian diturunkan menjadi 8 kursi, tetapi Hatta tetap menolaknya dan kemudian menetapkan 1 kursi atau tidak sama sekali kepadanya.

Tanggal 28 Januari 1948 merupakan hari terakhir penyusunan kabinet. Hatta masih memberikan kesempatan kepada kelompok sayap kiri untuk mengajukan calonnya. Pada pukul 23.00, delapan orang utusan sayap kiri menemui Moh Hatta dan tetap mengajukan tuntutan paling sedikit 9 kursi. Moh Hatta sendiri masih tetap pada pendiriannya untuk memberikan 1 kursi atau tidak sama sekali kepada kelompok sayap kiri. Utusan sayap kiri tetap secara gigih berusaha keras

“menggolkan” tuntutan mereka, sehingga mereka harus dikeluarkan dengan agak keras oleh pengawal-pengawal Hatta dari ruangan pertemuan.<sup>120</sup> Akhirnya Moh. Hatta memutuskan untuk tidak mengikutsertakan sayap kiri dalam kabinetnya. Keesokan harinya, yaitu tanggal 29 Januari 1948 kabinet Hatta terbentuk dan disahkan dalam Maklumat Presiden No. 3 Tahun 1948. Dalam komposisi kabinet Hatta ini, terdapat 15 kementerian (departemen) dan satu orang menteri negara. Sedangkan komposisi partai politik dalam kabinet ini ialah Masyumi 4 menteri, PNI 3 menteri dan PKRI, Parkindo, PSI, PGRI masing-masing 1 menteri, serta 4 menteri dari non partai.<sup>121</sup> Adapun program dari kabinet Hatta sangat jelas dan sederhana, yaitu :

1. Menyelenggarakan persetujuan Renville
2. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat
3. Mengadakan rasionalisasi dan rekonstruksi aparatur negara
4. Melaksanakan pembangunan<sup>122</sup>

Sebagai akibat dari penerimaan garis demarkasi “van Mook”, maka pasukan-pasukan TNI yang berada di daerah kantong gerilya harus dihijrahkan.<sup>123</sup> Sekitar 35.000 tentara dari Divisi Siliwangi harus meninggalkan tempat-tempat strategis mereka di Jawa Barat dan masuk ke daerah RI yang masih diakui oleh Belanda. Usaha mereka menjadikan Jawa Barat sebagai benteng pertahanan

<sup>120</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>121</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 63. Susunan kabinet Hatta lihat lampiran 3 halaman 147.

<sup>122</sup> Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno : "Rebut Kembali Madiun..."*, *op. cit.*, hlm. 58. Lihat juga Pinardi, 1967: *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*, Inkopak-Hazera, Jakarta, hlm. 22.

<sup>123</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm 15. Istilah hijrah dipergunakan oleh Pemerintah RI sebagai instruksi pengunduran pasukan NNI dari daerah kantong-kantong gerilyanya di Jawa Barat. Pasukan NNI mempunyai keyakinan bahwa pengunduran tersebut dalam rangka suatu strategi perjuangan, sama halnya dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah dalam rangka memperjuangkan Islam.

terbuang sia-sia. Rakyat setempat juga merasa gelisah dengan ditariknya pasukan TNI dari wilayah mereka.

Semula orang menduga bahwa pekerjaan untuk menghijrahkan tentara beserta keluarganya yang sedemikian besar adalah tidak mungkin.<sup>124</sup> KTN juga tidak yakin bahwa pekerjaan itu akan berhasil, bahkan memprediksikan akan menimbulkan insiden-insiden yang tidak diinginkan. Tetapi kenyataannya pekerjaan tersebut berhasil dilakukan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Pemberangkatan dimulai pada tanggal 2 Februari 1948 dengan melalui darat (dengan kereta api lewat Gombong-Yogya) dan laut (dengan kapal laut) mendarat di Rembang dengan Cirebon sebagai tempat pemberangkatannya.<sup>125</sup> Penghijrahan dimulai tanggal 1 Februari 1948 dengan pemindahan seluruh pasukan Siliwangi dari benteng pertahanannya di Jawa Barat ke sisa daerah kekuasaan RI di Jawa Tengah. Pada tanggal 11 Februari 1948 rombongan pertama dari Divisi Siliwangi tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Sehari kemudian panglima Divisi Siliwangi dan para komandan brigadenya melaporkan diri kepada panglima besar Angkatan Perang. Rombongan hijrah Divisi Siliwangi yang lain segera menyusul, dan pada tanggal 22 Februari 1948 pelaksanaan hijrah berhasil diselesaikan. Namun dengan hijrahnya berpuluh ribu tentara beserta keluarga mereka ke daerah RI yang semakin menyempit itu, ternyata mengakibatkan beban ekonomi yang tidak ringan. Kesulitan-kesulitan ekonomi itu ditambah lagi dengan membanjirnya ratusan ribu penduduk dari daerah pendudukan Belanda yang ingin berlindung

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>125</sup> Disjarahdam VI/Siliwangi, 1979, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, Bandung, Angkasa, hlm. 132.

dibawah pemerintahan RI. Belanda sendiri semakin memperketat blokade ekonominya.

## 2. Pembentukan FDR

Kegagalan kelompok sayap kiri ikut duduk dalam kabinet Hatta mendorong mereka untuk menggalang persatuan front sayap kiri dan melakukan oposisi terhadap pemerintah. Pada suatu rapat umum di Surakarta tanggal 26 Februari 1948, sayap kiri melakukan reorganisasi dan muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat atau biasa dikenal sebagai FDR.<sup>126</sup> FDR diketuai oleh Amir Syarifuddin. Kelompok-kelompok yang menjadi unsur dasar FDR adalah Partai Buruh, Partai Sosialis, Pesindo, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), PKI dan Laskar Rakyat. Pada mulanya mereka menuntut kembalinya Amir Syarifuddin menjadi Menteri Pertahanan, karena kementerian ini telah menjadi perbentengan golongan kiri sejak tahun 1945.<sup>127</sup> Namun tuntutan itu gagal. FDR kemudian menuntut supaya dibentuk kabinet parlementer dan sayap kiri ikut didalamnya.

Dasar perjuangan FDR adalah proses demokrasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan hubungan luar negeri. Salah satu hal yang dikehendaki FDR ialah perubahan politik dalam negeri, mempertahankan tentara, dan mengadakan perubahan di bidang ekonomi. Rencana ekonomi yang baik ialah ekonomi desa atas dasar kooperatif, pengurangan keuntungan dalam perdagangan,

---

<sup>126</sup> George Mc. Turnan Kahin, *op. cit.*, hlm. 327.

<sup>127</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 13.

memperbanyak produksi dan bertindak keras terhadap pasar gelap.<sup>128</sup> Di bidang hubungan luar negeri, FDR menghendaki agar pemerintah RI mengubah politik luar negerinya yang bebas aktif menjadi politik memihak blok anti imperialis dibawah pimpinan Uni Soviet. Tujuan FDR jangka panjang adalah mendominasi kekuasaan pemerintah.<sup>129</sup>

FDR secara bertahap mulai mengadakan kampanye-kampanye untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada tahap pertama diadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan tertutup, dan pertemuan-pertemuan bersama dengan PNI, PSII, Masyumi dan Parkindo. Tahap kedua diadakan pertemuan dengan para pejabat-pejabat pemerintah, polisi, dan tentara. Tahap selanjutnya adalah menghalangi agar agama tidak dijadikan sarana untuk memenangkan kepentingan kelompok tertentu. Aksi-aksi lain yang dilakukan FDR adalah kampanye pers, penyebaran pamflet dan poster, siaran radio dan demonstrasi.

Propaganda kampanye oleh tokoh-tokoh FDR ke seluruh karesidenan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dilaksanakan secara intensif.<sup>130</sup> Sejak tanggal 25 Februari 1948 Amir Syarifuddin, Setiajid, Maruto Darusman, Soemarsono, Tjugito dan Krissbanu mengadakan rapat umum di Madiun, Kediri, Sumberputjung, Jombang, Bodjonegoro, dan tempat-tempat lain disekitarnya. Mulai akhir bulan Mei 1948, FDR mengubah strategi dan meningkatkan opisisinya yang lebih radikal terhadap pemerintah Hatta.<sup>131</sup> Serangan politik semakin ditingkatkan untuk merealisasikan hubungan diplomatik dengan Uni

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>129</sup> George Mc Turnan Kahin, *op. cit.*, hlm. 328.

<sup>130</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik, op. cit.*, hlm. 36.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

Soviet. FDR juga mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Belanda. Sedangkan program FDR untuk melanjutkan perjuangan secara parlementer adalah sebagai berikut :

1. Mempengaruhi BP-KNIP untuk “menggolkan mosi yang isinya menyatakan bahwa program nasional FDR harus dijadikan program pemerintah, oleh karena itu pemerintah yang ada (yaitu pemerintah Hatta) sekarang ini harus dibubarkan dan dibentuk pemerintahan baru yang parlementer.
2. Mempercepat pembentukan Front Nasional, terutama front-front nasional daerah.
3. Front Nasional akan mengadakan kampanye luas untuk membubarkan kabinet yang sekarang.
4. Jika rencana tersebut gagal, akan dilancarkan demonstrasi-demonstrasi luas oleh kaum buruh, tani, prajurit dan golongan-golongan lain yang dapat diajak bergabung dengan mereka. Demonstrasi-demonstrasi luas tersebut harus segera diikuti pemogokan umum, jika perlu dengan tindakan kekerasan.<sup>132</sup>

Jika pemerintah terus menolak tuntutan FDR, maka FDR akan menduduki pos-pos penting dan mengancam akan memutuskan hubungan-hubungan dengan pemerintah melalui pemberontakan maupun dalam bentuk pemerintahan sendiri. Untuk mempersiapkan program tersebut telah digariskan rencana-rencana seperti di bawah ini :

1. Menarik sebagian dari pasukan-pasukan FDR :
  - a. Brigade Martono dan Jadau akan diperintahkan untuk memperkuat operasi-operasi FDR di dalam.
  - b. Jika FDR dipaksa untuk mengirimkan pasukan-pasukan ke front, maka akan dikirimkan pasukan-pasukan yang belum kita percaya betul-betul.
2. Memindahkan pasukan-pasukan ke daerah-daerah yang dianggap strategis dan menarik pasukan-pasukan dari daerah-daerah yang tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi.
  - a. Daerah Madiun akan dipergunakan sebagai basis gerilya yang paling kuat untuk melakukan perjuangan jangka panjang.

---

<sup>132</sup> Pinaridi, *op. cit.*, 33-34.

- b. FDR sedikitnya harus menempatkan 5 batalyon di Madiun, yang harus sudah berada di kota itu dalam bulan Agustus (1948).
  - c. FDR akan membuat kota Solo sebagai “Wild West” untuk mengalihkan perhatian umum ke sana, tetapi kita harus mempunyai pasukan yang terkuat di Solo, agar kekuasaan de facto selalu berada di tangan kita.
  - d. Kedu, Jogjakarta, Pati, Semarang, Bojonegoro, Surabaya dan Kediri akan dijadikan daerah-daerah netral, yang berarti bahwa jika keadaan mengizinkan, FDR akan memperkuat daerah-daerah tersebut atau akan meninggalkannya.
  - e. FDR dapat meninggalkan sepenuhnya daerah-daerah Malang, Banyumas dan Pekalongan.
3. Disamping TNI, mulai sekarang FDR harus mulai membangun Tentara Rakyat dalam arti kata yang seluas-luasnya. Dalam arti umum, kita akan membentuk pasukan-pasukan tersebut secara illegal.
- a. Disetiap desa yang dianggap strategis letaknya, dan dimana pengaruh FDR tertanam, akan ditempatkan sekelompok prajurit yang terdiri dari 60 orang yang dipimpin oleh seorang komandan pasukan.
  - b. Keenam puluh orang itu akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang terdiri dari enam sampai sepuluh orang untuk dikirimkan ke desa-desa.
  - c. Program FDR untuk tahapan kedua ini dapat ditentukan lebih lanjut menurut keadaan. Kita dapat mengatakan lebih dahulu bahwa kita harus merealisasikan Program Nasional, terutama yang berhubungan dengan land-reform, pertahanan rakyat dan perjuangan kaum buruh.<sup>133</sup>

### 3. Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang

Program reorganisasi dan rasionalisasi sesungguhnya sudah direncanakan pada masa kabinet Amir Syarifuddin.<sup>134</sup> Gagasan tersebut awalnya dikemukakan oleh Komodor Suryadarma, Kolonel Simatupang, Kolonel Jatikusumo, dan para perwira Staf Umum 3 Markas Besar Tentara (MBT). Selain itu, salah satu anggota fraksi sayap kiri dalam KNIP bernama Zainul Baharuddin mengajukan mosi agar diadakan rasionalisasi Angkatan Perang. Pada tanggal 20 Desember 1947 mosi

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

<sup>134</sup> Reorganisasi adalah penyusunan kembali organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan APRI sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1948. Sedangkan rasionalisasi adalah penyesuaian kepangkatan di lingkungan APRI disesuaikan dengan kecakapan, pendidikan dan jabatan yang diembannya.

Zainul Baharuddin itu diterima oleh BP-KNIP. Adapun mosi tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Mendesak supaya dengan undang-undang, Angkatan Perang RI direorganisir sedemikian rupa sehingga :
  - a. Terlaksana suatu rasionalisasi dalam kalangan kesatuan-kesatuan Angkatan Perang yang terbentuk dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
  - b. Terlaksana suatu rasionalisasi dalam komando dan pimpinan Angkatan Perang.
  - c. Tercapai suatu disiplin dalam Angkatan Perang yang sewajibnya harus melekat padanya.
2. Mendesak supaya Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam hal :
  - a. Penempatan anggota Angkatan Perang yang tertimpa oleh akibat rasionalisasi tersebut dalam suatu angkatan cadangan.
  - b. Penempatan mereka dalam pelbagai jawatan sipil, perusahaan di lapangan produksi dan didalam masyarakat.
3. Mendesak supaya didalam undang-undang, Pemerintah (Menteri Pertahanan) bertanggung jawab penuh juga tentang :
  - a. Organisasi, administrasi, perlengkapan persenjataan, kualitas seluruh Angkatan Perang
  - b. Politik pertahanan dan siasat militer Angkatan Perang
  - c. Pimpinan Menteri atas Kementerian serta Angkatan Perang sebagai suatu kesatupaduan erat.<sup>135</sup>

Dari mosi tersebut terlihat bahwa Zainul Baharuddin sebagai wakil dari sayap kiri menginginkan bahwa Menteri Pertahanan RI mendapat kekuasaan penuh atas pertahanan negara dan Angkatan Perang. Dengan demikian kedudukan Amir Syarifuddin dan juga kementerian pertahanan sebagai perbentengan sayap kiri akan semakin kuat. Pemerintah kemudian mengesahkan mosi Zainul Baharuddin itu menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 1948. Isi pokoknya berbunyi bahwa Angkatan Perang ditempatkan dibawah kekuasaan Menteri Pertahanan yang juga bertanggung jawab penuh di bidang organisasi, administrasi,

---

<sup>135</sup> Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno : "Rebut Kembali Madiun..."*, op. cit., hlm. 58-59.

perlengkapan persenjataan, kualitas seluruh perang, politik pertahanan dan siasat militer.<sup>136</sup> Namun karena kabinet Amir Syarifuddin jatuh, maka reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang menjadi salah satu program kabinet Hatta.

Keputusan Presiden No. 9 tanggal 27 Februari 1948 menetapkan reorganisasi Angkatan Perang di dalam Kementerian Pertahanan maupun didalam Markas Besar Angkatan Perang.<sup>137</sup> Didalam Kementerian Pertahanan dibentuk Staf Umum APRI sebagai staf pusat pertahanan dan penyusunan angkatan perang secara keseluruhan dan Markas Besar APRI sebagai pucuk pimpinan taktis dan operasional perang kemerdekaan. Kekuatan dan organisasi TNI akan diperkecil dan disederhanakan agar lebih efisien sesuai dengan keadaan RI yang semakin sempit. Negara dan masyarakatnya sudah tidak mungkin lagi harus terus membiayai kurang lebih 350.000 tentara (TNI, TNI Masyarakat, TLRI dan lain-lain) ditambah 470.000 orang (di Jawa saja), Laskar dan Biro Perjuangan.<sup>138</sup>

Reorganisasi Angkatan Perang mengharapkan suatu demobilisasi permulaan membuat keanggotaannya tinggal 160.000 orang. Pada akhirnya diharapkan bahwa ini dapat dikurangi hingga hanya ada 67.000 orang pasukan tetap.<sup>139</sup> Pasukan tetap Angkatan Perang harus terlatih dengan baik dan memiliki persenjataan yang lengkap sehingga siap untuk bergerilya apabila sewaktu-waktu Belanda menyerang kembali. Tentara yang dimobilisasi akan dipekerjakan dalam kegiatan-kegiatan yang kreatif. Pada tahap permulaan demobilisasi itu, sekitar 100.000 orang dari mereka akan dikembalikan ke komunitas-komunitas pedesaan

---

<sup>136</sup> Pinaridi, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>137</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>139</sup> George Mc Turnan Kahin, *op. cit.*, hlm. 331.

untuk mengerjakan pertanian. Selebihnya akan menerima latihan dalam pekerjaan-pekerjaan baru atau rehabilitasi ketrampilan yang pernah mereka miliki.<sup>140</sup>

Penetapan Presiden No. 14 tanggal 14 Mei 1948 lebih menegaskan mengenai pelaksanaan teknis rasionalisasi. Di wilayah RI ditetapkan adanya dua komando wilayah, yaitu Komando Tentara dan Teritorium Jawa dan Komando Tentara dan Teritorium Sumatera.<sup>141</sup> Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 15 Mei 1948. Pulau Jawa yang sebelumnya terdapat tujuh divisi dikurangi menjadi empat divisi. Panglima Besar Sudirman, dalam rangka reorganisasi Angkatan Perang membentuk Kesatuan Reserve Umum (KRU) sebagai kekuatan cadangan yang *fleksible* dan dapat dihadapkan kepada segala kemungkinan ancaman baik dari luar maupun dalam negeri.<sup>142</sup>

Divisi Siliwangi yang baru saja menyelesaikan hijrahnya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah harus melaksanakan keputusan ini. Personil Divisi Siliwangi berjumlah 29.000 orang dengan 9000 senjata. Setelah diberlakukan Re-Ra menjadi 3 brigade tempur bersenjata lengkap dengan satu prajurit, satu senjata. Ketiga brigade itu adalah Brigade 12/Siliwangi dibawah pimpinan Letkol Kusno Utomo berpusat di Yogyakarta, Brigade 13/Siliwangi dibawah pimpinan Letkol Sadikin berpusat di Solo, dan Brigade 14/Siliwangi dipimpin oleh Letkol Eddy Sukardi berpusat di Magelang. Divisi Siliwangi dengan 3 brigadenya ditempatkan dibawah Komando Reserve Umum (KRU-Z) sebagai pasukan

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 332.

<sup>141</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 61.

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

cadangan Angkatan Perang yang hanya dapat diperintah langsung oleh panglima besar Angkatan Perang.

Program Re-Ra APRI merupakan bumerang bagi kelompok sayap kiri. Meskipun mosi Re-Ra APRI diusulkan oleh Zainul Baharuddin sebagai wakil sayap kiri, namun dalam pelaksanaannya telah mempersempit, bahkan mematikan aktivitas FDR. TNI Masyarakat yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin dibubarkan pada tanggal 15 Mei 1948. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1948, Gubernur Militer Daerah Militer Surakarta dibawah pimpinan Wikana dibubarkan.<sup>143</sup>

## **B. Kedatangan Muso dari Moskow**

### **1. PKI sampai dengan kedatangan Muso dari Moskow**

PKI dibentuk pada tanggal 23 Mei 1920.<sup>144</sup> Partai yang bertujuan untuk membentuk masyarakat komunis Indonesia ini diketuai oleh Semaun. Pendukung utama PKI adalah masyarakat kelas buruh dan tani. PKI mampu berkembang pesat melalui VSTP yang sangat militan. Terbukti ketika PKI mengadakan kongres di Semarang pada bulan Agustus 1920, dihadiri oleh 22 serikat buruh. Kemudian pada kongres Istimewa yang berlangsung tanggal 24 Desember 1920 diputuskan bahwa PKI berafiliasi dengan Komintern. Berkat bantuan Sneevliet, Komintern mengizinkan PKI bekerjasama dengan SI, karena itulah satu-satunya jalan agar PKI terlibat dalam percaturan politik Indonesia. Namun kerjasama PKI dan SI tidak berlangsung lama, pada tahun 1921 terjadi perpecahan dalam tubuh SI yang berakibat pada pendisiplinan anggota partai. Setiap anggota SI tidak

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>144</sup> D.N. Aidit, 1960, *Pilihan Tulisan D. N. Aidit*, Jakarta, Yayasan Pembaruan, hlm. 404.

dijinkan menjadi anggota partai lain pada waktu yang bersamaan. Langkah ini bertujuan untuk menyingkirkan anggota-anggota PKI dari tubuh SI.

Keputusan kongres itu sudah barang tentu merupakan pukulan keras terhadap PKI.<sup>145</sup> Semaun yang menjadi pemimpin PKI kemudian melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penangkapan pemerintah kolonial. Pimpinan PKI kemudian dipegang oleh Tan Malaka. Ia berusaha untuk memulihkan kembali hubungan PKI dan SI. Tetapi pemerintah sudah berhasil menangkapnya sebelum hubungan SI dan PKI membaik. Tan Malaka menolak rencana pemerintah kolonial untuk mengasingkan dirinya ke Kupang, ia lebih memilih untuk pergi ke luar negeri. Melihat kekosongan kepemimpinan dalam tubuh PKI, pada tahun 1922 Semaun kembali ke Indonesia. Satu tahun kemudian, Komintern mengirimkan Darsono untuk mendampingi Semaun. Semakin hari pengikut PKI bertambah banyak. Dalam kongres PKI di Kotagede, Yogyakarta pada bulan Desember 1924 tercatat bahwa PKI mempunyai 38 seksi yang meliputi 1.140 anggota.<sup>146</sup>

Dengan alasan untuk memerangi penjajah Belanda, pada tahun 1926 - 1927 PKI melancarkan pemberontakan di beberapa daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra. Tetapi sesungguhnya pemberontakan itu adalah salah satu usaha dari PKI untuk membentuk masyarakat komunis Indonesia. Pemberontakan yang dilancarkan PKI itu seluruhnya bisa ditumpas oleh pemerintah. PKI kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan para pengikutnya ditangkap. Ribuan

---

<sup>145</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, *Bahaya Laten Komunisme di Indoensia jilid I : Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)*, Jakarta, Yayasan Telapak, hlm. 9.

<sup>146</sup> D.N. Aidit, *op. cit.*, hlm. 408.

pengikut PKI yang tertangkap diasingkan ke Boven Digul, Papua (dahulu Irian Jaya). Namun Alimin dan Muso, tokoh PKI dari cabang Jakarta yang ikut memimpin pemberontakan berhasil lolos dari penangkapan pemerintah kolonial dan melarikan diri ke Moskow. Setelah penangkapan tersebut, tidak ada lagi aktivitas komunis di Indonesia.

Bangkitnya fasisme baik di Jerman maupun di Italia menyadarkan Stalin bahwa fasisme lebih berbahaya daripada kapitalisme, terutama menjadi ancaman langsung terhadap Negara Uni Soviet.<sup>147</sup> Komintern kemudian memutuskan bahwa diperlukan kerjasama dengan golongan kapitalis untuk menghancurkan fasisme. Sehingga untuk sementara waktu, permusuhan golongan komunis terhadap kapitalisme harus ditiadakan. Keputusan ini disebut dengan garis Dimitrov. Untuk menjelaskan garis baru ini kepada partai komunis di seluruh dunia, Komintern mengirimkan sejumlah tokoh-tokoh lokal yang berada di Moskow kembali ke Negara masing-masing.<sup>148</sup> Muso yang pada saat itu berada di Moskow dikirim kembali ke Indonesia untuk menjelaskan perubahan itu.

Pada tahun 1935 Muso kembali ke Indonesia dan mendirikan PKI *Illegal*. Namun karena usaha Muso untuk menghidupkan kembali PKI di Indonesia tidak membuahkan hasil, satu tahun kemudian ia memutuskan kembali ke Moskow. Pendidikan kader-kader PKI kemudian dilakukan melalui Gerindo, karena merupakan organisasi yang menganut azas kooperatif dengan pemerintah kolonial dan menentang fasisme.

---

<sup>147</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Pada saat itu PKI sama sekali tidak memiliki ruang gerak di Indonesia, terlebih lagi setelah kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada permulaan pendudukan Jepang, anggota-anggota Central Comite PKI dan kader-kader penting PKI banyak yang ditangkap dan diantaranya mendapat hukuman mati.<sup>149</sup> Sesudah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1945 Moh Yusuf mendirikan kembali PKI dan mencoba melancarkan pemberontakan. Tetapi sekali lagi pemerintah berhasil menumpasnya.

Maklumat Perdana Menteri Moh. Hatta tanggal 3 November 1945, tentang anjuran kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai, maka dunia kepartaian di Indonesia serta merta tumbuh dengan suburnya.<sup>150</sup> Orang-orang komunis kemudian mencoba menghidupkan kembali PKI di Indonesia. Tokoh-tokoh komunis dari luar negeri seperti Sarjono, Setajid, Alimin, dan Maruto Darusman kembali ke Indonesia untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Pada perkembangan selanjutnya mulai terlihatlah aktivitas kaum komunis yang berusaha mendominasi kepemimpinan di dalam tubuh Partai Sosialis, yang pada gilirannya menyebabkan munculnya dua kutub dalam tubuh Partai Sosialis.<sup>151</sup> Salah satu kutub didominasi oleh Sutan Syahrir sedangkan kutub yang lain didominasi oleh Amir Syarifuddin.

Sutan Syahrir kemudian mendirikan partai baru, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI). Tokoh-tokoh cendekiawan Partai Sosialis seperti Sugondo Djoyopuspito, Subadio Sastrosatomo dan para mahasiswa memilih bergabung dengan PSI. Masuknya kalangan terpelajar dalam PSI menyebabkan Amir Syarifuddin kehilangan pendukung. ia kemudian bersekutu dengan kelompok

---

<sup>149</sup> D.N. Aidit, *op. cit.*, hlm. 417.

<sup>150</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>151</sup> Maksum, *op. cit.*, hlm. 2.

sayap kiri. Pandangan politik Amir Syarifuddin bukan lagi bersifat nasionalis, tetapi berorientasi pada ketentuan Moskow. Melalui Amir Syarifuddin inilah PKI mencoba merebut kekuasaan pemerintah. Pada waktu Amir Syarifuddin memegang jabatan perdana menteri merangkap menteri pertahanan, Kementerian Pertahanan dijadikan sarang kekuatan sayap kiri.<sup>152</sup> Ia bahkan membentuk TNI Masyarakat dan melantik para perwira politik (Pepolit) tanpa sepengetahuan Markas Besar Tentara (MBT) untuk menanamkan pengaruh komunis di tubuh Angkatan Bersenjata.

Persetujuan Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin memamatkan aktivitas komunis di kancah pemerintahan pusat. Amir Syarifuddin harus menyerahkan kembali mandat kabinet pada presiden. Moh. Hatta kemudian ditunjuk sebagai perdana menteri menggantikan Amir Syarifuddin. Sesungguhnya Moh. Hatta ingin membentuk kabinet nasional dengan mengikutsertakan seluruh partai politik yang ada, namun karena menginginkan 10 kursi maka sayap kiri sama sekali tidak memiliki wakil dalam kabinet. Moh. Hatta memang tidak menginginkan kabinetnya didominasi oleh kelompok komunis. Untuk memperkuat oposisinya terhadap pemerintah, maka pada tanggal 26 Februari 1948 kelompok komunis membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR terdiri dari PKI, PS, SOBSI, Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Laskar Merah, Laskar Buruh, dan Partai Buruh.

Setelah tersisih dari pemerintahan, kelompok komunis semakin tersingkir dengan adanya program Re-Ra Angkatan Perang. TNI Masyarakat yang dibentuk

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Amir Syarifuddin sebagai benteng pertahanan militer komunis pada tanggal 15 Mei 1948 secara resmi dibubarkan. Dua minggu kemudian Gubernur Militer Daerah Surakarta yang dipegang oleh tokoh komunis, yaitu Wikana diberhentikan dan tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan Pertahanan Daerah Surakarta.

Ketika FDR sedang berusaha keras merebut kembali kekuasaan pemerintah ke tangan kelompok komunis, Muso kembali ke Indonesia setelah sekian lama bermukim di Moskow. Kehadiran Muso mempunyai arti penting bagi kaum komunis Indonesia yang sedang berada dalam konsisi yang kurang menguntungkan. Kedatangannya membawa misi dari Moskow untuk melakukan koreksi terhadap PKI dan revolusi Indonesia yang dinilai defensif. Menurut Muso, PKI seharusnya sudah menjadi partai politik yang legal sesudah kemerdekaan. Partai-partai yang tergabung dalam FDR dilebur menjadi PKI baru yang legal dibawah pimpinan Muso. Pada tanggal 1 September 1948 kepengurusan FDR sepenuhnya diambil alih oleh pimpinan PKI.<sup>153</sup>

## **2. Situasi Internasional yang mengiringi kedatangan Muso dari Moskow**

Perang Dunia II berakhir dengan terbentuknya dua negara super power, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara itu saling memperluas pengaruhnya dan membangun kubu pertahanan masing-masing. Uni Soviet menjadikan negara-negara tetangganya sebagai benteng pertahanan. Satu-persatu negara tetangganya dikuasai oleh partai komunis di negara masing-masing, yaitu

---

<sup>153</sup> Markas Besar ABRI, *op. cit.*, hlm. 84.

Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan terakhir Cekoslovakia.<sup>154</sup> Cina yang juga jatuh ke tangan komunis menjadi tameng Uni Soviet di sebelah timur. Memasuki tahun 1947, pengaruh komunis di Yunani dan Turki semakin kuat.

Amerika Serikat tidak tinggal diam dengan penyebaran komunisme di seluruh dunia. Langkah pembendungan pengaruh komunisme dilakukan dengan mengeluarkan Doktrin Truman dan Marshall Plan. Isi dari Doktrin Truman adalah memberikan bantuan dana kepada Turki dan Yunani sebesar 400 juta dollar. Tujuannya untuk menghancurkan komunisme di kedua negara tersebut dan mengisolasi perluasan pengaruh Uni Soviet. Sedangkan Marshall Plan adalah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat untuk membendung komunisme di negara-negara Eropa Barat yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan finansial. Marshall Plan diwujudkan dengan pemberian bantuan dana pada negara-negara Eropa Barat sebesar 12 milyar dollar. Perang Dingin (Cold War) telah dimulai, dan makin memanas ketika Uni Soviet melakukan blokade atas Berlin Barat yang berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat.<sup>155</sup> Kebijakan Marshall Plan kemudian tidak hanya diberikan pada negara-negara Eropa Barat, tetapi pada seluruh negara-negara di dunia yang mau membasmi komunisme.

Konflik antara Indonesia dengan Belanda yang semakin meruncing memberikan peluang bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memperluas pengaruh mereka di negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Dalam usaha menanamkan pengaruhnya, Amerika Serikat jauh lebih beruntung dibandingkan dengan Uni Soviet. Keterlibatan Amerika Serikat dalam kegiatan-

---

<sup>154</sup> [http://swaramuslim.net/gallery/sejarah/index.php?page=madiun\\_affair](http://swaramuslim.net/gallery/sejarah/index.php?page=madiun_affair), 25 Januari 2008 pukul 10.51.

<sup>155</sup> *Idem.*

kegiatan KTN di Indonesia merupakan jalan mudah baginya. Pihak Uni Soviet tidak mau ketinggalan, yaitu dengan jalan memberikan dukungan terhadap golongan-golongan sayap kiri yang pro-komunis untuk merebut kembali kekuasaan didalam percaturan politik dalam negeri.

Ketika FDR dengan gigihnya mencoba mendongkel pemerintahan Hatta, Uni Sovietpun melancarkan kampanye politik yang cukup berarti bagi perkembangan situasi politik dalam negeri.<sup>156</sup> Tepatnya pada tanggal 26 Mei 1948 Uni Soviet memberikan pengumuman tentang pertukaran konsul antara Republik Indonesia dan Uni Soviet. Radio Moskow pada waktu itu mengumumkan sebagai berikut:

“Sebagai hasil dari perundingan-perundingan yang berlangsung di Praha (Cekoslovakia), maka telah ditandatangani sebuah persetujuan untuk mengadakan hubungan-hubungan konsuler dan saling menukar konsul antara Moskow dan Yogyakarta. Persetujuan yang telah tercapai tersebut telah diratifikasi dengan pertukaran surat-surat antara Duta Besar Uni Soviet di Praha M.A. Silin dan Perutusan Luar Biasa Menteri Berkuasa Penuh Republik Indonesia Dr. Suripno”.<sup>157</sup>

Tindakan Uni Soviet tersebut bisa diartikan sebagai usaha untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat dalam urusan-urusan politik di Indonesia, dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap FDR agar kelompok sayap kiri bisa merebut kembali kursi-kursi dalam kabinet. Kepulangan Muso ke Indonesia setelah lebih dari satu dasawarsa bermukim di Uni Soviet tidak dapat ditafsirkan lain daripada suatu bukti nyata kepentingan mendesak Moskow di Indonesia.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>157</sup> *Idem*

<sup>158</sup> George Mc Turnan Kahin, *op. cit.*, hlm. 344.

Muso membawa instruksi dari Moskow.<sup>159</sup> Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya bulan Februari 1948 diselenggarakan konferensi kaum komunis di Kalkuta. Dalam konferensi tersebut direncanakan pula pemberontakan-pemberontakan komunis di Asia Tenggara. Sesudah konferensi kalkuta itu, meletuslah pemberontakan komunis di Birma dalam bulan Mei 1948, dan di Malaya dalam bulan Juni 1948, sedangkan di Indonesia sendiri pemberontakan komunis meletus di Madiun pada tanggal 18 September 1948.<sup>160</sup>

### 3. Muso

Muso lahir di Desa Pagu, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897. Berperawakan gemuk, agak pendek, dan kekar. ia menempuh pendidikan pada Sekolah Guru model Belanda di Jakarta. Pada masa inilah ia bersahabat dengan Alimin. Muso adalah orang cerdas, organisatoris, naum keras kepala, tegas, dan kadang-kadang nekat. Ia adalah penulis politik yang handal, bahkan dalam setiap ada pertemuan yang membahas soal politik, ia selalu menjadi pembicara.

Ketika belajar menjadi santri, Muso pernah tinggal bersama dengan Soekarno dan Alimin di rumah HOS Cokroaminoto. HOS Cokroaminoto adalah pemimpin SI. Disinilah Muso mengenal SI dan memutuskan untuk bergabung dengan organisasi itu. pada waktu terjadi perpecahan dalam tubuh SI akibat infiltrasi PKI, Muso memilih bergabung dengan komunis. Ia bersama dengan Alimin menjadi anggota PKI cabang Jakarta. Muso dengan giat mengemangkan partainya agar ikut dalam percaturan politik di tingkat nasional. Ia juga sering

---

<sup>159</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 213.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

melakukan perjalanan ke luar kota untuk mencari dukungan dari partai-partai komunis di luar negeri.

Pada tahun 1926, Muso adalah salah satu pencetus pemberontakan komunis di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra. Namun karena pemberontakan itu berhasil digagalkan oleh pemerintah kolonial, ia bersama Alimin melarikan diri ke Moskow untuk meminta bantuan dan perlindungan. Di Moskow inilah mereka mendalami ajaran komunis. Tidak lama kemudian Muso diangkat menjadi salah satu staff Komintern. Pada tahun 1935 Muso dikirim kembali ke Indonesia untuk menjelaskan garis kebijakan komintern yang baru, yaitu garis Dimitrov. tetapi satu tahun kemudian ia kembali ke Moskow.

Menanggapi tindakan Uni Soviet untuk membentuk hubungan konsuler dengan Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia segera memanggil Suripno untuk kembali ke tanah air. Tujuannya adalah mencegah diteruskannya perundingan-perundingan pihak Uni Soviet dan menghentikan segala aktivitas Suripno di Praha. Suripno sesungguhnya adalah aktivis komunis Indonesia yang bergerak di bidang kepemudaan dan mahasiswa. Pada tahun 1947 ia mendirikan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan berhasil mengajak organisasi-organisasi mahasiswa untuk mengadakan kongres di Malang. Kongres tersebut dihadiri oleh Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), Perserikatan Mahasiswa Bogor (PMB), serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam kongres tersebut diputuskan berdirinya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) sebagai wadah baru bagi organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa yang sifatnya lebih universal. Suripno terpilih sebagai ketua PPMI. Dengan fasilitas

dari PPMI inilah Suripno dapat menghadiri konferensi-konferensi penting di luar negeri. Ketika terasa kegentingan di Indonesia sebagai akibat perundingan dengan Belanda, Suripno diutus ke luar negeri untuk mencari perimbangan politik dengan Eropa Timur. Untuk itu Suripno diberi surat kuasa sebagai Duta Istimewa.<sup>161</sup>

Pada tanggal 21 Juni 1948 Suripno berangkat dari Praha menuju ke tanah air untuk memenuhi panggilan pemerintah.<sup>162</sup> Kedatangannya ke tanah air disertai oleh seseorang yang mengaku sebagai sekretaris pribadinya. Dalam perjalanan kembali ke tanah air, Suripno singgah di Kairo. Kepada masyarakat Indonesia yang menjemputnya di Bandara internasional Farouk, Suripno memperkenalkan sekretarisnya yang bernama Soeparto.<sup>163</sup> Selama perjalanan menuju penginapan di Kairo, Soeparto mengucapkan kata-kata yang pedas dan kasar pada Soekarno-Hatta. Akibatnya, terjadi perselisihan antara Soeparto dan penjemputnya. Salah seorang penjemputnya yang bernama M. Zein Hasan merasa heran karena seorang sekretaris berani berbicara kasar di depan pemimpinnya untuk mengecam presiden dan wakil presiden. Perdebatan sengit antara Soeparto dan para penjemputnya terus berlanjut hingga terjadi bentrok fisik dengan Mansur Abu Makarim. Soeparto hampir saja dipukuli oleh para penjemputnya di Kairo karena ia dinilai terlalu berani.

Dari Kairo, Suripno dan Soeparto kemudian singgah di New Delhi. Selama berada di tempat ini, Soeparto yang sesungguhnya adalah Muso tidak terlalu banyak memberikan kecaman terhadap Soekarno-Hatta. Tetapi dia mengecam

---

<sup>161</sup> A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948*, Bandung, Disjarah AD dan Angkasa, hlm. 119.

<sup>162</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>163</sup> Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 40.

persetujuan Renville antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Salah satu anggota staff kedutaan RI di New Delhi yang bernama Aboe Bakar Loebis merasa heran karena Soeparto tidak pernah mau dipotret. Setiap kali kamera dibidikkan kepadanya, Muso menutupi mukanya dengan surat kaar atau majalah, atau memalingkan kepalanya ke arah yang lain.<sup>164</sup>

Masyarakat Indonesia yang berada di Kairo baru mengetahui siapakah Soeparto sesungguhnya setelah ia tiba di Yogyakarta. Begitu juga dengan Aboe Bakar Loebis yang baru mengetahui setelah Soeparto meninggalkan New Delhi menuju ke tanah air. Dr Soedarsono, duta besar RI di New Delhi memberitahukan pada Aboe Bakar Loebis bahwa laki-laki misterius yang bernama Soeparto sesungguhnya adalah Muso, salah satu pimpinan PKI dalam pemberontakan tahun 1926.

Soeripno dan Muso tiba di Bukittinggi pada tanggal 3 Agustus 1948 dengan menumpang pesawat Dakota yang dikemudikan oleh penerang upahan berkebangsaan Amerika Serikat. Dan pada tanggal 11 Agustus 1948 mereka tiba di Yogyakarta dengan menggunakan pesawat amfibi "Catalina" untuk menghindari blokade Belanda. Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 13 Agustus 1948 keduanya menghadap presiden Soekarno. Dalam pertemuan itu presiden meminta agar mereka membantu negara dalam melancarkan Revolusi. Muso menjawab singkat : "Itu memang kewajiban saya." (kemudian dilanjutkan dalam bahasa Belanda) "*Ik kom hier om orde te scheppen.*" (saya datang untuk menertibkan keadaan).<sup>165</sup> Setelah menghadap Presiden Soekarno, Muso dan Suripno langsung memberikan

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>165</sup> Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 71.

ceramah di muka Badan Kongres Pemuda RI. Dalam ceramah itu Muso dan Suripno memuji-muji kebesaran dan kehebatan Uni Soviet.<sup>166</sup> Suripno mengemukakan kesalahan-kesalahan yang timbul dalam revolusi Indonesia disebabkan karena tidak adanya persatuan nasional dibelakang pemerintah serta tindakan kurang tegas dalam berdiplomasi dengan Belanda. Begitu juga dalam pidatonya, Muso mengemukakan beberapa kesalahan revolusi Indonesia. Kesalahan yang pertama adalah tidak adanya perubahan yang radikal dalam revolusi. Menurut teori Friedrich Engels, revolusi tidak akan berhasil jika tidak ada perubahan yang radikal. Kesalahan kedua adalah revolusi Indonesia tidak dipimpin oleh kelas buruh, padahal kelas buruhlah yang paling konsekuen dan revolusioner dalam memerangi imperialisme. Oleh Muso dikemukakan pula bahwa kesalahan pemerintah yang terpenting ialah tampaknya tanda-tanda mereka meninggalkan dasar-dasar proklamasi 1945.<sup>167</sup>

Pada tanggal 15 Agustus 1948, Muso mengadakan rapat raksasa di alun-alun Madiun dengan tujuan utama mengancam kabinet Hatta. Rapat ini dihadiri oleh berpuluh-puluh ribu rakyat di berbagai penjuru karesidenan Madiun.<sup>168</sup> Mereka bersedia mengikuti rapat tersebut karena sebelumnya orang-orang PKI mempropagandakan pada rakyat bahwa di alun-alun Madiun akan diselenggarakan ceramah akbar dengan pembicara Nabi Musa dari Moskow. Pada waktu itu rakyat di karesidenan Madiun yang mayoritas masih buta huruf tidak mengetahui siapa Muso sebenarnya. Karena mayoritas masyarakat masih buta huruf itulah yang memudahkan mereka terpengaruh oleh kata-kata Muso.

---

<sup>166</sup> Maksum, *op. cit.*, hlm. 6-7.

<sup>167</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 123.

<sup>168</sup> Maksum, *op. cit.*, hlm. 6.

Dalam harian Buruh tanggal 16 Agustus 1948 dan Revolusioner tanggal 15 September 1948 Muso mengajukan pendapat-pendapatnya antara lain sebagai berikut. Kelemahan Republik adalah karena terus mempertahankan aparat lama dari pemerintah kolonial, yang seharusnya dihancurkan dan diganti dengan elemen buruh; selama ini kaum tani tidak merasakan buahnya revolusi, maka revolusi agraria harus dijalankan dengan konsekuen; kepada kaum buruh diberikan hak demokratis untuk mengontrol produksi; produksi dan distribusi diperuntukkan bagi rakyat dan bukan untuk segolongan kecil penduduk; tentara harus didemokratisasi dengan cara menempatkan elemen buruh dalam pimpinan tentara; revolusi yang defensif tak mempunyai harapan untuk menang.<sup>169</sup>

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1948 di alun-alun Yogyakarta diadakan rapat umum, dimana Muso mengajukan pikiran-pikirannya kepada rakyat yang berjumlah lebih kurang 50.000 orang.<sup>170</sup> Muso menilai bahwa pemerintah terlalu lemah, sehingga Belanda semakin berani mencekik Republik. Muso juga menganjurkan agar perundingan dengan Belanda harus dihentikan dan pemerintah RI segera menjalin kerjasama dengan Uni Soviet. Akhirnya rapat umum tersebut mengambil resolusi yang kemudian disampaikan kepada pemerintah. Isinya antara lain :

1. Supaya memutuskan perundingan dengan Belanda
2. Menyetujui pertukaran duta dengan Uni Soviet
3. Supaya dibentuk kabinet Front Nasional
4. Bersama-sama dengan rakyat menyusun tenaga berdasarkan atas Front Nasional.

---

<sup>169</sup> Imam Soedjono, 2006, "*Yang Berlawanan*" : *Menyingkap Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Yogyakarta, Resist Book, hlm. 220.

<sup>170</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 128.

5. Memprotes sekeras-kerasnya tindakan Belanda di Jakarta, yang menembaki anak-anak ketika merayakan kemerdekaan tanah airnya.<sup>171</sup>

Selanjutnya Muso melancarkan kecaman terhadap FDR atas berbagai kesalahan politik dan organisasi yang dibuatnya :

1. Para pemimpin FDR tidak menempuh jalan anti imperialis yang konsisten dan konsekuen, oleh karena itu revolusi Indonesia terdorong selalu kepada kedudukan defenssi.
2. Pimpinan revolusi tidak berpegang oleh tangan-tangan kelas buruh.
3. Partai yang berdasarkan Marxisme ada beberapa buah, yaitu PKI, PBI dan Partai Sosialis. Ini memecah kekuatan, karena itu ketiganya harus dipersatukan menjadi satu partai saja, dengan nama PKI.<sup>172</sup>

Kecaman Muso tersebut dikatakan dalam konferensi partai yang berlangsung tanggal 26-27 Agustus 1948. Konferensi partai tersebut melahirkan sebuah resolusi yang kemudian diberi nama “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” atau disebut “Koreksi Besar Muso.” Resolusi tersebut dengan serta-merta diikuti oleh Partai Buruh, yang pada tanggal 27 Agustus 1948 menyatakan meleburkan diri kedalam PKI dan kemudian pada tanggal 29 Agustus 1948 menyusul Partai Sosialis memutuskan untuk meleburkan diri kedalam PKI.<sup>173</sup> Pada tanggal 31 Agustus Muso menyatakan bahwa FDR dibubarkan, sekaligus mengumumkan susunan Politbiro PKI yang baru. Susunan Politbiro PKI tersebut diumumkan pada tanggal 1 September 1948, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Sekretaris Jendral	:	Muso, Maruto Darusman, Tan Ling Jie, Ngadiman
Sekretaris Buruh	:	A. Tjokronegoro, D.N. Aidit, Sutrisno
Sekretaris Pemuda	:	Wikana, Suripno

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>172</sup> Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 74.

<sup>173</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 44.

Sekretaris Pertahanan	:	Amir Syarifuddin
Agitasi Propaganda	:	Lukman, Alimin, Sardjono
Organisasi	:	Sudisman
Urusan Luar Negeri	:	Suripno
Perwakilan	:	Nyoto
Urusan Kader-Kader	:	Dibawah Sekretariat Jendral
Urusan Keuangan	:	Ruskak <sup>174</sup>

Siasat politik yang dikehendaki oleh Muso adalah sebagai berikut :

1. Aparat pemerintah yang tua, aparat kolonial, harus dihancurkan. Ia harus diganti dengan yang baru, yang tersusun dari elemen-elemen buruh. Inilah jaminan, bahwa aturan-aturan demokratis akan dilakukan dengan konsekuen.
2. Hak-hak demokratis diberikan pada kaum buruh. Mereka harus mengemudikan dan mengontrol produksi. Semua langkah harus dilakukan supaya memperbaiki keadaan umum buruh semuanya dengan radikal.
3. Kaum tani harus diberi tanah, apalagi mereka yang tak mempunyainya. Semboyan revolusi ialah : "Tanah untuk mereka yang mengerjakan". Dengan singkat revolusi agraria harus dilakukan dengan konsekuen.
4. Produksi negeri harus selekasnya diperbaiki dibawah pengawasan langsung dari pemerintah. Distribusinya juga harus diatur baik supaya menyenangkan rakyat umum dan lakukannya untuk segolongan kecil dari penduduk.
5. Sistem keuangan harus diatas supaya memenuhi keperluan rakyat jelata, jangan sampai merugikan rakyat. Juga diatur berbagai macam sehingga spekulasi dan kaum catut tidak dapat kesempatan untuk membikin kaya diri sendiri.
6. Kanak-kanak diharuskan bersekolah atas tanggungan pemerintah. Buta huruf diberantas selekas mungkin dengan mengingat bahwa orang-orang yang buta huruf tak dapat menyusun dunia baru yang demokratis.
7. Tentara harus didemokratisir. Pimpinan-pimpinan dan aturan-aturan yang kolot harus dihapuskan dan elemen-elemen buruh harus ditaruh dalam pimpinan. Dengan begitu tentara akan benar-benar menjadi tentara rakyat dan yang bukan menyerobot rakyat.
8. Dan lain-lain<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> *Idem*. Lihat juga : Himawan Soetanto, 2006, *Madiun dari Republik ke Republik : Aspek Militer Pemberontakan PKI di Madiun 1948*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka, hlm. 76.

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

## C. Latar Belakang Kondisi Geografi, Sosial, Ekonomi, Keperintahan, dan Pemerintahan di Madiun

### 1. Latar belakang kondisi geografi di Madiun

Karesidenan Madiun termasuk dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Terletak di persilangan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas daerah Madiun meliputi 6506 kilometer persegi.<sup>176</sup> Di batas timur berdiri Gunung Wilis (2563m); di batas barat Gunung Lawu (3265m); di utara membentang Pegunungan Kendeng; dan di selatan berbatasan dengan laut –Samudra Indonesia– dengan Pacitan sebagai pelabuhan alam.<sup>177</sup> Pada tahun 1948, Madiun yang berpenduduk sekitar dua ratus ribu jiwa merupakan kota terbesar ketiga di wilayah RI setelah Yogyakarta dan Solo.<sup>178</sup>

Karesidenan Madiun terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo. Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo terpengaruh komunis. Sedangkan Kabupaten Magetan dijadikan tempat pembantaian oleh orang-orang PKI, sumur-sumur pembantaian tersebar di beberapa tempat.

Kota ini berkembang menjadi pusat komunikasi yang utama karena dilalui jalan trans Jawa dan jalan kereta api yang menghubungkan Surabaya dan Jawa Barat. Daerah ini dipilih PKI sebagai pusat pemberontakan karena letaknya yang

---

<sup>176</sup> Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno : “Rebut Kembali Madiun...”*, op. cit., hlm. 139.

<sup>177</sup> Hersri Setiawan, 2002, *Negara Madiun? : Kesaksian Sumarsono Pelaku Perjuangan*, FusPAD, hlm. 183.

<sup>178</sup> David Charles Anderson, 2003, *Peristiwa Madiun 1948 : Kudeta atau Konflik Internal Tentara?*, Yogyakarta, Media Pressindo, hlm. 49.

sangat strategis. Selain merupakan jalur persimpangan kereta api, di Madiun terdapat beberapa kompleks pegunungan yang merupakan tempat ideal untuk basis-basis gerilya. Disamping itu, hutan-hutan di Madiun pada waktu itu masih sangat lebat merupakan tempat yang cocok bagi PKI untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Terbukti ketika pasukan TNI berhasil menduduki kembali Madiun setelah terjadinya pemberontakan, maka pasukan-pasukan PKI melarikan diri ke hutan-hutan dan pegunungan.

## 2. Latar belakang sosial di Madiun

Masyarakat di Karesidenan Madiun mayoritas hidup dalam kemiskinan, masih buta huruf, buta informasi, dan tidak memahami Bahasa Indonesia dengan baik dimanfaatkan oleh PKI untuk menanamkan pengaruh komunis, sehingga nantinya mereka mau mendukung pemberontakan. Pada tahun 1946 Pesindo mendirikan *Marx House* sebagai pusat pendidikan kader komunis. Pesindo juga memindahkan markasnya ke Madiun. Dengan demikian Madiun adalah basis komunis. Selain terdapat kader-kader komunis, ada pula orang-orang yang disebut *PKI taklukan*. Mereka adalah masyarakat yang umumnya masih miskin dan bodoh, yang bersedia mendukung aksi-aksi komunis karena diancam atau dijanjikan kemakmuran. Dukungan terhadap PKI berasal dari petani-petani di sekitar perkebunan, buruh perkebunan, buruh pabrik, buruh kereta api, dan beberapa pamong praja yang menjadi PKI taklukan.

### 3. Latar belakang ekonomi di Madiun

Secara ekonomi, di Madiun terdapat pabrik-pabrik gula antara lain Pagotan, Rejoagung, dan Kanigoro. Terdapat juga perkebunan teh di Jamus dan Dungus, Kopi di Kandangan, dan tembakau di Pilangkenceng. Dengan adanya perkebunan dan pabrik-pabrik pastilah di daerah ini terdapat banyak buruh yang merupakan kekuatan penopang bagi pemberontakan komunis. Tetapi dari sektor pertanian, Madiun adalah daerah yang minus produksi beras. Akibatnya di daerah ini sering terjadi protes dari para petani untuk mengubah tanah perkebunan menjadi lahan pertanian. Selain itu, di Madiun terdapat fasilitas-fasilitas umum seperti bank-bank, gudang-gudang makanan, serta sarana perhubungan dan transportasi. Dengan demikian Madiun memenuhi persyaratan untuk dijadikan pusat pemerintahan komunis.

### 4. Latar belakang kepartaian di Madiun

Memasuki tahun 1948, pengaruh politis PKI di Madiun mulai terdesak oleh PNI dan Masyumi. Akibatnya, posisi PKI di Madiun menjadi tidak stabil. Sejak tahun 1946 Masyumi memang mempergiat aktivitas-aktivitasnya di Madiun dengan dukungan dari pesantren-pesantren. Sedangkan PNI pada tahun 1947 semakin berkembang dengan adanya kongres-kongres Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) di Ponorogo. Selain itu sebagian dari Sarekat Rakyat (SR) memisahkan diri untuk bergabung dengan golongan komunis Tan Malaka.<sup>179</sup>

---

<sup>179</sup> Onghokham, *op. cit.*, hlm. 163.

Pada bulan September 1948, kekuatan pendukung PKI di Madiun dan yang mendukung pemerintah hampir sama. Akan tetapi bila ditinjau dari sudut persenjataan, Pesindo adalah Laskar yang paling kuat. Hubungan PKI dengan Polisi terjalin dengan baik, namun dengan TNI tidak ada sama sekali. Ini disebabkan karena perwira-perwira tinggi TNI berasal dari golongan sosial atas, sehingga tidak mudah bagi PKI untuk mempengaruhinya.

##### **5. Latar belakang pemerintahan di Madiun**

Kondisi pemerintahan di Madiun sesudah kemerdekaan memang sangat memungkinkan bagi PKI untuk mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Kemiskinan sejak zaman penjajahan Belanda, ditambah lagi pada zaman pendudukan Jepang telah menimbulkan kekecewaan rakyat pada para elit birokrat setempat yang dipegang oleh kalangan priyayi. Situasi ini menimbulkan perlawanan rakyat untuk mengganti para pejabat pamong praja, bupati, dan polisi yang berhubungan dekat dengan Belanda. Mereka telah menindas rakyat dengan melaksanakan perintah-perintah Jepang secara keras. Namun permintaan rakyat unruk mengganti pejabat lama tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, dengan alasan bahwa pemerintah tidak memiliki tenaga yang cukup ahli atau berpendidikan tinggi untuk menggantikan mereka. Sehingga rakyat mulai tidak percaya pada pemerintah dan mudah terpengaruh oleh PKI.

### BAB III

#### PROSES MELETUSNYA PEMBERONTAKAN PKI

##### DI MADIUN TAHUN 1948

###### A. Persiapan Pemberontakan

Sejak proklamasi kemerdekaan RI, PKI sesungguhnya telah menghimpun kekuatan untuk merebut kekuasaan pemerintah. Perebutan kekuasaan di daerah-daerah seperti Peristiwa Serang (1945), Peristiwa Tangerang (1945), Peristiwa Tiga Daerah (1945), Peristiwa Cirebon (1946), merupakan rangkaian usaha orang-orang komunis membentuk kekuatan.<sup>180</sup> Meskipun dalam usahanya selalu gagal, namun orang-orang PKI tidak pernah berhenti menyusun kekuatan baik secara politis, ideologis, dan militer/kekuatan bersenjata. Mereka juga berambisi untuk menguasai Angkatan Perang RI, yaitu dengan membentuk TNI-Masyarakat dan memasukkan anggota-anggota Pepolit (Perwira Politik yang sudah terpengaruh paham komunis) ke batalyon-batalyon di Solo dan Purwodadi.

Pesindo sebagai organisasi kelaskaran berhaluan komunis pada bulan Mei 1946 mendirikan lembaga pendidikan ideologi dan kader yang bernama *Marx House*. Pendidikan ideologi angkatan pertama diadakan pada bulan Juni 1946, yang diikuti oleh 136 pemuda selama 2 bulan.<sup>181</sup> Pemuda-pemudayang sudah selesai menempuh pendidikan ideologi dan kader kemudian disebarkan ke seluruh pelosok tanah air untuk menyebarkan ajaran komunisme.

---

<sup>180</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia jilid I : Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)*, *op. cit.*, hlm. 108.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

Salah satu keputusan Sidang Kabinet tanggal 1 Agustus 1947 adalah menunjuk Wikana, salah seorang pemimpin Pesindo sebagai Gubernur Militer Daerah Surakarta. Wikana dilantik pada tanggal 22 Agustus 1947 oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Sesuai dengan program FDR yang ke 2, Solo akan dijadikan daerah pertempuran terbuka (*Wild West*). Tujuannya agar perhatian pemerintah dan juga masyarakat luas terfokus di Solo. Selain itu supaya Ibukota RI di Yogyakarta terpisah dengan wilayah Indonesia bagian timur, sehingga PKI bisa merebut kekuasaan di Madiun. Sejak saat itu aktivitas PKI meningkat di Surakarta. Berbagai macam pasukan berafiliasi dengan PKI dimasukkan ke Kota Solo.<sup>182</sup> Alimin, salah satu tokoh PKI dalam pemberontakan tahun 1926 ditempatkan di Solo sebagai penasehat sekaligus pendamping Wikana.

Daerah-daerah yang akan dijadikan basis gerilya PKI dikondisikan menjadi wilayah komunis. Secara intensif rakyat *dicekoki* dengan ajaran revolusi komunis dan situasi pertentangan kelas, seperti menentang pamongpraja dan pemerintahan yang sah.<sup>183</sup> Sebelum melancarkan pemberontakan, PKI memang sudah memiliki persiapan yang cukup kuat, baik organisasi maupun keuangannya. PKI mampu membeli persenjataan dalam jumlah besar dan disebar di berbagai daerah yang diduduki kaum komunis. PKI semakin kuat dengan kembalinya tokoh-tokoh komunis seperti Setiajid, Sardjono, Mulawadi, dan Maruto Darusman dari luar negeri. Secara organisasi dapat dikatakan bahwa struktur PKI sudah

---

<sup>182</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, *Bahaya Laten Komunisme di Indoensia jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)*, Jakarta, Yayasan Telapak, hlm. 6. Berafiliasi berarti mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang.

<sup>183</sup> *Idem*.

sangat maju dan tersusun rapi dari tingkat pusat hingga kedaerah-daerah sehingga bisa dikendalikan secara efektif.

Secara militer, PKI telah menempatkan pasukan-pasukannya di Madiun, beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Brigade 7 TLRI dibawah pimpinan A. Jadau ditempatkan Solo. Brigade 8 dibawah pimpinan Iskandar (Laskar Rakyat) dan Brigade 9 TLRI yang dipimpin Soejoto ditempatkan di Purwodadi. Batalyon Kuncoro, Batalyon Yusmin dan Batalyon Martono juga ditempatkan di Purwodadi untuk memperkuat pasukan. Batalyon Soedigdo di Wonogiri, Batalyon Purnawi di Demak, Batalyon Sutarno di Kudus, dan Batalyon Rochadi di Pati. Kekuatan PKI di Madiun terdiri dari :

Batalyon Mursid di Saradan,  
Batalyon Panjang di Ponorogo,  
Batalyon Musyofa di Madiun,  
Batalyon Durachman di Madiun,  
Batalyon Darmintoaji di Ngawi.<sup>184</sup>

Di Jawa Timur, PKI menempatkan Brigade XXIX yang dipimpin oleh Letkol Dahlan dan pasukan TLRI dibawah pimpinan Laksamana Muda Atmaji di Tulungagung. Brigade XXIX yang sepenuhnya telah dipengaruhi komunis dan memberikan dukungan kepada PKI antara lain pasukan-pasukan dari Pesindo yaitu :

1. Batalyon Maladi Yusuf berkedudukan di Mojoroto, dengan kekuatan 4 kompi:
  - a. Kompi Salamun
  - b. Kompi Keri Jusuf
  - c. Kompi Suroso
  - d. Kompi Mustofa

---

<sup>184</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indoensia jilid II : Penumpasan Pemerontakan PKI (1948)*, *op. cit.*, hlm. 22.

2. Batalyon Decking Staf Brigade XXIX (Kompi Kawal) dengan komandannya Kapten Sukri di Kediri.
3. Batalyon Sidik Arselan di Blitar, kemudian dipindahkan ke Nganjuk.
4. Pasukan TLRI di bawah pimpinan Munadji di Nganjuk.
5. Detasemen Subardi dari Pesindo yang semula dikenal dengan sebutan P. 10 (Pembelaan 10).<sup>185</sup>

## **B. Jalannya Pemberontakan**

### **1. Pertempuran di Kota Solo**

Pada bulan Maret 1948 Brigade 13/Siliwangi tiba di kota Solo dengan kekuatan 4 batalyon organik. Keempat batalyon itu ditempatkan tersebar di luar kota Solo. Batalyon 1 “Sunan Gunung Djati” di bawah pimpinan Mayor Rukman ditempatkan di pabrik gula Tasikmadu. Batalyon 2 “Taruma Negara” di bawah pimpinan Sentot Iskandardinata ditempatkan di Delanggu. Batalyon 3 “Prabu Kian Santang” di bawah pimpinan Mayor Sambas Atmadinata ditempatkan di Sragen. Dan yang terakhir batalyon 4 “Taji Malela” di bawah pimpinan Mayor Umar Wirahadikusumah ditempatkan di pabrik gula Colomadu.

Tidak mudah bagi pasukan Siliwangi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat setempat. Mereka dimusuhi oleh rakyat, tidak memiliki asrama, keluarganya terlantar, dan mengalami kesulitan ekonomi. Kaum komunis telah berhasil menghasut rakyat dengan mengatakan bahwa pasukan Siliwangi adalah tukang pukul Hatta yang telah mengkhianati perjuangan bangsa. Inisial Siliwangi, SLW dikatakan sebagai “*Stoot Leger Wilhelmina*” atau pasukan penggempur Wilhelmina yang kelak akan membantu Belanda melancarkan agresinya. Selain itu, tentara Panembahan Senopati yang merupakan pasukan Solo

---

<sup>185</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

menyebut tentara Siliwangi sebagai “Tentara Pendudukan Asing” atau “Pasukan Tamu”, meskipun mereka adalah sesama pasukan TNI.

Konflik militer dan politik dalam negeri antara pemerintah dan kelompok sayap kiri semakin hari kian meruncing dan mengarah pada pertentangan bersenjata. PKI mengawali gerakannya di kota Solo dengan melakukan hasutan, penculikan, pembunuhan, pemogokan buruh, insiden bersenjata, dan adu domba.<sup>186</sup> Dipilihnya Solo sebagai pusat aksi PKI karena ditempat inilah hidup berbagai aliran politik yang saling bertentangan. Pemilihan ini juga didasarkan pada pidato Amir Syarifuddin ketika melantik Wikana sebagai Gubernur Militer Surakarta. Dalam pidato Amir Syarifuddin menyatakan “*Van Solo uit begint de victorie*” (dari Solo kemenangan akan dicapai). Disini juga terdapat bermacam-macam pasukan seperti Brigade “Panembahan-Senopati”, Brigade Yadau dan Suyoto dari TLRI, Brigade Ex-Biro perjuangan; Pesindo, Barisan Banteng, dan Hisbullah yang kuat; Brigade II/Siliwangi (dengan pasukan-pasukan di luar kota : Batalyon-batalyon Slamet, Rukman, Sambas dan Umar); Tentara Pelajar dari Mayor Akhmadi dan lain-lainnya.<sup>187</sup>

Pada tanggal 2 Juli 1948 Kolonel Soetarto yang menjabat sebagai panglima KPPS ditembak mati oleh orang tak dikenal di depan rumahnya. Soetarto adalah anak buah Alimin, namun ia tidak mau melakukan Re-Ra Angkatan Perang RI dan menolak ajakan PKI untuk memberontak. Menurut Soetarto, terlalu dini jika PKI melakukan pemberontakan. Karena menolak ajakan itulah Soetarto dibunuh oleh orang suruhan PKI yang bernama Pirono. Kolonel Soetarto kemudian

---

<sup>186</sup> Tuk Setyohadi, 2002, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta, CV. Rajawali Corporation, hlm. 75-76.

<sup>187</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 217.

digantikan oleh Letkol Suadi. Pembunuhan yang didalangi oleh PKI ini merupakan awal dari bentrokan bersenjata di kota Solo. Pada bulan Agustus 1948 susunan tempur (*order of battle*) satuan-satuan yang saling berhadapan di Solo adalah sebagai berikut :

- a. Pasukan-pasukan yang pro Pemerintah RI terdiri dari :
  - 1) Brigade II/Siliwangi (KRU) dengan kekuatan 4 batalyon
  - 2) Batalyon Pelajar
  - 3) Hisbullah dan Barisan Banteng
  - 4) Brigade Mobil (Polisi)
- b. Pasukan-pasukan yang anti ReRa dan Pro PKI, meliputi :
  - 1) Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS)
  - 2) Brigade V / KPPS dengan kekuatan 4 batalyon
  - 3) Brigade VII / KPPS Ex TLRI
  - 4) Laskar-laskar Pesindo
  - 5) Mantan pasukan-pasukan TNI Masyarakat.<sup>188</sup>

Bentrokan bersenjata yang serius antara pasukan Siliwangi dan pasukan KPPS pecah pada tanggal 20 Agustus 1948.<sup>189</sup> Peristiwa ini diawali dengan pengepungan batalyon Rukman di Tasikmadu oleh lebih kurang 4 batalyon pasukan Solo. Diduga 4 batalyon pasukan Solo tersebut sudah termakan oleh hasutan-hasutan kelompok sayap kiri. Pada tanggal 23 Agustus 1948 dapat diidentifikasi pelaku pengepungan terhadap Batalyon Rukman. Mereka adalah pasukan TLRI pimpinan Yadau dan Tentara Pelajar liar yang menggabungkan diri dalam pasukan ALRI “Gajah Mada”. Setelah beberapa hari dikepung, penyerbuan terhadap batalyon Rukman terjadi pada tanggal 24 Agustus 1948. Namun penyerbuan tersebut dapat dipukul mundur oleh pasukan batalyon Rukman dan memakan korban 7 orang dari pasukan penyerang. Pada hari yang sama juga terjadi penyerbuan di Rumah Penjara Sragen oleh segerombolan orang tak

---

<sup>188</sup> Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno : “Rebut Kembali Madiun...”* op. cit., hlm. 124-125.

<sup>189</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Ppublik ke Republik*, op. cit., hlm. 106.

dikenal. Penyerbuan tersebut berhasil membebaskan Letkol Anwar, Letkol Gunarjo, dan 14 orang tawanan Tentara Pelajar ketika melakukan pembersihan di Solo tanggal 27 Maret 1948.

Memasuki bulan September, situasi di Solo semakin memanas dengan aksi saling culik-menculik antara pasukan PKI dan pasukan Siliwangi. Pada tanggal 1 September 1948 terjadilah penculikan atas diri dua anggota pengurus FDR Solo, yaitu Slamet Wijaya dan Parjiyo.<sup>190</sup> Peristiwa itu kemudian disusul dengan penculikan lima orang perwira TNI, yaitu Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Supardi, Kapten Sutadi, dan Kapten Mudjono. Pada tanggal 8 September 1948 hilang pula Letkol Suharman dari TNI Bagian masyarakat.<sup>191</sup> Kemudian pada tanggal 9 September 1948 terjadi penggerebekan markas besar Pesindo oleh sekelompok pasukan tak dikenal. Dari penggerebekan itu sejumlah dokumen penting milik Pesindo hilang dan beberapa orang diculik.

Peristiwa selanjutnya adalah penculikan Dr. Muwardi, seorang tokoh Barisan Banteng, PNI, dan GRR pada tanggal 13 September 1948.<sup>192</sup> Dr. Muwardi diculik pada pagi hari oleh empat orang pemuda yang menyusulnya ke rumah sakit. Ketika itu Dr. Muwardi hendak melakukan operasi. Keempat orang pemuda tersebut meminta pertolongan karena diluar ada orang yang terluka

---

<sup>190</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 66.

<sup>191</sup> A. H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 218.

<sup>192</sup> GRR adalah singkatan dari Gerakan Revolusi Rakyat, dibentuk pada tanggal 6 Juni 1948 sebagai sebuah federasi partai-partai politik dan ormas-ormas bersenjata maupun tidak yang berorientasi ke garis politik Tan Malaka. GRR menginginkan agar semua perundingan dengan Belanda dibatalkan dan mengambil kebijakan netral dalam Perang Dingin. Adapun partai yang tergabung dalam GRR adalah Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata, Angkatan Komunis Muda (ACOMA), Partai Wanita Rakyat, Persatuan Invaliden Indonesia, Laskar Rakyat Jakarta Raya, dan Barisan Banteng. Lihat Pinardi, 1967 : *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*. Inkopak-Hazera, Jakarta, hlm. 56, dan Kahin, George Mc.Turnan, 1995 : *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terjemahan, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 337.

parah. Tetapi sesampai di luar, ia ditodong dan dipaksa masuk mobil, kemudian dilarikan entah kemana.<sup>193</sup> Pada siang harinya Kompi Oking, Kompi Pengawal Brigade II/Siliwangi diserang di asrama Srumbatan oleh pasukan KPPS dengan kekuatan lebih dari satu batalyon.<sup>194</sup> Tiga hari sebelumnya KPPS memang sudah memberikan ultimatum agar para perwira KPPS dari Brigade TLRI yang diculik segera dibebaskan dalam keadaan hidup. Penyerangan ini didasarkan pada tuduhan KPPS bahwa perwira-perwira mereka yang diculik ditawan di asrama kompi pengawal Brigade II/Siliwangi dibawah pimpinan Kapten Oking di Srumbatan. Investigasi yang dilakukan oleh Markas Brigade membenarkan bahwa penculikan ini dilakukan oleh satuan-satuan Siliwangi.<sup>195</sup> Terjadilah pertempuran antara pasukan penyerbu KPPS dan pasukan Kompi Oking di Srumbatan. Pasukan Kompi Oking kemudian meminta bantuan dari Batalyon “Taruma Negara” dan Kompi Pengawal Staf Divisi dibawah pimpinan Kapten Komir. Setelah terjadi pertempuran beberapa saat, pasukan Kompi Oking berhasil memukul mundur pasukan KPPS.

Hari itu juga Panglima Besar Sudirman memerintahkan agar kedua belah pihak yang saling bertempur mengadakan gencatan senjata.<sup>196</sup> Perintah ini ditaati oleh kedua belah pihak. Namun gencatan senjata tidak bisa bertahan lama. Sehari kemudian pasukan Divisi Siliwangi yang berada di luar kota Solo diperintahkan memasuki kota Solo untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban. Akhirnya pertempuran meletus lagi pada tanggal 15 September 1948 pukul 18.00 antara

---

<sup>193</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 222.

<sup>194</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 112.

<sup>195</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>196</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 68.

pasukan-pasukan Panembahan Senopati dan pasukan-pasukan dari Divisi Siliwangi yang memasuki kota Solo.”<sup>197</sup> Keesokan harinya, pertempuran semakin seru karena pasukan-pasukan dari Barisan Banteng menyerbu ke Markas Besar Pesindo. Kedua belah pihak yang bertempur itu saling mendatangkan bala bantuan untuk memperkuat posisi mereka masing-masing.<sup>198</sup> Pasukan TLRI yang berada di sepanjang garis demarkasi “van Mook” ditarik untuk membantu pasukan Pesindo. Sedangkan Barisan Banteng mendapat bantuan dari Divisi Siliwangi. Namun kedatangan Pasukan TLRI yang dipimpin oleh Yadau terlambat tiba di Solo, karena pasukan Pesindo sudah terusir ke luar kota. Akhirnya pasukan TLRI terlibat dalam pertempuran dengan bala bantuan pasukan Siliwangi yang didatangkan dari Yogyakarta.

Sementara itu, di Yogyakarta diadakan rapat antara Panglima Besar Jenderal Sudirman, Wakil Panglima Besar Kolonel A.H. Nasution dan Komandan CPM Jawa Kolonel Gatot Subroto. Di dalam rapat itu diputuskan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pertikaian di Solo adalah menempatkan seorang pimpinan yang tegas disana.<sup>199</sup> Kemudian ada malam harinya sekitar pukul 23.00 mereka bertiga menemui presiden untuk menyampaikan hasil rapat tersebut. Presiden menyetujuinya, asalkan kabinet menyetujuinya pula nanti. Maka diumumkanlah oleh pemerintah, bahwa daerah Solo berada dalam keadaan bahaya dan Kolonel Gatot Subroto diangkat sebagai Gubernur Militer daerah tersebut.<sup>200</sup>

---

<sup>197</sup> *Idem.*

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>199</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 117.

<sup>200</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 233.

Kolonel Gatot Subroto tiba di Solo pada tanggal 18 September 1948.<sup>201</sup> Ia segera mengeluarkan instruksi kepada seluruh kesatuan bersenjata di Solo untuk menghentikan tembak-menembak selambat-lambatnya tanggal 20 September 1948 pukul 24.00. Semua komandan pasukan yang saling bermusuhan harus melaporkan diri pada Gubernur Militer keesokan harinya. Apabila ada komandan yang tidak mengindahkan instruksi tersebut akan dianggap sebagai pemberontak dan ditindak sekeras-kerasnya oleh pemerintah.

Pada tanggal 18 September 1948, Presiden Soekarno juga mengucapkan pidato radio dari Yogya yang ditujukan kepada rakyat, khususnya rakyat daerah Solo.<sup>202</sup> Presiden menerangkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan keras untuk menyelesaikan pertikaian di Solo. Rakyat daerah Solo diminta supaya mematuhi instruksi-instruksi dan memberikan bantuan sepenuhnya pada Gubernur Militer di Solo. Presiden juga mengingatkan pada setiap warga negara agar tidak memperkeruh suasana dan mudah terpengaruh oleh anasir-anasir yang membawa perpecahan antar rakyat.

Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika berkunjung ke Solo untuk menyelesaikan pertikaian antara Pasukan Siliwangi dengan pasukan Panembahan Senopati menegaskan :

“ Bahwa pertikaian yang terjadi sebelumnya, tidak ada pihak yang salah, karena pertikaian yang terjadi sengaja dibuat oleh pihak PKI yang menginfiltrasikan ideologinya ke dalam tubuh TNI. Akan tetapi akhirnya pengacau-pengacau tersebut dapat dibersihkan.”<sup>203</sup>

---

<sup>201</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 118.

<sup>202</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 234.

<sup>203</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 120.

Dengan demikian maka usaha PKI untuk mengalihkan perhatian pemerintah dengan menciptakan kekacauan di Solo tidak berhasil. Namun bukan berarti usaha PKI untuk merebut kekuasaan pemerintah berakhir sampai disini. Kekacauan di Solo tersebut disusul dengan peristiwa perebutan kekuasaan yang dijalankan di Madiun oleh orang-orang anggota PKI.<sup>204</sup>

## 2. Pecahnya Pemberontakan PKI di Madiun

Ketika terjadi pertempuran di Solo antara pasukan-pasukan yang pro PKI dan pasukan-pasukan Siliwangi, ternyata PKI juga sedang melakukan konsentrasi pasukan yang pro PKI di Madiun dan sekitarnya. Semenjak tanggal 12 September 1948, dengan cara yang teratur sekali, ternyata mereka telah merebut kekuasaan di desa-desa yang terletak di sekitar Madiun.<sup>205</sup> Perebutan kekuasaan atas seluruh Madiun selesai pada tanggal 18 September 1948, bertepatan dengan kekalahan pasukan-pasukan PKI di Solo. Dan dari Madiun pulalah PKI merencanakan untuk menguasai seluruh wilayah RI.

Dengan kekalahan pasukan militer PKI di Solo, maka posisi Madiun menjadi terbuka dan rawan terhadap serangan lanjutan TNI. Dengan demikian konsentrasi pasukan yang ada di Madiun dalam keadaan yang tidak aman. PKI berada di persimpangan jalan, menyerah dan menghentikan perjuangan atau melakukan perlawanan bersenjata.<sup>206</sup> Faktor waktu memegang peranan penting. Tidak mungkin lagi PKI di Madiun menunggu sampai bulan November sesuai

---

<sup>204</sup> Djamal Marsudi, 1966, *Menyingkap Tabir Fakta-fakta Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun*, Jakarta, Merdeka Press, hlm. 25.

<sup>205</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 239.

<sup>206</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 127.

dengan rencana Muso untuk melakukan tindakan-tindakan non-parlementer. Akhirnya laskar-laskar Pesindo (Brigade 29) yang sebelumnya memang sudah menentang program ReRa Kabinet Hatta memilih untuk melakukan perlawanan bersenjata. Pada tanggal 18 September 1948 malam, Radio Gelora Pemuda Madiun yang dikuasai oleh PKI menyiarkan sebagai berikut :

“..... Kita khawatir, bahwa pemerintah kita menjadi fasistis-militeristis, yaitu karena kekuasaan dipegang oleh satu orang, yang menjabat Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan.

Mereka adalah penghianat-penghianat negeri yang telah menyerahkan puluhan juta teman-teman setanah air kepada Jepang yang kejam sebagai romusha-romusha. Persatuan adalah sangat perlu, tetapi tak boleh mengakibatkan perbudakan. Kita bertanya, apakah tadinya tidak diadakan perundingan antara Pemerintah Yogya dengan Belanda tentang pembasmian sayap kiri.

Kita sekarang mengetahui, bahwa Belanda bekerja sama dengan Pemerintah Republik untuk menjajah rakyat. Fasis dan kooperator Hatta kini mencoba mempergunakan Republik untuk menjajah kaum buruh dan kaum tani.

Madiun telah bangun untuk membasmi semua musuh revolusi : Polisi, Polisi Tentara, dan Tentara telah dilucuti senjatanya oleh rakyat. Kaum buruh dan kaum tani telah membentuk suatu pemerintah baru. Senjata kita akan dipergunakan terus hingga seluruh Indonesia telah dimerdekan. Saat untuk revolusi telah tiba .....<sup>207</sup>

Tiga tembakan pistol oleh Soemarsono, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 1948 pukul 03.00 pagi dengan resmi menandakan bahwa PKI telah meninggalkan perjuangan parlementer dan beralih ke non-parlementer.<sup>208</sup>

Pasukan PKI yang terusir dari kota Solo ikut bergabung dengan rekan-rekan mereka di Madiun. Mereka memusatkan serangan pada markas-markas TNI/CPM dan tangsi kepolisian. Pada pukul 09.00 pasukan TNI telah berhasil menduduki kantor-kantor pemerintah, bank, kantor pos dan telepon, markas sub-teritorial Komando Madiun, dan Markas Staf Pertahanan Djawa Timur (SPDT). Dan pada

<sup>207</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 235.

<sup>208</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik, op. cit.*, hlm. 128.

pukul 10.00 WIB Radio Gelora Pemuda yang menjadi milik PKI mengumumkan pemerintahan baru “Soviet Republik Indonesia,” dengan susunan pemerintah yang terdiri dari :

- 1) Abdul Mutalib selaku residen
- 2) Sumarsono selaku gubernur militer
- 3) Kolonel Djoko Sujono selaku komandan militer
- 4) Mayor Mustopo selaku komandan militer kota.<sup>209</sup>

Selain menduduki obyek-obyek vital di Madiun, pasukan PKI juga membunuh orang-orang yang tidak mau mendukung aksi mereka. Bupati, patih, wedana, kepala polisi, komandan depo, jaksa, kiai, guru, pimpinan partai dan organisasi beserta para bawahannya beramai-ramai digiring ke suatu tempat dan kemudian satu demi satu dijagal di lubang-lubang pembantaian yang telah disiapkan oleh para anggota PKI.<sup>210</sup> Lubang-lubang pembantaian itu tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Magetan. Serangan pasukan PKI juga diarahkan kepada pesantren-pesantren yang dianggap sebagai basis kekuatan Masyumi. Pasukan PKI dalam waktu singkat berhasil menguasai Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Purwantoro, Wonogiri, Sukoharjo, Ngawi, Cepu dan Magetan. Mereka juga mengibarkan bendera merah di daerah-daerah yang telah diduduki. Pada sore harinya, sekitar pukul 16.00 di makam pahlawan kota Madiun diadakan pemakaman seorang anggota PKI yang terbunuh ketika melakukan penyerbuan ke markas CPM Madiun. Soemarsono yang menghadiri pemakaman itu berpidato dan menghasut untuk mengambil tindakan pembalasan atas

---

<sup>209</sup> Maksum, *op. cit*, hlm. 23.

<sup>210</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

meninggalnya anggota PKI tersebut. Pidatonya diakhiri dengan kata-kata : “*Van Madiun begint de victorie*” (dari Madiun kemenangan dimulai).<sup>211</sup>

Ketika Soemarsono memproklamasikan berdirinya “Soviet Republik Indonesia”, Muso dan rombongan PKI lainnya sedang berada di Purwodadi dalam rangka perjalanannya berkampanye untuk mendapatkan dukungan dari rakyat atas program oposisinya terhadap pemerintah Hatta. Sebagai pimpinan tertinggi PKI pada saat itu, Muso dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan. Jika ia tidak kembali ke Madiun dan membantu Soemarsono, maka kegiatan partainya cepat atau lambat pasti akan dibekukan oleh pemerintah. Namun jika ia kembali ke Madiun, berarti perjalanan kampanyenya yang telah berlangsung selama tiga minggu terbuang sia-sia. Akhirnya Muso dengan rombongannya membatalkan segala rencana untuk mengadakan rapat-rapat besar di daerah-daerah dan memutuskan untuk kembali ke Madiun.<sup>212</sup>

Pada tanggal 19 September 1948 pukul 13.00, pasukan PKI menangkap perwira-perwira SPDT antara lain Letkol Marhadi, Letkol Wiyono, Kapten Bismo, Kapten Kartijo, Kapten Sidik Parwoko, dan Letnan II Cuk Harsono. Para perwira tersebut kemudian ditawan di Markas Batalyon Musyofa dan kemudian dibawa ke Dungus. Sore harinya Muso tiba di Madiun dan langsung menuju Markas Soemarsono di Rejoagung. Disini mereka mengadakan pembicaraan dengan Soemarsono dan Jokosuyono.<sup>213</sup> Mereka mempelajari perkembangan peristiwa-peristiwa di Madiun. Dari pembicaraan itu diketahui bahwa PKI sedang

---

<sup>211</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm 145.

<sup>212</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik, op. cit.*, hlm. 131.

<sup>213</sup> Goerge Mc Turnan Kahin, *op. cit.*, hlm. 370.

berada dalam posisi yang sulit, dan mau tidak mau mereka harus melanjutkan perjuangan bersenjata.

Pemerintah Front Nasional yang dibentuk kaum komunis mengumumkan berlakunya jam malam dari pukul 23.00 sampai pukul 05.00 pagi. Selain itu, semua kantor harus mengadakan penjagaan siang dan malam yang dilakukan oleh kaum buruh. Seluruh kepolisian dan TNI dibubarkan, diganti oleh tenaga-tenaga baru yang dipilih oleh kaum komunis. Semua perhubungan dengan luar kota Madiun diputus. Jalan-jalan dipenuhi dengan bendera merah. Kendaraan yang melintas di jalan raya juga harus dipasangi bendera merah. Tanggal 20 September Pemerintah Front Nasional di Madiun mengumumkan program nasionalnya. Pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Perombakan aparat pemerintah yang lama
- b. Perombakan ketentaraan dengan memasukkan unsur-unsur demokratis di lingkungan tentara. Tentara harus bekerjasama dengan buruh dan tani.
- c. Nasionalisasi perusahaan, pabrik, bank dan lain-lain.
- d. Pembagian tanah untuk para petani penggarap.
- e. Pengambil alihan semua pabrik, bank, perkebunan dan alat-alat perhubungan musuh (Belanda). Diadakan pengendalian harga-harga.
- f. Seluruh rakyat diorganisasikan untuk melawan musuh-musuh dari dalam/luar.
- g. Didirikan biro keamanan.<sup>214</sup>

### **C. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemberontakan**

Taktik PKI untuk mencari dukungan adalah melakukan penipuan-penipuan dan menakut-nakuti rakyat. Orang-orang miskin dan buta huruf oleh PKI dijanjikan tanah dan hidup sejahtera apabila mendukung gerakan PKI.<sup>215</sup> Bahkan

---

<sup>214</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 135-136.

<sup>215</sup> Maksum, *op. cit.*, hlm 94.

PKI juga menjanjikan akan membagikan tanah *bengkok* milik pamong desa dan tuan tanah.<sup>216</sup> Salah satu contohnya taktik licik PKI terhadap Sutjipto, camat di Panekan. Dalam menjalankan tugasnya ia melakukan korupsi. Setelah mengetahui kecurangan Camat Sutjipto, ke-15 kepala desa yang telah terpengaruh oleh PKI mendesaknya agar mengikuti PKI. Jika camat Sutjipto menolak, mereka akan membuat resolusi kepada pemerintah untuk menjatuhkan Sutjipto dari jabatannya.<sup>217</sup> Bahkan PKI menjanjikan akan menjadikannya bupati Magetan bila mau bergabung dengan kelompok komunis. Karena tidak ingin kehilangan jabatan dan janji PKI akan menjadikannya bupati Magetan, akhirnya Camat Sutjipto mendukung PKI.

Namun tidak banyak masyarakat yang terlibat dalam pemberontakan PKI. Mereka yang bersedia mendukung pada umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah yang masih buta huruf, buta informasi, dan tidak tahu-menahu masalah politik. Taktik licik PKI malah menjadi bumerang bagi mereka sendiri. ketika pemerintah menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi pernyataan Presiden Soekarno tentang pemberontakan yang dilakukan oleh komunis, rakyat merasa sangat tertipu dan berbalik arah memusuhi PKI. Dengan bersenjatakan kelewang dan clurit, rakyat berbondong-bondong memburu dan menangkap tokoh-tokoh PKI untuk mereka bantai sendiri sampai gerakan tersebut dihentikan oleh pihak aparat.<sup>218</sup> Selanjutnya eksekusi terhadap para pemberontak diambil alih oleh

---

<sup>216</sup> Tanah *bengkok* adalah tanah milik desa yang dipinjamkan kepada pamong desa untuk digarap dan dipetik hasilnya sebagai pengganti gaji.

<sup>217</sup> Maksum, *op. cit.*, hlm. 94.

<sup>218</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

aparatus keamanan. Di alun-alun Ponorogo, Magetan, Pacitan, Wonogiri, Ngawi, Pati, dan Kudus eksekusi tersebut dilakukan dan disaksikan oleh rakyat.

#### **D. Korban Pemberontakan**

Korban jiwa akibat pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 secara keseluruhan memang tidak dapat dihitung secara pasti, mengingat begitu banyaknya nyawa manusia melayang. Mereka yang menyaksikan atau bahkan ikut terlibat dalam pemberontakan tersebut hanya dapat melakukan penghitungan secara kasar atau perkiraan saja. Pemerintahpun tidak sempat melakukan pencatatan para korban karena Belanda segera melancarkan agresi militernya. Dalam pertempuran yang kadang-kadang berlangsung secara membabi-buta, korban dari kedua belah pihak sangat besar.<sup>219</sup> Baik korban yang sengaja dibunuh, maupun rakyat tanpa tahu apa-apa ikut terbunuh. Dari kalangan TNI tercatat 159 orang yang gugur.<sup>220</sup>

Para pemberontak membantai siapa saja yang tidak mau tunduk pada PKI. Para korban pembantaian itu oleh PKI dimasukkan ke dalam sumur-sumur tua yang tersebar di Kabupaten Magetan. Salah satu sumur tua yang dijadikan lubang pembantaian PKI adalah di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Letak desa ini sangat strategis, yaitu disebelah selatan Lapangan Udara Iswahyudi dan dilintasi rel-rel kereta lori dari daerah perkebunan menuju ke berbagai pabrik gula. Di desa inilah PKI memusatkan aksi pembantaianya terhadap tokoh-tokoh yang pro-pemerintah. Namun selain di Desa Soco, masih terdapat beberapa desa

---

<sup>219</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 164.

<sup>220</sup> *Idem.*

lagi yang dijadikan tempat pemantaian oleh PKI, yaitu Desa Cigrok, Bangsri, Nglopang, dan di pabrik gula Rejosari.

Lubang pembantaian di Desa Soco sebenarnya tidak akan pernah terungkap andaikata seorang anggota PKI tidak kesurupan dan mengigau bahwa dia turut pula melakukan pembantaian di sumur Soco.<sup>221</sup> Anggota PKI itu kemudian diinterogasi oleh petugas keamanan agar menunjukkan dimana para pemerontak melakukan pembantaian. Tetapi ketika lubang pembantaian ditemukan, Belanda melancarkan agresi militernya sehingga penggalian belum bisa dilakukan. Penggalian lubang-lubang pembantaian PKI baru bisa dilakukan pada awal tahun 1950.

Di Desa Soco terdapat dua sumur tua yang letaknya di tengah tegalan ketela. Pengangkatan korban pembantaian PKI dari kedua sumur tersebut dilakukan dengan menggali dua lubang dari arah yang berlawanan menuju titik pusat sumur. Di sumur Soco ditemukan tidak kurang dari 108 mayat korban kebiadaban PKI dan 78 orang diantaranya bisa dikenal identitasnya.<sup>222</sup> Dari korban yang berhasil diidentifikasi ditemukan mayat Bupati Sudibyo, Kapten Soebirin, Jaksa R. Moerti, Muhammad Suhud, Kapten Sumarmo, K.H. Muhammad Noer, Muhammad Salis, Suratatim, dan beberapa aparat pemerintah.

Di Desa Bangsri terdapat sumur tua yang untuk membantai rakyat yang tidak mau tunduk pada PKI. Sejumlah korban yang kemudian diketahui antara lain Salam, Maulana, Sastro Ros, Sarmadi, Doblo, Sarpin, Ruslan, Asrori, Sukro,

---

<sup>221</sup> Maksum, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

dan seorang anggota tentara bernama Kasdan.<sup>223</sup> Sedangkan di Desa Cigrok, sebelah selatan Takeran ditemukan lebih kurang 22 orang korban pembantaian. Diantara korban itu ada K.H. Imam Sofwan, Hadi Addaba' (guru dari Mesir) dan Imam Faham dari Pesantren Takeran. Camat Takeran Priyo Utomo, Komandan Polisi Takeran Martowijoyo dan anak buahnya Sumingan, Kusno, serta Kasmin juga ikut dibantai di Desa Cigrok. Tidak jauh dari sumur pembantaian di Desa Cigrok, tepatnya di Desa Kepuh Rejo ditemukan pula sumur tua yang digunakan oleh PKI memantai Kiai Zubair dan Kiai Bawani.

Di sumur pembantaian desa Batokan, ditemukan mayat tokoh-tokoh pesantren, diantaranya Kiai Hamzah dan Kiai Nurun serta beerapa santri. Sedangkan di desa Nglopang ditemukan dua lubang pembantaian PKI yang masing-masing berisi sedikitnya 6 orang. Di lubang Nglopang pertama terkubur mayat R. Margono (Camat Parang), Irawan (Staf Kecamatan Parang), Gendut (Guru SR III Parang), Diyun (Kepala Desa Bungkok), Kasan Kasiroen (Tokoh PNI Desa Bungkok), dan Soero (petani asal Desa Bungkok). Di lubang Nglopang kedua, kira-kira berjarak 50 meter diseelah selatan luang pertama terkubur mayat Koesno (Kepala Desa Sayutan), Sobiran (Kepala Desa Mategal), Soekidjo (anggota dewan Desa Mategal), Mangoen Arso (Kepala Desa Pragak), Saiman (modin Joketro) dan Soetokarjo (petani asal Desa Parang).<sup>224</sup>

Orang-orang PKI juga melakukan pembantaian di loji pabrik gula Rejosari, Gorang Gareng. Pembantaian di tempat ini dapat dikatakan sebagai pembantaian yang terburu-buru, karena dilakukan pada saat Batalyon Sambas memasuki

---

<sup>223</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>224</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

Gorang Gareng. Puluhan tawanan PKI dimasukkan dalam suatu ruangan dan ditembaki dari luar melalui jendela.

Di Walikukun ditemukan beberapa mayat yang ternyata adalah mayat Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Suryo (bekas Gubernur Jawa Timur); mayat Komisaris Polisi Jawa Barat, Duryat; dan Komandan Angkatan Markas Besar Komando Jawa, Mayor Samsudarso.<sup>225</sup> Sedangkan di Pati, Jawa Tengah orang-orang PKI melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dan aparat pemerintah. Disini pembunuhan dilakukan dengan cara menjepit leher tawanan dengan bambu yang diikat ujungnya, baru kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Mereka yang menjadi korban adalah Kolonel Sunandar (Komandan Resimen Pati), Mr. Iskandar (Residen Pati), dr. Roekmono Adi (Kepala Rumah Sakit Blora), Sumodarsono (Kepala Sekolah), Gunandar (Kepala Bank BRI), dan Abu Umar (anggota KNIP wakil dari STII).

## **E. Dampak Pemberontakan**

### **1. Dampak Politik**

Meletusnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 telah merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Disaat Bangsa Indonesia mulai membangun negara yang baru merdeka, PKI memanaskan situasi politik dalam negeri dengan menimbulkan perpecahan partai politik dan golongan-golongan tertentu. Suasana saling curiga-mencurigai merajalela dimana-mana. Demikian pula setelah pemberontakan dapat diselesaikan, maka diperlukan waktu lama

---

<sup>225</sup> *Ibid.*, hlm. 364.

untuk menenangkan kembali iklim politik di daerah Republik<sup>226</sup> Namun ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa pulih kembali. Semua persoalan seolah-olah dilupakan oleh segenap lapisan rakyat dan golongan.<sup>227</sup> Perhatian semua kalangan masyarakat hanya terfokus pada usaha menghadapi agresi militer Belanda.

Setelah masa revolusi fisik berakhir, ternyata benih-benih permusuhan terhadap PKI muncul kembali. Masyumi dan PSI bahkan berusaha keras untuk menjatuhkan PKI dengan menyebarkan berbagai isu-isu. Setiap kali terjadi konflik politik antara partai politik dan kalangan tertentu dengan PKI, maka pihak lawan menggunakan pengalaman pemberontakan Madiun untuk menyalahkannya. Sebaliknya, pihak PKI selalu berusaha membersihkan diri dari pertanggungjawaban terhadap pemberontakan di Madiun.

## **2. Dampak Ekonomi**

Perekonomian Indonesia yang melemah akibat blokade ekonomi Belanda semakin bertambah parah dengan adanya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Anggaran Belanja Negara membengkak karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menumpas pemberontakan tersebut. Kondisi perekonomian Indonesia semakin terpuruk dengan hilangnya 2 juta rupiah kas Negara, 6 juta rupiah kas Staf Pertahanan Djawa Timur (SPDT), dan 2 juta rupiah dari kas kabupaten Madiun. Kerugian ini disebabkan karena para

---

<sup>226</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 166.

<sup>227</sup> *Idem.*

pemberontak berhasil merebut percetakan Oeang Republik Indonesia (ORI) dan mengedarkan uang baru yang oleh pemerintah belum diedarkan.

Masyarakat, khususnya yang berada di Madiun sangat dirugikan dengan pemberontakan PKI. Mereka kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan bahan makanan akibat taktik bumi hangus PKI. Di Ngrambe, Sidogoro, Kedunggalar, dan sepanjang jalan Madiun-Ponorogo banyak rumah-rumah dibakar dan jembatan-jembatan dihancurkan oleh para pemberontak. Tujuannya untuk menghambat pengejaran pasukan TNI terhadap para pemberontak yang berhasil melarikan diri. Sedangkan di daerah Ngawi, para pemberontak membakar beribu-ribu ton kayu jati yang siap dipotong. Bahkan persediaan bibit padi yang sangat diperlukan oleh para petani juga tidak luput dari sasaran bumi hangus kaum pemberontak.<sup>228</sup> Penderitaan masyarakat di Madiun yang merupakan daerah minus beras semakin bertambah berat karena orang-orang PKI memaksa para penjual beras untuk menjual beras semahal-mahalnya.

### 3. Dampak Militer

Dengan pengerahan pasukan-pasukan TNI untuk menumpas pemberontakan, maka potensi pertahanan RI dalam menghadapi tentara Belanda disepanjang garis demarkasi menjadi sangat berkurang.<sup>229</sup> Kekuatan TNI baik secara personil maupun energi terkuras untuk menumpas pemberontakan ini. Dari kalangan TNI tercatat 159 orang yang gugur.<sup>230</sup>

---

<sup>228</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>229</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>230</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

#### **4. Dampak Sosial**

Pembunuhan massal yang dilakukan para pemberontak menyebabkan masyarakat di daerah-daerah pemberontakan khususnya Madiun terpecah belah, saling memenci dan mendendam. Timbul rasa kebencian di hati keluarga korban pembunuhan terhadap keluarga kaum pemberontak. Perpecahan dalam masyarakat itu sulit untuk diselesaikan karena aparat pemerintahan dan keamanan di daerah-daerah pemberontakan sudah mati terbunuh. Bahkan beberapa orang yang berhasil lolos dari pembantaian PKI mengalami trauma karena menyaksikan anggota keluarga maupun teman-temannya dibunuh dengan sadis.

#### **5. Dampak Internasional**

Keberhasilan Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun dalam waktu yang relatif cukup singkat membawa kesan mendalam bagi Amerika Serikat. Sebagai bentuk simpati terhadap keberhasilan Indonesia, Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap pemerintahan Hatta. Amerika Serikat melihat bahwa kabinet yang dibentuk Hatta tidak terlalu lemah dan kondisi wilayah di Indonesia tidak terlalu kacau seperti yang dilaporkan Belanda. Terlebih lagi ketika Amerika Serikat mengetahui bahwa Belanda telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, dukungan terhadap pemerintah Indonesia terus meningkat. Bahkan Amerika Serikat berjanji akan memberikan bantuan keuangan terhadap Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Dean Acheson, memberitahu Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Stikker, yang sedang mengunjungi Washington pada waktu itu, bahwa pemerintah Amerika Serikat akan terpaksa mengambil

tindakan keras jika pemerintah Belanda terus-menerus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.<sup>231</sup>

Di lain pihak, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet semakin memburuk setelah pemberontakan PKI di Madiun berhasil ditumpas. Uni Soviet menilai bahwa Indonesia telah menjadi kaki tangan negara-negara imperialis khususnya Amerika Serikat. Ketika dilakukan pengambilan suara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai sengketa Indonesia-Belanda, Uni Soviet memveto usulan tersebut. Tindakan Uni Soviet memveto resolusi Dewan Keamanan PBB nampaknya merupakan suatu pernyataan tidak senang terhadap keberhasilan Indonesia menumpas pemberontakan PKI.

---

<sup>231</sup> Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, 1995, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hlm. 239.

## BAB IV

### USAHA PEMERINTAH RI DALAM MENUMPAS PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN TAHUN 1948

Pimpinan Brigade 13/Siliwangi Letkol Sadikin menerima kabar tentang perebutan kekuasaan di Madiun oleh PKI pada tanggal 18 September 1948 siang. Kemudian ia segera mengutus Kapten Mursito untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Markas Besar TNI di Yogyakarta. Tanggal 18 September 1948 sore barulah ibukota Yogyakarta menerima berita-berita tentang pemberontakan itu.<sup>232</sup> Berita tersebut sangat mengejutkan kalangan pimpinan tertinggi republik maupun segenap lapisan masyarakat Yogyakarta. Presiden Soekarno segera mengadakan sidang darurat untuk menindak tegas pemberontakan PKI yang dilakukan di Madiun itu. Sidang kabinet itu berlangsung sejak hari Sabtu tanggal 18 September sampai dengan hari Minggu malam tanggal 19 September secara nonstop untuk menentukan langkah-langkah yang segera diambil guna mengatasi situasi gawat di Madiun.<sup>233</sup> Keputusan sidang kabinet antara lain :

“Peristiwa di Madiun yang digerakkan oleh FDR/PKI adalah suatu pemberontakan terhadap pemerintah ; memerintahkan Angkatan Perang beserta alat-alat negara lainnya untuk memulihkan kekuasaan negara kepada keadaan biasa, memberikan kepada Jenderal Sudirman dengan kuasa penuh untuk melakukan tugas pemulihan keamanan/ketertiban ke keadaan biasa di Madiun dan daerah-daerah lainnya, dan membasmi organisasi-organisasi politik, organisasi masa dan organisasi militer/bersenjata yang turut/mendukung/bersimpati kepada kaum pemberontak PKI/Muso”<sup>234</sup>

---

<sup>232</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 239.

<sup>233</sup> Pinardi, *op. cit.*, hlm. 105.

<sup>234</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik, op. cit.*, hlm. 133.

Malam harinya, pada pukul 20.00 Presiden Soekarno berpidato untuk menggerakkan rakyat agar membantu menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dalam pidatonya presiden juga meminta seluruh lapisan masyarakat agar memilih antara dirinya dan Hatta atau Muso dengan PKInya.<sup>235</sup> Pada pukul 23.30 Muso membalas pidato Bung Karno melalui radio Gelora Pemuda Madiun. Pidato Muso tersebut juga dimuat dalam Surat Kabar Harian Front Nasional yang terbit di Madiun.<sup>236</sup>

Sesuai sidang kabinet kolonel A.H. Nasution melaporkan persiapan-persiapan operasi yang telah dilakukan kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman.<sup>237</sup> Selanjutnya pada pukul 00.01 dilakukan pelucutan dan penangkapan kekuatan PKI agar pemberontakan tidak menjalar ke ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Kurang lebih 200 orang simpatisan maupun tokoh-tokoh PKI antara lain Alimin, Abdulmajid, Tan Ling Jie, Sakirman, Siauw Giok Tjan berhasil ditangkap.<sup>238</sup> Sesudah ibukota RI dibersihkan dari unsur-unsur PKI, maka pemerintah segera mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjamin keselamatan negara. Disamping itu pemerintah melakukan pembredelan terhadap surat kabar berhaluan komunis, yaitu *Patriot*, *Bintang Merah*, *Revolusioner*, *Suara Ibukota*, dan *Harian Buruh*.

Keesokan harinya, yaitu tanggal 20 September 1948, Perdana Menteri Hatta memberikan penjelasan pada BP-KNIP mengenai Pemberontakan PKI di Madiun. Perdana Menteri Hatta juga meminta agar pemerintah mengeluarkan Undang-

---

<sup>235</sup> Pidato Presiden Soekarno secara lengkap lihat lampiran 4 halaman 148.

<sup>236</sup> Pidato Muso secara lengkap lihat lampiran 5 halaman 151.

<sup>237</sup> Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno : "Rebut kembali Madiun..."* op. cit., hlm. 167.

<sup>238</sup> *Idem*.

Undang Keadaan Bahaya untuk menjaga keselamatan negara. Dan pada hari itu juga BP-KNIP menyetujui dikeluarkannya “Undang-Undang Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya.”<sup>239</sup> Selain itu, Perdana Menteri Hatta juga mengadakan Sidang Dewan Siasat Militer untuk melakukan operasi penumpasan secepat mungkin. Karena jika TNI tidak segera melakukan operasi penumpasan, maka Belanda akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan agresi militernya. Kepala Staf Operasi, Kolonel A.H. Nasution menyanggupi untuk merebut Madiun dalam waktu dua minggu, dan menjabarkan selanjutnya tugas strategis ini didalam rencana-rencana operasi.<sup>240</sup>

#### **A. Persiapan Operasi Penumpasan PKI**

##### **1. Operasi penumpasan PKI dari arah barat**

###### **a. Rencana operasi**

Kolonel Bambang Soepeno ditugaskan oleh Markas Besar Tentara (MBT) untuk menyampaikan petunjuk operasi penumpasan PKI kepada Kolonel Gatot Soebroto. Berdasarkan petunjuk operasi tersebut, maka pada tanggal 21 September 1948 Kolonel Gatot Soebroto mengadakan rapat komando dengan para komandan pasukan TNI. Keputusan rapat tersebut adalah :

- 1) Kesatuan yang dikerahkan yaitu Brigade 12, Brigade 13, Brigade 14 (Batalyon Nasuhi dan Husinskyah), Brigade 6 oleh Batalyon Sumadi, Batalyon Suryosumpeno dari STC Kedu dan pasukan-pasukan lain; bergerak dari Solo menuju daerah Madiun, Purwodadi dan Pati.
- 2) Gerakan ke sasaran Madiun dilakukan dalam tiga poros gerakan :
  - a) Poros : Solo – Sragen – Ngawi.
  - b) Poros : Solo – Tawangmangu – Madiun.

<sup>239</sup> Isi dari “Undang-Undang Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya” lihat lampiran 6 halaman 153.

<sup>240</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, *op. cit.*, hlm. 157.

- c) Poros : Solo – Wonogiri – Pacitan – Ponorogo.
- 3) Gerakan ke sasaran di utara Surakarta menuju daerah Purwodadi, Pati, Kudus, Blora.<sup>241</sup>

**b. Pasukan TNI yang dikerahkan**

Operasi penumpasan PKI dari arah barat dipimpin langsung oleh Gubernur Militer Jawa Timur, yaitu Kolonel Gatot Soebroto. Kolonel drg. Moestopo ditunjuk seagai wakil panglima operasi. Sedangkan kepala staf operasi adalah Letkol Abimanyu dengan dibantu oleh beberapa asisten, yaitu Mayor Abdul Kadir dan Mayor Taswin. Adapun pasukan KRU-Z yang dikerahkan untuk operasi ini berkekuatan tiga brigade, yaitu :

- 1) Brigade 12 dibawah pimpinan Letkol Koesno Oetomo, berkekuatan 4 batalyon, berkedudukan di Yogyakarta.
- 2) Brigade 13 dibawah pimpinan Letkol Sadikin, berkekuatan 4 atalyon, berkedudukan di Solo.
- 3) Brigade 14 dibawah pimpinan Letkol Edie Sukardi berkekuatan 3 batalyon, berkedudukan di Magelang.<sup>242</sup>

Brigade 12 terdiri dari Batalyon Daeng Mohammad Ardiwinata berkedudukan di Rewulu (Godean), Batalyon Achmad Wiranatakusuma berkedudukan di Beran (Sleman), Batalyon Kosasih dan Batalyon Kemal Idris berkedudukan di Yogyakarta. Brigade 13 terdiri dari Batalyon Sambas Atmadinata berkedudukan di Tasikmadu, Batalyon Umar Wirahadikusumah berkedudukan di Colomadu, dan Batalyon Sentot Iskandardinata berkedudukan di Sragen. Sedangkan Batalyon Rukman diperintahkan meninggalkan Jawa Tengah

---

<sup>241</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indoensia jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)*, op. cit., hlm. 25.

<sup>242</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

untuk melaksanakan gerakan *Wingate* ke Jawa Barat.<sup>243</sup> Brigade 14 terdiri dari Batalyon Sudarman, Batalyon Rivai, dan Batalyon Huseinsyah. Ketiga batalyon ini berkedudukan di Magelang. Selain pasukan KRU-Z / Divisi Siliwangi, dikerahkan pula 4 Kompi Kesatuan Taruna Militer Akademi (MA) Yogyakarta dan Batalyon Sumadi dari pasukan Panembahan Senopati yang berkedudukan di Manahan.

## 2. Operasi penumpasan PKI dari arah Timur

### a. Rencana Operasi

Pada tanggal 19 September 1948 Kolonel Sungkono diangkat sebagai Gubernur Militer I Daerah Jawa Timur. Pengangkatan ini bertujuan untuk mengatasi kemelut dan kekosongan kepemimpinan TNI di Jawa Timur. Keesokan harinya Kolonel Sungkono memanggil Letkol Surakhmad serta para perwira bekas anggota Staf Divisi VI Narotama guna membicarakan tindakan yang akan dilakukan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Gubernur Militer Sungkono dalam pertemuan itu memberikan beberapa petunjuk sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pasukan penggempur yang terdiri dari batalyon-batalyon yang berada dibawah Brigade Surakhmad.
- 2) Menanyakan sikap dari beberapa batalyon yang berada dibawah komando Brigade XXIX (ikut RI atau ikut PKI).
- 3) Menyusun rencana operasi untuk merebut Madiun dari tangan pasukan pemberontak PKI. Tugas ini diserahkan kepada Letkol Surakhmad.<sup>244</sup>

Komandan Brigade 2, Letkol Surakhmad mengerahkan tiga batalyon dan tiga kompi, yaitu Batalyon Mujayin di Blitar, Batalyon Harsono di Tulungagung,

<sup>243</sup> Gerakan *Wingate* adalah operasi infiltrasi jarak jauh menyusup ke daerah yang diduduki musuh untuk melakukan perlawanan gerilya.

<sup>244</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indoensia jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)*, *op. cit.*, hlm. 73.

Batalyon Sunaryadi di Nganjuk, Kompi Sampurno, Kompi Jarot, dan Kompi dari Batalyon Sabarudin. Ketiga kompi tersebut ditempatkan di Kediri. Rencana penguasaan kembali kota Madiun diputuskan sebagai berikut :

- 1) Dari arah selatan (Blitar-Mojoroto-Ponorogo)
  - a) Batalyon Mudjayin diperintahkan untuk bergerak dari Blitar menghantam pasukan Maladi Jusuf di Mojoroto yang telah meninggalkan Kediri dan diduga menuju Ponorogo.
  - b) Batalyon Harsonodiperintahkan untuk menghadang gerakan pasukan Maladi Jusuf dari Karangrejo. Menurut perkiraan, Maladi Jusuf akan bergerak ke Karangrejo, seab jalan ke Tulungagung dan ke Blitar telah ditutup oleh pasukan TNI.
- 2) Dari arah utara (Nganjuk-Caruban-Madiun)  
Batalyon Sunaryadi ditugasi untuk merebut Madiun dari arah utara lewat Nganjuk, Caruban, Madiun. Batalyon ini diperkuat dengan 1 Baterai Artileri dan Mobiele Brigade Polisi.
- 3) Dari arah timur (Kediri-Madiun)  
Serangan dari timur dijadikan poros serangan. Poros ini berkekuatan Kompi Sampurno yang diperkuat oleh Kompi Jarot dan dua kompi dari Batalyon Sabarudin. Seluruhnya berkekuatan satu atalyon yang dipimpin oleh Mayor Sabarudin.<sup>245</sup>

**b. Pasukan TNI yang dikerahkan**

Sebelum Re-Ra APRI dilaksanakan, pasukan TNI di Jawa Timur terdiri dari Divisi V Ronggolawe yang dipimpin Mayor Jenderal Djatikusumo berkedudukan di Karesidenan Madiun dan Bojonegoro, Divisi VI Narotama yang dipimpin Mayor Jenderal Soengkono di Karesidenan Kediri dan Surabaya, serta Divisi VII Senopati yang dipimpin Kolonel Bambang Sugeng berkedudukan di Malang dan Besuki. Namun setelah Re-Ra tiga divisi si Jawa Timur disederhanakan menjadi satu divisi. Divisi ini membawahi 5 brigade, yaitu :

- 1) Brigade 1 Sudirman di Bojonegoro,
- 2) Brigade 2 Surakhmad di Kediri,
- 3) Brigade 3 Sruji (Brigade Hijrah) di Blitar,

---

<sup>245</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

- 4) Brigade 4 Sudjono di Kepanjen dan Malang,
- 5) Brigade Khusus Kretarto di Jombang.<sup>246</sup>

Brigade-brigade yang dipersiapkan di Jawa Timur tersebut diperkuat oleh Batalyon Suprpto Sukowati (SS) dari Brigade Sudirman. Batalyon Suprpto Sukowati menempatkan pasukannya masing-masing 1 kompi di Ponorogo, Madiun, Maospati, dan Ngawi. Pasukan TNI di Jawa Timur juga diperkuat oleh Brigade Mobil Polisi, Penjaga Pangkalan AU dan pasukan Batalyon Worang dari Brigade 16/KRU-X.

## **B. Pelaksanaan Operasi Penumpasan PKI**

### **1. Operasi penumpasan dari arah barat**

#### **a. Poros Solo – Sragen – Ngawi**

Operasi penumpasan PKI melalui poros Solo –Sragen – Ngawi adalah tugas pokok Batalyon Sentot Iskandardinata dan Batalyon Sumadi. Kedua batalyon ini bertugas memotong garis komunikasi daerah utara, yaitu Purwodadi, Pati, Blora, Demak dan kudu dengan daerah sebelah selatan Madiun yang masih dibawah pengaruh komunis. Selain itu, kedua batalyon ini juga bertanggung jawab penuh mengamankan jalan raya Sragen – Ngawi dan sekitarnya. Batalyon Sentot Iskandardinata bergerak dari Sragen menuju Walikukun dengan menyelusuri jalan raya. Di Walikukun mereka dibantu oleh satu peleton Kompi Amir Mahmud dibawah pimpinan Letda Otje Djundjunan. Dalam waktu singkat, Walikukun berhasil direbut kembali oleh pasukan Siliwangi.

---

<sup>246</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

Setelah berhasil membebaskan Walikukun, pasukan Sentot Iskandardinata meneruskan gerakan ke Paron. Disini mereka mendapat perlawanan dari pasukan PKI. Namun pertempuran dimenangkan oleh pasukan Sentot Iskandardinata dan para pemberontak melarikan diri ke Ngawi. Banyak senjata yang ditinggalkan begitu saja karena tergesa-gesa.<sup>247</sup> Pasukan Sentot Iskandardinata segera melakukan pengejaran ke Ngawi. Sebelum pasukan Sentot Iskandardinata tiba, rupanya para pemberontak telah melakukan pembunuhan massal terhadap lawan politiknya di Pendopo Kabupaten Ngawi.<sup>248</sup> Algojo PKI dari Laskar Wanita yang bernama Sumirah mengikat para tawanan pada tiang-tiang kantor Kabupaten kemudian memenggal kepala mereka. Untuk menghindari semakin banyaknya korban, pasukan Sentot Iskandardinata segera menuju penjara Ngawi dan membebaskan tawanan PKI yang masih tersisa.

Ketika pasukan Sentot Iskandardinata mengamankan penjara, pasukan Batalyon Sumadi tiba di Ngawi dan segera membantu membebaskan para tawanan. Setelah itu, mereka segera mengamankan kota, pusat pertokoan, dan Benteng Ngawi. Pertempuran sengit dengan para pemberontak terjadi sewaktu merebut Benteng Ngawi, karena benteng ini dijadikan basis pertahanan PKI. Namun akhirnya pasukan musuh melarikan diri ke utara menyeberangi sungai Bengawan Solo.<sup>249</sup> Pasukan Batalyon Sentot Iskandardinata dan Batalyon Sumadi tidak meneruskan pengejaran terhadap para pemberontak karena mereka hanya mendapat perintah untuk menduduki dan menguasai kota Ngawi. Sesudah kota Ngawi direbut kembali, rumah dinas kabupaten dijadikan Markas Staf Batalyon

---

<sup>247</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>248</sup> *Idem.*

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm.44.

Sentot Iskandardinata. Alun-alun dijadikan tempat untuk mengumpulkan tawanan pasukan dan orang-orang PKI.<sup>250</sup>

#### **b. Poros Solo – Tawangmangu – Madiun**

Poros Solo –Tawangmangu – Madiun merupakan poros gerakan operasi Brigade 13 KRU-Z dibawah pimpinan Letkol Sadikin dengan kekuatan 4 Batalyon, yaitu Batalyon Sambas Atmadinata, Batalyon Umar Wirahadikusumah, Batalyon Daeng Muhammad, dan Batalyon Achmad Wiranatakusumah. Batalyon Sambas Atmadinata ditetapkan sebagai kekuatan pemukul dan batalyon Achmad Wiranatakusumah sebagai kekuatan cadangan. Batalyon Sambas Atmadinata, yang terdiri dari 3 Kompi, berangkat dari Tasikmadu menuju Tawangmangu lewat Karangpandan pada tanggal 25 September 1948.<sup>251</sup> Sedangkan 3 Batalyon lainnya berangkat dari Solo. Tugas utama Dari Batalyon Sambas Atmadinata adalah menguasai Madiun secepat mungkin. Pasukan Taruna Militer Akademi (MA) yang lebih dulu meduduki Tawangmangu ditetapkan sebagai kompi kawal Batalyon Sambas Atmadinata.

Memasuki kota Sarangan, gerak pasukan Taruna MA mengalami hambatan karena para pemberontak membuat barikade dari pohon pinus yang dipotong-potong dan menanam ranjau di sepanjang jalan. Pasukan MA segera melakukan pengamanan dan melancarkan operasi pembersihan terhadap pengikut PKI. Diantara musuh yang berhasil ditangkap ialah Komandan Polisi Tentara TLRI Kolonel Sutedjo dan Lurah desa Sarangan.<sup>252</sup> Setelah situasi aman, Barulah pasukan Batalyon Sambas Atmadinata memasuki sarangan. Para pengikut PKI

---

<sup>250</sup> *Idem.*

<sup>251</sup> *Ibid.*, hlm.29.

<sup>252</sup> *Ibid.*, hlm.30.

yang berada diluar daerah Sarangan mencoba melancarkan serangan terhadap pasukan Batalyon Sambas Atmadinata, namun mereka berhasil dilumpuhkan dengan ledakan granat.

Setelah Sarangan berhasil direbut kembali dari tangan PKI, Letkol Sadikin mengeluarkan perintah operasi baru. Batalyon Daeng Muhammad diperintahkan bergerak ke Maospati. Batalyon Achmad Wiranatakusumah sebagai pasukan cadangan bergerak ke selatan untuk menduduki Pacitan. Daerah itu harus segera direbut kembali dari tangan PKI agar para pemberontak tidak mendapat bantuan dari negara asing yang masuk melalui pelabuhan Pacitan. Sedangkan Batalyon Umar Wirahadikusumah diperintahkan bergerak ke Ngrambe, Panekan, dan Magetan.

Pasukan Batalyon Umar Wirahadikusumah memulai gerakannya dari Plaosan untuk menduduki Magetan. Mereka diberi tanggung jawab penuh atas seluruh daerah kabupaten yang membentang dari sebelah utara, yaitu sekitar Walikukun hingga perbatasan Ponorogo di sebelah selatan. Beberapa pasukan bergerak dari Panekan dan Ngrambe menyusuri gunung Lawu, sedangkan di Ponorogo ditempatkan tiga peleton. Rupanya pasukan pemberontak secara tergesa-gesa mengosongkan Magetan setelah mendengar berita kedatangan pasukan Siliwangi.<sup>253</sup> Mereka segera melarikan diri dan membawa 20 orang tawanan untuk dipindahkan ke pabrik gula Gorang-Gareng.

Sementara itu, pasukan Batalyon Sambas Atmadinata bergerak menuju Plaosan, Nitikan dan Gorang-Gareng. Di Gorang-Gareng terdapat sebuah Pabrik

---

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm.45.

gula (Rejosari) yang digunakan oleh PKI menawan orang-orang yang dianggap musuhnya.<sup>254</sup> Para tawanan PKI itu pada umumnya adalah tokoh-tokoh masyarakat, pamongpraja, dan polisi. Ketika pasukan Batalyon Sambas Atmadinata mengadakan pembersihan, disalah satu Loji Pabrik Gula Rejosari ditemukan 160 tawanan PKI mati terbunuh. Dari Gorang-Gareng Batalyon Sambas Atmadinata bergerak menuju ke Uteran, suatu kecamatan disebelah selatan kota Madiun.<sup>255</sup> Rupanya pasukan PKI tidak mengetahui masuknya Batalyon Sambas Atmadinata ke Uteran, karena mereka sempat melakukan evakuasi besar-besaran ke arah Gunung Wilis.

Dari Uteran, Batalyon Sambas Atmadinata bergerak ke Madiun. Pada tanggal 30 September 1948 sekitar pukul 10.00 mereka bersiap-siap melakukan serangan memasuki kota Madiun. Menjelang sore hari sekitar pukul 16.45 Batalyon Sambas Atmadinata berhasil menduduki kota Madiun. Mereka sama sekali tidak mendapat perlawanan dari pasukan PKI, bahkan kota Madiun sudah dalam keadaan kosong. Selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap obyek-obyek vital di Madiun seperti stasiun kereta api, bank-bank kantor pemerintah, percetakan ORI, jembatan dan lainnya. Keesokan harinya, yaitu tanggal 1 Oktober 1948 Mayor Sambas Atmadinata berangkat menuju Plaosan untuk melaporkan situasi di Madiun pada Letkol Sadikin.

### **c. Poros Solo – Wonogiri – Pacitan - Ponorogo**

Operasi penumpasan PKI melalui Poros Solo – Wonogiri – Pacitan – Ponorogo adalah tugas pokok Batalyon Nasuhi. Pada tanggal 18 September 1948

---

<sup>254</sup> *Ibid.*, hlm.32.

<sup>255</sup> *Idem.*

pasukan Batalyon Nasuhi berangkat dari markasnya di Magelang menuju Sukoharjo. Ternyata pasukan Batalyon A. Kosasih yang datang dari Solo telah lebih dulu memasuki Sukoharjo dan berhasil memukul mundur musuh. Dalam serangan ini, Yadau berhasil meloloskan diri. Pasukan musuh kemudian melarikan diri ke Wonogiri. Maka ketika Batalyon Nasuhi tiba di Sukoharjo, daerah ini sudah ditinggalkan oleh musuh. Tindakan selanjutnya adalah mengamankan stasiun kereta api, pos polisi dan berbagai instalasi yang dianggap penting.<sup>256</sup> Setelah situasi di Sukoharjo aman, Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto memerintahkan Batalyon A. Kosasih untuk kembali ke Solo, sedangkan Batalyon Nasuhi melanjutkan pergerakan ke Wonogiri.

Mengingat situasi medan yang tidak menguntungkan lagi gerakan militer, maka sewaktu akan memasuki Wonogiri pasukan Batalyon Nasuhi dipecah menjadi tiga kelompok :

- 1) Kompi Kaharudin dari jurusan jalan besar melewati Gunung Gandul dan Kebojati.
- 2) Kompi Witono menyeberangi Bengawan Solo masuk dari sebelah barat, dan
- 3) Kompi Mung Parhadimuljo sebagai kompi bantuan berada di sebelah timur untuk memberikan bantuan tembakan.<sup>257</sup>

Ketika memasuki Wonogiri, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Batalyon Nasuhi dengan para pemberontak. Namun akhirnya pada tanggal 21 September 1948 Wonogiri berhasil direbut kembali oleh pasukan Batalyon Nasuhi. Para pemberontak kemudian melarikan diri ke arah selatan dan barat Wonogiri, salah satunya ke jurusan Baturetno. Ketika dilakukan pembersihan,

---

<sup>256</sup> *Ibid.*, hlm.49.

<sup>257</sup> *Ibid.*, hlm.50.

pasukan batalyon Nasuhi berhasil menangkap dua tokoh penting PKI, yaitu Alimin dan Sukono Djojopratiknjo. Batalyon Nasuhi kemudian meneruskan gerakannya ke Pacitan setelah Batalyon Husinsyah tiba di Wonogiri untuk menyelesaikan masalah-masalah teritorial dan tahanan sampai bulan Desember 1948.

Ketika Batalyon Nasuhi tiba di Wuryantoro, mereka bertemu dengan pasukan Gajah Mada berseragam hitam dibawah pimpinan Kapten Bambang Subagyo. Diantara pasukan Gajah Mada ini menurut informasi terdapat Letkol Suadi bekas komandan Brigade 6 Panembahan Senopati.<sup>258</sup> Tanpa melalui pertempuran bersenjata, Batalyon Nasuhi berhasil melucuti persenjataan mereka. Batalyon Nasuhi kemudian meneruskan pergerakan menuju Pracimantoro yang disinyalir banyak tokoh PKI seperti Setiajit dan Wikana bersembunyi di tempat ini. Namun pasukan Batalyon Nasuhi tidak berhasil menangkap mereka, hanya mobilnya saja yang dirampas. Dari Pracimantoro pasukan Batalyon Nasuhi melakukan pengejaran terhadap para pemberontak ke Baturetno. Sedangkan Kompi Sutikno dan Kompi Taruna MA diperintahkan ke Tirtomoyo untuk menyelamatkan tawanan PKI.

Dari Baturetno, Batalyon Nasuhi bergerak menuju Pacitan untuk menggagalkan para pemberontak yang hendak bergabung dengan pasukan induk PKI di Madiun. Tetapi ketika kota Pacitan berhasil diduduki, para pemberontak telah melarikan diri dari Pacitan dan bergabung dengan pasukan Batalyon Maladi Yusuf. Setelah berhasil menduduki Pacitan, Batalyon Nasuhi kembali lagi ke

---

<sup>258</sup> *Ibid.*, hlm.53.

Wonogiri. Tetapi di tengah perjalanan mereka diperintahkan melakukan pengejaran terhadap Batalyon Maladi Yusuf yang bergerak menuju Tawangmangu.

## **2. Operasi penumpasan dari arah timur**

### **a. Poros Blitar – Mojoroto - Ponorogo**

Blitar – Mojoroto – Ponorogo merupakan poros gerak pasukan Batalyon Mujayin dan Batalyon Harsono. Batalyon Mujayin yang diperkuat oleh pasukan kompi Sumadi dan kompi Sabirin Muchtar ditugaskan untuk menghancurkan kedudukan Batalyon Maladi Yusuf di Mojoroto. Sedangkan Batalyon Harsono ditugaskan untuk menghadang pergerakan Batalyon Maladi Yusuf dari Karangrejo. Namun pasukan Maladi Yusuf berhasil memukul mundur para penghadang kemudian melarikan diri ke Sendangharjo. Pasukan Batalyon Maladi Yusuf kemudian bertahan di sebelah utara Trenggalek untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Batalyon ini berkekuatan empat kompi dan merupakan Batalyon komunis yang tangguh baik kemampuannya maupun ideologinya.<sup>259</sup> Pada tanggal 22 September 1948 mereka berusaha untuk menduduki Trenggalek, namun Batalyon Mujayin lebih cepat mendudukinya.

Sementara itu, Kompi Sumadi diperintahkan untuk membantu batalyon Mujayin. Kompi ini berugas menghalau musuh di Parik Gula Mojopanggung yang pada waktu itu dipergunakan sebagai markas TLRI dan gudang senjata PKI. Pasukan kompi Sumadi segera melakukan pengepungan musuh secara ketat,

---

<sup>259</sup> *Ibid.*, hlm.78.

sehingga para pemberontak tidak dapat bergerak. Dengan menggunakan taktik penyergapan Lettu Sumadi dapat memasuki kantor markas TLRI dan memaksa musuh untuk menyerah.<sup>260</sup> Dari hasil penyergapan tersebut didapat sejumlah senjata milik PKI. Selanjutnya Kompi Sumadi bergerak menuju Kacangan untuk melakukan pengejaran terhadap pasukan Batalyon Maladi Yusuf. Rupanya para pemberontak melarikan diri ke kecamatan Sooko, di lereng barat Gunung Wilis. Desa Sooko terletak 33 kilometer sebelah timur Ponorogo, penduduknya sudah dipengaruhi oleh komunis yang dipimpin oleh seorang warok bernama Mugeni Kamplok.<sup>261</sup> Disini pasukan Batalyon Maladi Yusuf yang berjumlah lebih kurang 1000 orang dengan persenjataan lengkap menyusun pertahanan dan mendirikan markas komando. Mereka mendapat bantuan dari pasukan Pesindo dan Batalyon Panjang Djokopriyono.

Pertempuran terbuka antara pasukan Kompi Sumadi dan pasukan Batalyon Maladi Yusuf terjadi di Bukit Puyangan. Pertempuran berlangsung dari terbit fajar hingga sore hari. Kompi Sumadi berhasil mematahkan pertahanan lawan setelah mendapat bantuan Kompi Sabirin Muchtar dari Batalyon Mujayin. Pasukan Maladi Yusuf kemudian melarikan diri ke desa Dalangan dan Biting. Namun pengejaran terhadap para pemberontak terus dilakukan, sehingga setelah para pemberontak sampai di Biting mereka berpecah ke arah Ponorogo dan Pulung. Untuk mengikuti jejak musuh, pasukan Kompi Sumadi bergerak ke Pulung dan pasukan Kompi Sabirin Muchtar bergerak ke Ponorogo. Setelah kompi Sumadi berhasil menguasai Pulung, mereka segera menggabungkan diri dengan sisa

---

<sup>260</sup> *Idem.*

<sup>261</sup> *Ibid.*, hlm.79.

pasukan Batalyon Mujayin yang bergerak dari Trenggalek menuju Ponorogo. Namun pasukan Kompi Sumadi segera mendapat tugas lagi untuk mengadakan pembersihan di daerah Somoroto dan Sampang.

Mengetahui kedatangan pasukan TNI, para pemimpin PKI, diantaranya adalah Muso dan Amir Syarifudin segera melarikan diri menuju Dungus. Tetapi karena pasukan Kompi Sempurna telah mendekati wilayah Dungus, mereka membelok ke selatan menuju lereng barat daya Gunung Wilis. Dari sana mereka berusaha merebut Ponorogo dengan pengerahan segenap kekuatan.<sup>262</sup> Sisa-Sisa pasukan PKI yang masih tersebar di beberapa daerah diminta ke Ponorogo untuk menambah kekuatan. Pagi hari tanggal 8 Oktober 1948 dengan kekuatan terdiri dari Batalyon panjang Djokopriyono, Batalyon Maladi Yusuf, Batalyon Durachman, Batalyon Musofa dan Batalyon Sidik Arselan kota Ponorogo diserang dari arah timur.<sup>263</sup> Tetapi usaha mereka menduduki Ponorogo dapat digagalkan setelah terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Brigade Mobil Polri dan pasukan siliwangi. Sisa-sisa pasukan PKI yang berhasil lolos bergerak menuju Gunung Gembes di Pacitan untuk menyelamatkan diri.

#### **b. Poros Kediri – Sawahan – Dungus – Madiun**

Gerakan dari poros Kediri - Sawahan - Dungus - Madiun dipercayakan pada Kompi Sampurno, dua kompi dari Batalyon Sabaruddin serta kompi Jarot. Gerak pasukan yang dimulai dari Sawahan menyusuri lereng Gunung Wilis menuju ke Kandangan ini tidak mengalami hambatan sama sekali dari pihak lawan, karena mereka tidak mempersiapkan pasukannya di wilayah ini.

---

<sup>262</sup> *Ibid.*, hlm.82.

<sup>263</sup> *Idem.*

Tetapi dari Kandangan menuju Dungus, Kompi Sampurno mendapat hambatan yang berarti. Ketika pasukan PKI dan tokoh-tokohnya yang berada di Madiun mulai terjepit, mereka melarikan diri ke Dungus. Dalam pelarian tersebut dibawa pula tawanan-tawanan yang semua disekap di Pabrik Gula Rejoagung dan rumah penjara Madiun, termasuk para perwira Staf SPDT yang ditawan PKI.<sup>264</sup> Basis PKI di Dungus segera di ketahui oleh Kapten Sampurno, dan Ia segera memerintahkan pasukannya untuk mengadakan operasi pembersihan. Dalam operasi pembersihan tersebut, pasukan kompi Sampurno berhasil menangkap beberapa orang pasukan PKI, merampas sejumlah mobil yang di gunakan untuk melarikan diri, dokumen-dokumen penting dan beberapa buah senjata.

### **c. Poros Nganjuk – Caruban – Madiun**

Operasi penumpasan PKI melalui Nganjuk – Caruban – Madiun merupakan poros gerakan Batalyon Sunaryadi yang terdiri dari Kompi Kardono, Kompi Dulhasim dan Kompi Warkahim. Tugas utamanya adalah melucuti pasukan Batalyon Sidik Arselan. Batalyon Sidik Arselan dari Pesindo adalah pasukan pengikut PKI yang bermarkas disebelah selatan Alun-alun Nganjuk. Batalyon Sunaryadi berhasil melusuti beberapa pasukan Sidik Arselan, namun sebagian diantaranya berhasil meloloskan diri. Tugas pasukan batalyon Sunaryadi selanjutnya adalah merebut kota Madiun melalui jalan raya Nganjuk – Wilangan – Cirebon – Madiun. Mereka diperkuat oleh pasukan Brigade Mobil Polri dibawah pimpinan Inspektur Polisi Imam Bachri.

---

<sup>264</sup> *Ibid.*, hlm.88.

Sasaran pertama yang harus direbut adalah Kecamatan Bagor.<sup>265</sup> Pada saat itu, pengikut PKI yang berada di Bagor bersiap-siap bergerak ke Nganjuk. Dalam waktu singkat Bagor bisa direbut kembali dari tangan PKI. Para pemberontak kemudian mundur ke Wilangan dan membuat pertahanan di sana. Pasukan Sunaryadi bersama dengan pasukan Brimob melakukan pengejaran. Namun karena disiplin dan ketrampilan pasukan lawan kurang memadai, pertahanannya dapat ditembus oleh pasukan Sunaryadi.<sup>266</sup> Para pengikut PKI kemudian mengundurkan diri ke arah Madiun, sedangkan pasukan Sunaryadi bersama dengan pasukan Brigade Mobil Polri menuju Saradan. Di daerah ini dijumpai perlawanan dari pasukan PKI, namun dengan mudah mereka berhasil dikalahkan.

Sisa-sisa pasukan PKI yang masih berada di Saradan melarikan diri ke Caruban, terutama pasukan Batalyon Panjang Djokopriyono dan Mursid. Di Saradan pasukan Brigade Mobil Polri berhasil menyita satu gerbong kereta api yang berisi perbelakan musuh. Batalyon Sunaryadi segera melakukan pengejaran ke Caruban dan pembersihan sisa-sisa pasukan PKI. Setelah berhasil menduduki Caruban, pasukan Batalyon Sunaryadi bergerak memasuki Madiun dengan sasaran utama menduduki Pabrik Gula Rejoagung yang dijadikan markas PKI. Sedangkan pasukan Brigade Mobil Polri ditugaskan untuk mengamankan Kantor Percetakan ORI dan penjara Madiun.

---

<sup>265</sup> *Ibid.*, hlm.91.

<sup>266</sup> *Ibid.*, hlm.92.

### C. Strategi PKI Menghadapi Operasi Penumpasan Pasukan RI

Setelah posisinya semakin terdesak, pemerintah Front Nasional mengubah sikap garis kerasnya ke garis lunak. Pada tanggal 22 September 1948 malam, Letkol Jokosuyono mengundang sejumlah komandan TNI untuk berkonferensi di Madiun. Undangan yang ditujukan kepada Panglima Pertahanan Jawa Timur, Komandan Brigade Mobil Jawa Timur dan Komandan-komandan Kesatuan Militer lainnya di Jawa Timur itu disiarkan di Radio Gelora Pemuda. Mereka diminta untuk datang di balaikota Madiun pada tanggal 24 September 1948 pukul 11.00 pagi guna merundingkan keadaan disana.<sup>267</sup> Ternyata cukup banyak komandan satuan militer yang menghadiri undangan tersebut. Beberapa diantaranya dengan sepenuh hati ingin menghadiri konferensi tersebut. Namun ada juga yang hanya sekedar ingin mengetahui bagaimana situasi sebenarnya di Madiun mengingat tanggung jawab mereka untuk mempertahankan Republik Indonesia dari serangan musuh.

Pada tanggal 23 September 1948, Amir Syarifuddin berpidato, yang ternyata merupakan pidato terakhirnya. Dia menyatakan :

“Perjuangan yang sekarang sedang kita laksanakan disini, tidak lebih dan tidak kurang daripada suatu gerakan untuk mengoreksi revolusi kita. Oleh karena itu, dasarnya tetap sama dan tidak pernah berubah. Menurut pertimbangan kami, tinggal satu revolusi bersifat nasional, yang dapat disebut suatu revolusi kaum demokrat borjuis. Undang-undang dasar kita tetap yang satu itu, bendera kita tetap sama, yaitu merah putih, sementara lagu kebangsaan kita tidak lain daripada Indonesia Raya.”<sup>268</sup>

Radio Gelora Pemuda menyiarkan pidato Amir Syarifuddin tersebut secara berulang-ulang. Tetapi keesokan harinya pasukan TNI semakin mendekati

---

<sup>267</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 257.

<sup>268</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik, op. cit.*, hlm. 171.

Madiun. Soemarsono sebagai pencetus perebutan kekuasaan di Madiun kemudian memberikan pemberitahuan yang sangat lunak. Dalam suatu pengumuman resmi yang ditanda-tanganinya sebagai Gubernur Militer di Madiun, dia menyatakan :

“Dengan ini, secara resmi kami mengumumkan bahwa pemerintah kita tidak pernah sampai pada keinginan untuk menciptakan suatu pemerintah komunis atau soviet, seperti yang sering dinyatakan oleh musuh kami. Pemerintah Madiun adalah suatu pemerintahan rakyat tingkat wilayah, dan dibentuk sebagai suatu bagian dari RI yang demokratis. Tuduhan bahwa tujuan pergerakan kita yang dimulai di Madiun adalah menenyapkan Republik, dengan ini dinyatakan palsu. Pergerakan ini hanya dimaksudkan untuk membuat suatu koreksi sempurna terhadap tujuan-tujuan politik Pemerintah Hatta dan para pemimpin lainnya yang bermaksud memihak Belanda. Seluruh rakyat Indonesia dan seluruh prajurit harus mendukung pergerakan ini jika mereka benar-benar tidak ingin mejadi budak-budak imperialis lagi.”<sup>269</sup>

Usaha para pimpinan PKI tersebut ternyata tidak mampu lagi memperbaiki keadaan. Bahkan upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam membantu perjuangan PKI sama sekali tidak berhasil. Menyadari bahwa Madiun yang dijadikan ibukota Soviet Republik Indonesia tidak dapat dipertahankan lagi, maka kekuatan induk PKI yang terdiri dari Batalyon Abdulrahman, Batalyon Musyofa, dan Batalyon Panjang dari Pesindo mundur ke basis gerilyanya di daerah Dungus dan Purwodadi.

Sebelum meninggalkan Madiun mereka telah melakukan persiapan besar-besaran untuk memindahkan alat-alat perang dan persediaan bahan makanan di daerah pegunungan. Alat-alat komunikasi yang berada di kantor telepon berhasil mereka pindahkan. Pemancar radio Gelora Pemuda dan percetakan negara juga mereka angkut. Namun belum sempat melakukan konsolidasi, mereka diserang oleh Batalyon Sabarudin yang bergerak dari Kediri. Bahan-bahan logistik, senjata-

---

<sup>269</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

senjata kaliber besar, gudang amunisi, alat transportasi, dan lain-lain sebagai bahan perlengkapan untuk persiapan melakukan perang gerilya jatuh ke tangan Batalyon Sabarudin.<sup>270</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 1948, pasukan PKI yang terdiri dari pasukan Brigade Sudiarto dan Laskar Minyak berusaha untuk mempertahankan Cepu, termasuk komplek pabrik minyak Cepu. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan PKI yang tetap ingin mempertahankan kota dan pabrik minyak dengan pasukan TNI yang ingin merebut kembali Cepu ke tangan RI. Pertempuran akhirnya dimenangkan oleh pasukan TNI setelah mendatangkan pasukan bantuan. Selanjutnya segera dilakukan gerakan pembersihan dan pengamanan komplek pabrik minyak.

Di Purwodadi PKI semakin kuat setelah batalyon Purnawi menggabungkan diri. Mereka kemudian melakukan pembumihangusan, yang tersisa hanyalah Bank Rakyat dan Kantor Perusahaan Listrik. PKI juga melakukan pengrusakan jembatan dan rel kereta api antara Wirosari dan Purwodadi. Batalyon A. Kosasih dan Batalyon Kemal Idris dibawah pimpinan Mayor Kusno Utomo bertugas untuk merebut kembali Purwodadi, Cepu, dan Pati dari tangan PKI. Purwodadi berhasil direbut oleh pasukan TNI pada tanggal 15 Oktober 1948. Sedangkan operasi penumpasan PKI di daerah Pati dilakukan pada tanggal 21 Oktober 1948 dengan cara pengepungan. Dengan cara ini Pati dapat dengan mudah direbut dari tangan pemberontak. Dua hari kemudian dilakukan aksi pemersihan yang dimulai pada pukul 03.00 pagi dengan membebaskan para tawanan PKI.

---

<sup>270</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, op. cit., hlm. 179.

**D. Tertangkapnya Muso dan para pemimpin PKI lainnya.**

Pada tanggal 30 Oktober 1948 pukul 08.00 pagi di desa Balong, seorang anggota polisi bernama Reksosudarmo dan seorang pegawai kecamatan bernama Suwarno berpapasan dengan seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan. Karena merasa penasaran maka Reksosudarmo mendekatinya dan memeriksa surat-surat keterangan orang tersebut. Namun tiba-tiba orang tersebut menodongkan pistolnya sambil menggertak “Kamu tidak tahu bahwa saya adalah Muso ?” dan langsung menembak kepala Reksosudarmo. Polisi itu tewas seketika, sedangkan Suwarno berhasil melarikan diri. Tetapi sebelum lari dia sempat melihat orang yang mengaku Muso dan menembak Reksosudarmo itu merampas sebuah dokar yang kebetulan sedang lewat.<sup>271</sup> Kusir dokar ia paksa turun dan orang itu segera mengendarai sendiri dokar rampasannya.

Pada waktu yang bersamaan, Komandan Kompi Sumadi dan Kapten Sunandar sedang dalam perjalanan ke Kreet dengan mengendarai mobil. Di desa Semanding, kira-kira 2 km sebelah selatan Sumoroto, mobil Komandan Kompi Sumadi bertemu dengan dokar yang dikusiri Muso itu sedang dikawal oleh dua orang berpakaian hitam sambil bersepeda.<sup>272</sup> Kedua pengawal tersebut memberikan isyarat pada mobil yang ditumpangi Sumadi. Namun karena tidak mengerti isyarat yang diberikan maka mobilpun berhenti. Pada saat mobil berhenti, kusir dokar yang tidak lain adalah Muso segera menembaki penumpang dalam mobil. Terjadilah baku tembak antara Komandan Kompi Sumadi dan Muso

---

<sup>271</sup> Maksum, dkk., *op. cit.*, hlm. 122-123.

<sup>272</sup> *Idem.*

dengan dibantu dua orang pengawalnya. Akhirnya Komandan Kompi Sumadi dan Kapten Sunandar mundur untuk mencari bantuan.

Muso kemudian masuk ke mobil untuk melarikan diri. Namun mesin mobil mendadak mati, sehingga Muso gagal untuk melarikan diri. Tidak ada pilihan lain bagi Muso selain masuk kampung untuk mencari tempat persembunyian. Tidak lama kemudian Letda Mustajab dan pasukannya tiba untuk membantu Komandan Kompi Sumadi. Seluruh kampung kemudian digrebeg dan Muso berhasil ditemukan oleh Komandan Kompi Sumadi sendiri.<sup>273</sup> Muso tetap tidak mau menyerahkan diri, sehingga pengepungan diperketat sampai jarak 7 meter. Terjadilah tembak-menembak antara Muso dan para pengepungnya.<sup>274</sup> Muso tetap mempertahankan dirinya meskipun hanya bersenjata pistol berkaliber 32. Dalam waktu tidak terlalu lama, Muso akhirnya tertembak mati dalam pertempuran kecil itu.

Kematian Muso bukanlah suatu petunjuk bahwa PKI sudah tertumpas habis. Sisa-sisa pasukan PKI yang masih ada di tempat-tempat persembunyiannya tetap aktif melakukan pendudukan dan pembunuhan. Pada tanggal 5 November 1948 pasukan PKI berhasil merebut kembali Sarangan. Amir Syarifuddin ikut dalam pendudukan ini. Ia bersama pasukannya kemudian menuju ke Ngrambe, salah satu pangkalan gerilya PKI yang dulu dipersiapkan oleh Biro Perjuangan.

Sementara itu, Amir Syarifuddin dan pasukannya tiba di Getas pada tanggal 12 November 1948. Jokosuyono dan Maruto Darusman turut serta dalam rombongan ini. Di Getas, sebelah selatan Randublatung mereka melakukan

---

<sup>273</sup> A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 355.

<sup>274</sup> *Ibid.*, hlm. 357.

kejahatan-kejahatan besar. Pemerintah segera memerintahkan Brigade Siliwangi untuk mematahkan pergerakan sisa-sisa kaum komunis itu. Pasukan-pasukan dari Brigade Siliwangi dikirim ke Cepu, Bojonegoro, Kunduran dan jalan perbatasan antara Ngawen dan Wirosari. Pasukan Siliwangi berhasil memukul mundur para pemberontak yang kemudian melarikan diri sambil melakukan pengrusakan, perampokan dan pemutusan kawat-kawat telepon. Dalam pertempuran di Randublatung pasukan TNI berhasil menangkap 300 orang PKI.

Pada tanggal 29 November 1948 pukul 20.00 Amir Syarifuddin dan Suripno tertangkap di desa Klambu, 20 kilometer sebelah barat laut Purwodadi dalam operasi pengejaran yang dilakukan pasukan Siliwangi. Dengan tertangkapnya Amir Syarifuddin dan Suripno maka semua pemimpin terkemuka PKI yang melakukan pemberontakan terhadap Negara RI sejak 18 September 1948 telah tertangkap atau tertembak mati dalam pertempuran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Latar belakang pemberontakan PKI di Madiun adalah situasi politik pemerintahan pusat yang mematikan ruang gerak kelompok sayap kiri, kedatangan Muso dari Moskow, dan posisi strategis Madiun untuk dijadikan medan perang gerilya. Setelah dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena melakukan pemberontakan pada tahun 1926-1927, aktivitas PKI di Indonesia benar-benar telah mati. Bahkan pada masa Pendudukan Jepang banyak kader-kader PKI yang dihukum mati. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Moh. Yusuf mencoba menghidupkan kembali PKI, namun gagal. Ketika Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan (03 Juli 1947), kelompok sayap kiri menjadikan Kementerian Pertahanan sebagai benteng kekuatan mereka. Usaha ini mengalami kegagalan karena PNI dan Masyumi menarik wakil-wakilnya dalam kabinet setelah Amir Syarifuddin menandatangani persetujuan Renville. Amir Syarifuddin juga harus menyerahkan mandat kabinet dan digantikan oleh Moh. Hatta. Dalam membentuk kabinet baru, Moh. Hatta tidak menginginkan kabinetnya didominasi oleh orang-orang komunis. Kelompok sayap kiri kemudian membentuk FDR sebagai oposisi terhadap pemerintah. Setelah Muso kembali ke tanah air, Amir Syarifuddin sebagai pimpinan FDR mengakui Muso sebagai pemimpinnya. Muso segera mengambil alih pimpinan FDR,

mendirikan PKI secara legal, menghasut para tentara yang terkena program Re-Ra Kabinet Hatta, dan berpidato di berbagai daerah mengecam revolusi Indonesia. “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” atau sering disebut dengan “Koreksi Besar Muso” menjadi sumber kekuatan PKI dalam melancarkan aksi-aksi secara parlementer maupun non-parlementer. Sesuai dengan Program FDR yang kedua, Madiun dipilih menjadi pusat pemberontakan karena daerah ini sangat strategis baik dari segi geografi, sosial, ekonomi, kepartaian, dan pemerintahan.

2. Sebelum mencetuskan pemberontakan di Madiun, PKI ternyata telah membuat persiapan yang cukup matang, baik dari segi keuangan organisasi, maupun pasukan. Tujuan dari pemberontakan PKI adalah menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Namun tidak banyak masyarakat yang mau mendukung aksi mereka. Meletusnya pemberontakan PKI di Madiun diawali dengan adanya bentrokan bersenjata antara pasukan TNI, khususnya Divisi Siliwangi dengan pasukan PKI. Bentrokan bersenjata yang terjadi di kota Solo itu bermula dari aksi culik-menculik diantara kedua belah pihak. Suasana saling tuduh-menuduh mengiringi aksi culik-menculik yang berakhir dengan pertempuran bersenjata. Pertempuran dimenangkan oleh pasukan TNI. Pasukan PKI yang terusir dari Solo menggabungkan diri dengan kelompoknya di Madiun. Kekalahan pasukan PKI di kota Solo menjadikan Madiun terbuka terhadap pengejaran pasukan TNI, sehingga mereka harus menunjukkan perlawanan. Jika PKI tidak melakukan perlawanan, maka TNI akan menghancurkan seluruh persiapan perebutan kekuasaan di Madiun. Ternyata kaum komunis di

Madiun sejak tanggal 12 September 1948 sudah melakukan perebutan kekuasaan di desa-desa. Pada tanggal 18 September 1948 perebutan kekuasaan atas seluruh Madiun ditandai dengan 3 kali tembakan pistol Soemarsono dari markasnya di pabrik gula Rejoagung, Gorang-Gareng. Dengan demikian PKI mencetuskan pemberontakan di Madiun. Pada waktu itu Muso bersama para pemimpin PKI lainnya sedang melakukan kampanye di Purwodadi untuk mencari dukungan rakyat.

3. Pemberontakan yang dilancarkan oleh pasukan PKI di Madiun memaksa pemerintah untuk segera menumpasnya. Karena jika tidak segera ditumpas maka Belanda akan memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan agresi militer II. Pasukan Divisi Siliwangi (Brigade 13 KRU-Z) yang pada waktu hijrah sedang berada di Solo mendapat tugas utama menumpas pemberontakan itu. Serangan difokuskan dari arah barat dan timur kota Madiun. Divisi Siliwangi dengan kekuatan 3 brigade menyerang dari arah barat. Sedangkan penyerang dari arah timur adalah Brigade Surakhmad. Polri, Laskar Hisbullah dan Barisan Banteng juga dikerahkan untuk mempekuat pasukan TNI. Operasi militer penumpasan PKI dilakukan melalui 3 poros gerakan. Dari arah barat adalah poros Solo – Sragen – Ngawi, Solo – Tawangmangu – Madiun, dan Solo – Wonogiri – Pacitan – Ponorogo. Sedangkan dari arah timur, poros operasinya adalah Blitar – Mojoroto – Ponorogo, Kediri – Sawahan – Dungus – Madiun dan Nganjuk – Caruban – Madiun. Dari Yogyakarta dikerahkan Brigade 12/KRU-Z untuk melakukan pengejaran terhadap para pemberontak di daerah Purwodadi, Demak, Kudus, Pati, Blora, Cepu, dan sekitarnya.

Operasi membuat para pemberontak kalang kabut. Pada tanggal 30 September 1945 Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan TNI. Jadi “Soviet Republik Indonesia” mampu bertahan selama 13 hari. Sisa-sisa pasukan PKI kemudian melarikan diri ke Dungus dan Purwodadi yang dijadikan sebagai basis gerilya. Namun pasukan TNI terus melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah yang diduduki oleh PKI. Mereka yang lolos dari pengejaran di Purwodadi kemudian berpencar mencari tempat perlindungan sendiri-sendiri. Pada tanggal 30 Oktober Muso tertembak mati dalam pertempuran dengan pasukan Kompi Sumadi di desa Semanding, kira-kira 2 km sebelah selatan Sumoroto. Sedangkan Amir Syarifuddin, Suripno, dan beberapa tokoh PKI lainnya tertangkap pada tanggal 29 November 1948 di desa Klambu, 20 kilometer sebelah barat laut Purwodadi.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku :**

- Abdoerraoef. 1971. *Komunisme Dalam Toeri dan Praktek*. Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Abdul Syukur, dkk. 2005. *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar jilid 8*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- David Charles Anderson. 2003. *Peristiwa Madiun 1948 : Kudeta atau Konflik Internal Tentara?*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Dipa Nusantara Aidit. 1960. *Pilihan Tulisan D. N. Aidit*. Jakarta. Yayasan Pembaruan.
- Disjarahdam VI Siliwangi. 1979. *Siliwangi dari Masa ke Masa*. Bandung : Angkasa.
- Djamil Marsudi. 1965. *Menyingkap Tabir Fakta-Fakta Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun*. Jakarta : Merdeka Press.
- Ebenstein, William dan Edwin Fogelman. 1987. *Isme-Isme Dewasa Ini*. Jakarta : Erlangga.
- Fadli Zon dan Muhammadiyah Halwan Aliuddin, (ed). 2005. *Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948*. Jakarta : Komite Waspada Komunisme.
- Goenawan Moehammad. 1983. *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan.
- Gootschalk, Louis. 1988. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press.

- Hersri Setiawan. 2002. *Negara Madiun? : Kesaksian Sumarsono Pelaku Perjuangan*. Jakarta : FusPAD.
- Himawan Soetanto. 1994. *Perintah Presiden Soekarno : "Rebut Kembali Madiun..."*. Jakarta : PT Pustaka Sinar Harapan.
- . 2006. *Madiun : Dari Republik ke Republik*. Jakarta : PT Kata Hasta Pustaka.
- Imam Soedjono. 2006. *"Yang Berlawanan" : Menyingkap Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*. Yogyakarta : Resist Book.
- Judojono. 1966. *Apakah Komunisme Itu? : Bahan-Bahan Indoktrinasi Untuk Dekomunisasi*. Solo : Muhaco.
- Kahin, George Mc.Turnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka Sinar Harapan.
- Komisi CC PKSU (B). 1956. *Sejarah Partai Komunis Soviet Uni (Bolsevik)*. Jakarta : Yayasan Pembaruan.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Jilid 1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- . 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Jilid 2* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Magnis Suseno, Frans. 1977. *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*. Jakarta : STF Driyarkara.

- Maksum, dkk. 1990. *Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Maswadi Rauf. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik : Sebuah Studi Penjajagan Teoritis*. Jakarta : Depdiknas.
- Merle Calvin Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.
- Miriam Budiarto. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Moedjanto, Gregorius. 1988. *Indonesia Abad ke-2 Jilid 1*. Yogyakarta : Kanisius.
- , 1988. *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*. Yogyakarta : Kanisius.
- Nasution, Abdul Haris. 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948*. Bandung : Disjarah AD dan Angkasa.
- Onghokham. 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta : PT Grafitas.
- NN. 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 9*. Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka.
- , 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 10*. Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka.
- , 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12*, Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka.
- Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. 1995. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta : Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Pinardi. 1967. *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*. Jakarta : Inkopak-Hazera.

Program Studi Pendidikan Sejarah. 2003. *Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Balai Pustaka.

Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. 1995. *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia jilid I : Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia(1913-1948)*. Jakarta : Yayasan Telapak.

-----, 1995. *Bahaya Laten Komunisme di Indoensia jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)*. Jakarta : Yayasan Telapak.

Ramlan Subakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rommelink, Willem G.J. .1982 . *Sejarah Cina : Ikhtisar Sejarah dan Kebudayaan Cina dari Zaman Prasejarah sampai Masa Kini*. Yogyakarta : Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM.

Rudolf Gerzon Djopari, Johannes. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta : PT Grasindo.

Sartono Kartodirjo, dkk. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5*. Jakarta : PT Balai Pustaka.

-----, 1922. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI : Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta : PT Cipta Lamtoro Gung Persada.

Setyohadi, Tuk. 2002. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*.

Jakarta : CV Rajawali Corporation.

Simanjuntak, P.N.H. .2003. *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta : Djambatan.

Sutarjo Adisusilo J.R., (ed). 2003. *1938 : Ngablak dan Dunia dalam Perspektif Sejarah*. Universitas Sanata Dharma : Yogyakarta.

Warin Diya Sukisman. 1992. *Sejarah Cina Kontemporer (Dari Nur Ha Ci sampai Deng Xiao Ping)*. Jakarta : Pradnya Paramita.

**Internet :**

<http://media.isnet.org/iptek/100/Mao.html>. 13 April 2007 pukul 14.35.

<http://www.kompas.com./kompas-cetak/0004/17/nasional/marx07.htm>. 13 April 2007 pukul 14.35.

[http://swaramuslim.net/galery/sejarah/index.php?page=madiun\\_affair](http://swaramuslim.net/galery/sejarah/index.php?page=madiun_affair), 25 Januari 2008 pukul 10.51.

**Lampiran 1**  
**Susunan Kabinet Amir Sjarifuddin**  
**(Sebelum Reshuffle)**

**I. Pimpinan Kabinet**

1. Perdana Menteri : Mr. Amir Sjarifuddin (P. Sosialis)
2. Wakil Perdana Menteri : Dr. A.K. Gani (PNI)
3. Wakil Perdana Menteri : Setiadjud (PBI)

**II. Anggota Kabinet**

4. Menteri Dalam Negeri : W. Wondoamiseno (PSII)
5. Menteri Luar Negeri : H. Agoes Salim
6. Menteri Kemakmuran : Dr. A.K. Gani (PNI)
7. Menteri Pertahanan : Mr. Amir Sjarifuddin (P. Sosialis)
8. Menteri Pengajaran : Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI)
9. Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis (PNI)
10. Menteri Penerangan : Ir. Setiajadi
11. Menteri Perhubungan : Ir. Djuanda
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Moh Enoch
13. Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena (Parkindo)
14. Menteri Sosial : Soeprodjo (PBI)
15. Menteri Kehakiman : Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI)
16. Menteri Agama : Kyai Achmad Asj'ari (PSII)
17. Menteri Perburuhan : Ny. S.K. Trimurty (PBI)
18. Menteri Negara : Sri Sultan Hamengku Buwono IX
19. Menteri Negara : Wikana (Badan Kongres Pemuda)
20. Menteri Negara : Sujas (BTI)
21. Menteri Negara : Siauw Giok Tjhan
22. Menteri Negara : Mr. Hindromartono (P. Sosialis)
23. Menteri Negara : Drs. Maroeto Darusman (PKI)
24. Menteri Muda Dalam Negeri : Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat (P. Sosialis)
25. Menteri Muda Luar Negeri : Mr. Tamzil (P. Sosialis)
26. Menteri Muda Kemakmuran I : I.J. Kasimo (PKRI)
27. Menteri Muda Kemakmuran II : Dr. A. Tjokronegoro (P. Sosialis)
28. Menteri Muda Pertahanan : Asroedji Kartawinata (PSII)
29. Menteri Muda Keuangan : Dr. Ong Eng Djie (P. Sosialis)
30. Menteri Muda Penerangan : Sjahboedin Latif (PSII)
31. Menteri Muda Pekerjaan Umum: Ir. H. Laoh (PNI)
32. Menteri Muda Kesehatan : Dr. Satrio (PBI)
33. Menteri Muda Sosial : Sukoso Wirjosaputro (PSII)
34. Menteri Muda Perburuhan : Mr. Wilopo (PNI)

Sumber : Simanjuntak, P.N.H., 2003, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, Jakarta, Djambatan, hlm. 52-53.

**Lampiran 2**  
**Susunan dan Program Kabinet Amir Sjarifuddin**  
**(Sesudah Reshuffle)**

**I. Pimpinan Kabinet**

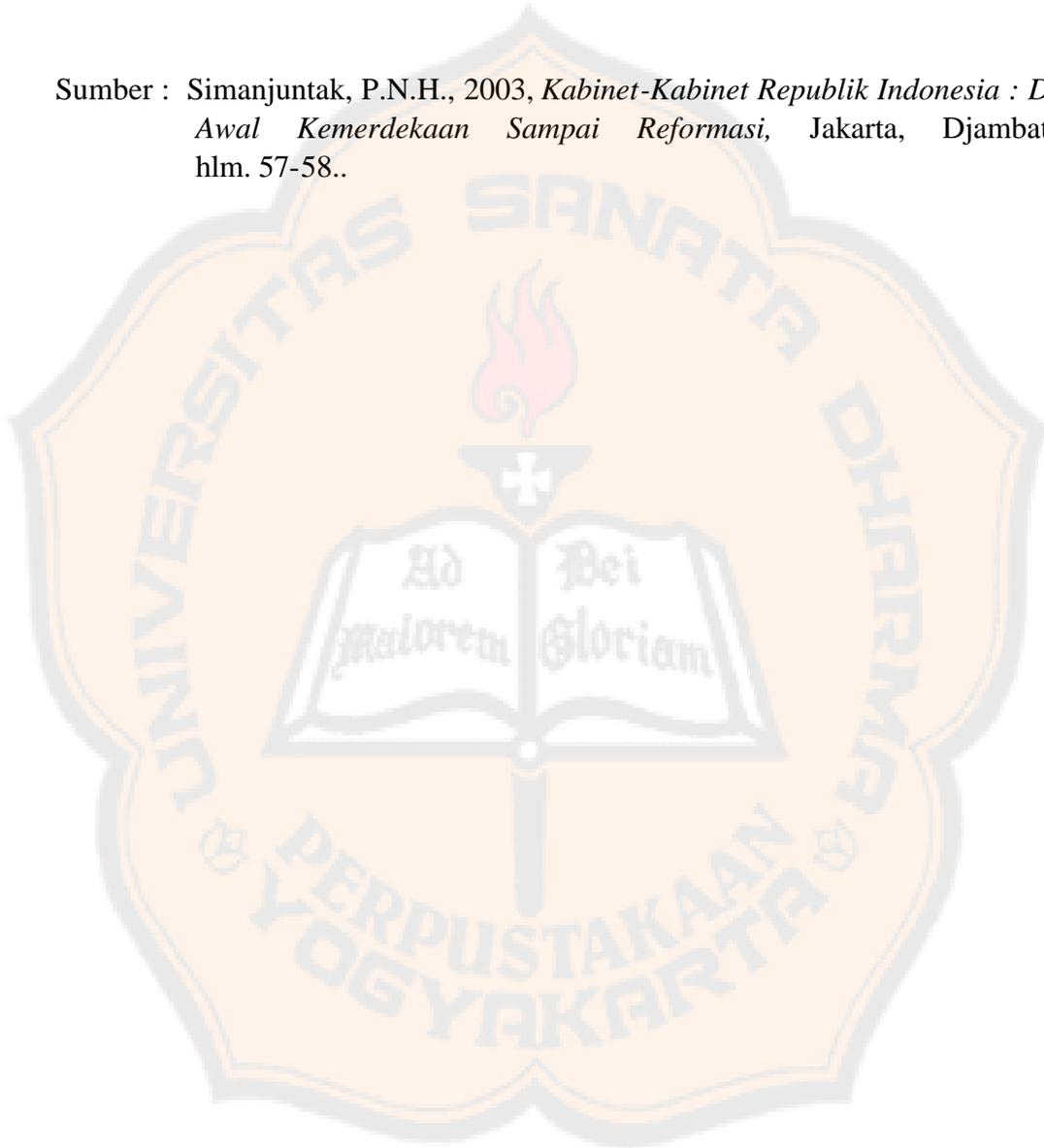
1. Perdana Menteri : Mr. Amir Sjarifuddin (P. Sosialis)
2. Wakil Perdana Menteri I : Mr. Sjamsoedin (Masjumi)
3. Wakil Perdana Menteri II : W. Wondoamiseno (PSII)
4. Wakil Perdana Menteri III : Setiadjid (PBI)
5. Wakil Perdana Menteri IV : Dr. A.K. Gani (PNI)

**II. Anggota Kabinet**

6. Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh. Roem (Masjumi)
7. Menteri Luar Negeri : H. Agoes Salim
8. Menteri Kemakmuran : Dr. A.K. Gani (PNI)
9. Menteri Pertahanan : Mr. Amir Sjarifuddin (P. Sosialis)
10. Menteri Pengajaran : Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI)
11. Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis (PNI)
12. Menteri Penerangan : Sjahboedin Latief (PSII)
13. Menteri Perhubungan : Ir. Djuanda
14. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. H. Laoh (PNI)
15. Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena (Parkindo)
16. Menteri Sosial : Soeprodjo (PBI)
17. Menteri Kehakiman : Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI)
18. Menteri Agama : K.H. Masjkoer (Masjumi)
19. Menteri Perburuhan : Ny. S.K. Trimurty (PBI)
20. Menteri Negara : Sri Sultan Hamengku Buwono IX
21. Menteri Negara Urs. Pemuda : Wikana (Badan Kongres Pemuda)
22. Menteri Negara Urs. Makanan : Sujas (BTI)
23. Menteri Negara Urs. Peranakan : Siauw Giok Tjhan
24. Menteri Negara Urs. Kepolisian : Mr. Hindromartono (P. Sosialis)
25. Menteri Negara : Drs. Maroeto Daroesman (PKI)
26. Menteri Negara : Anwar Tokroaminoto (Masjumi)
27. Menteri Muda Dalam Negeri : Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat (P. Sosialis)
28. Menteri Muda Luar Negeri : Mr. Tamzil (P. Sosialis)
29. Menteri Muda Kehakiman : Mr. Kasman Singodimedjo (Masjumi)
30. Menteri Muda Kemakmuran I : I.J. Kasimo (PKRI)
31. Menteri Muda Kemakmuran II : Dr. A. Tjokronegoro (P. Sosialis)
32. Menteri Muda Pertahanan : Aroedji Kartawinata (PSII)

- 33. Menteri Muda Keuangan : Dr. Ong Eng Djie (P. Sosialis)
- 34. Menteri Muda Penerangan : Ir. Setiadi (P. Sosialis)
- 35. Menteri Muda Kesehatan : Dr. Satrio (PBI)
- 36. Menteri Muda Sosial : Soekotjo Wirjosapoetro (PSII)
- 37. Menteri Muda Perburuhan : Mr. Wilopo (PNI)

Sumber : Simanjuntak, P.N.H., 2003, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, Jakarta, Djambatan, hlm. 57-58..



**Lampiran 3**  
**Susunan Kabinet Hatta**

**I. Pimpinan Kabinet**

1. Perdana Menteri : Drs. Mohammad Hatta

**II. Anggota Kabinet**

2. Menteri Dalam Negeri ad interim : Dr. Soekiman Wirjosandjojo  
(Masjumi)
3. Menteri Luar Negeri : H. Agoes Salim
4. Menteri Pertahanan ad interim : Drs. Mohammad Hatta
5. Menteri Kehakiman : Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI)
6. Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis (PNI)
7. Menteri Kemakmuran : Mr. Sjarifuddin Prawiranegara  
(Masjumi)
8. Menteri Persediaan Makanan  
Rakyat : I.J. Kasimo (PKRI)
9. Menteri Pendidikan, Pengajaran  
& Kebudayaan : Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI)
10. Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena (Parkindo)
11. Menteri Agama : K.H. Masjkoer (Masjumi)
12. Menteri Perburuhan & Sosial : Koesnan (PGRI)
13. Menteri Pembangunan &  
Pemuda : Soepeno (PSI)
14. Menteri Perhubungan : Ir. Djuanda
15. Menteri Pekerjaan Umum  
ad interim : Ir. Djuanda
16. Menteri Penerangan : Mohammad Natsir (Masjumi)
17. Menteri Negara Koordinator  
Keamanan Dalam Negeri : Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Sumber : Simanjuntak, P.N.H., 2003, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, Jakarta, Djambatan, hlm. 63-64.

#### Lampiran 4

#### Pidato Presiden Soekarno

Pendengar-pendengar sekalian. Rakyat Indonesia yang kucinta.

Kemarin saya berbicara kepada saudara-saudara, sekarang saya terpaksa berbicara lagi.

Dengarkanlah !

Pada saat ini tanah air kita mengalami suatu percobaan besar, selagi kita sedang bersengketa dengan Belanda, yang menghendaki persatuan rakyat yang bulat di belakang pemerintah supaya kedudukan kita dalam persengketaan itu menjadi kuat, selagi kepentingan negara menghendaki persatuan rakyat, dipecahkan persatuannya oleh pengacau-pengacau.

Perjuangan politik yang sehat, memang dikehendaki untuk menyuburkan demokrasi kita. Memang dengan tegas pemerintah, dengan ucapan Wakil Presiden dalam Badan Pekerja tanggal 16 bulan ini, mengatakan bahwa pemerintah menghormati segala macam ideologi, bahwa ideologi, betapapun juga coraknya, tidak akan ditindas oleh pemerintah, tetapi segala tindakan anarki, dari manapun datangnya, dan kekacauan-kekacauan yang membahayakan negara dan mengganggu keselamatan umum, akan dibasmi.

Pemerintah hanya akan menunjukan tindakan corrective kepada pengacau-pengacau yang membahayakan negara dan membahayakan keselamatan umum.

Tindakan mengacau itu tidak sedikit terjadi pada waktu yang terakhir ini. Nyatalah sekali bahwa tindakan itu dikemukakan oleh lebih dari satu dalang, yang satu sama lain barangkali tidak ada hubungannya, tetapi mereka bersatu dalam tujuannya, yaitu merobohkan Pemerintah RI.

Nyata sekali, bahwa atujuan pengacau-pengacau itu ialah menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, dengan menggedor rakyat, memanaskan hati rakyat dan sebagainya, supaya kepercayaan kepada pemerintah menjadi hilang.

Alat-alat kekuasaan pemerintah dicobanya dihasut dan dipengaruhinya guna menyukarkan kehidupan di masa sekarang. Tentara yang sejak dahulu berada di daerah pedalaman diadu-domba terhadap tentara laut. Tentara hendak dipecah-belah supaya lumpuh, agar mereka gampang merobohkan pemerintah.

Dalam Divisi IV di Solo dapat masuk beberapa elemen pengacau itu, yang dikepalai oleh Yadau dan Suyoto. Kedua-duanya dari tentara laut yang dibubarkan, karena tidak ada gunanya. Akhirnya terjadi bentrokan antara kedua bahagian tentara di Solo itu.

Sebenarnya bentrokan ini mudah dipadamkan dan didamaikan, tetapi kaum pengacau tidak menghendakinya. Mereka menghasut terus. Bentrokan ini hendak dijadikan soal politik dan pertentangan politik.

Disini dengan tegas kami katakan, bahwa opsir-opsir seperti Yadau dan Suyoto itu dipecat dari tentara.

Saudara-saudara, sekarang kami perlu lagi memberitahukan kepada saudara-saudara, suatu peristiwa yang lebih penting lagi kepada saudara-saudara.

PKI Muso adakan coup.

Kemarin pagi PKI Muso, mengadakan coup, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun, dan mendirikan disana suatu pemerintahan Sovyet, dibawah pimpinan Muso. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh Pemerintah RI.

Nyata dengan ini, bahwa peristiwa Solo dan Madiun itu tidak berdiri sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan untuk merobohkan Pemerintah RI.

Buat itu digunakan kesatuan dari Brigade XXIX, bekas lasykar, di bawah pimpinan Letkol Dahlan. Selain itu, Dahlan telah berkhianat kepada negara dan melanggar sumpah tentara.

Dahlan ini kami pecat dari tentara.

Saudara-saudara, camkanlah benar-benar, apa artinya yang telah terjadi itu ! Negara RI hendak direbut oleh PKI Muso.

Rakyat yang kucintai,

Atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka, aku berseru padamu : Pada saat yang begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri, dan kita adalah memilih antara 2 : “Ikut Muso dengan PKI-nya, yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Sukarno-Hatta yang Insya Allah dengan bantuan Tuhan, akan memimpin Negara RI yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apapun juga.”

Supaya percaya, bahwa rakyat Indonesia yang sudah sekian lama berjuang untuk mencapai kemerdekaannya, tidak akan ragu-ragu dalam menentukan sikapnya.

Dan jika tidak ragu-ragu, berdirilah di belakang kami, dan pemerintah sekarang yang sah, bertindaklah dengan tidak ragu-ragu pula.

Bantulah pemerintah, engkau anak-anak pemerintah dengan segenap tenaga akan memberantas semua bentrokan dan mengembalikan pemerintahan yang sah, di daerah yang bersangkutan.

Rebut kembali Madiun !

Madiun harus lekas di tangan kita kembali !

Bersama ini juga kami umumkan, bahwa semua perusahaan yang vital di manapun, sebagai : pos, telefon, telegrap, kereta api, gas dan listrik, pabrik-pabrik negara yang menghasilkan minyak, gula, tekstil dan banyak lagi lain, sekarang dimiliterisir, dan terhadap semua pegawai yang bekerja disitu, berlaku undang-undang dan peraturan militer.

Saudara-saudara, kami tahu, bahwa fihak FDR sejak beberapa waktu yang akhir ini melakukan penindasan jiwa yang sistimatis kepada buruh, tani, pemuda, pegawai, rakyat, yang dilakukannya secara intimidasi dan ancaman.

Jika saudara-saudara betul-betul mau membela kebenaran, jangan takut kepada gertak dan ancaman. Berjuang dan bergeraklah bersama dengan pemerintah dan alat-alat pemerintah untuk kemerdekaan diri saudara dari perasaan takut, dan untuk mencapai demokrasi yang sebenar-benarnya, dimana tidak ada paksaan dan ancaman.

Buruh yang jujur, tani yang jujur, pemuda yang jujur, rakyat yang jujur, janganlah memberikan bantuan kepada kaum pengacau itu.

Jangan tertarik oleh siulan mereka !

Dengan penculikan yang berlaku waktu yang akhir ini, dan dengan coup yang terjadi di Madiun itu, maka terbukalah kedok Front Demokrasi Rakyat PKI yang memang telah lama merancang akal sistimatis untuk merobohkan pemerintah.

Dengarlah betapa jahatnya rencana mereka itu !

Dalam rencana mereka yang mereka susun sejak bulan Februari yang baru lalu, pasal 11 menyebut :

Untuk menyampaikan cara-cara tersebut pasal 6, yaitu "Actie legal", maka tindakan "illegal" tetap nyata harus segera dilakukan.

- a. Supaya menimbulkan kekacauan dimana-mana selama "kabinet Masyumi" masih memegang tampuk pimpinan pemerintahan dengan cara menggerakkan segenap organisasi jahat, supaya giat melakukan penggedoran, pencurian di waktu malam dan siang hari. Polisi belum kuat untuk menghadapi semua itu.

Keterangan :

Apabila semua itu dapat dijalankan dengan teliti dan rapih, maka seluruh rakyat akan selalu ketakutan; akhirnya pemerintah tidak dapat kepercayaan.

- b. Tindakan keras (kalau perlu penculikan) terhadap orang-orang yang melawan rencana Front Demokrasi Rakyat, termasuk mereka yang melepaskan diri dari sayap kiri, Partai Buruh Merdeka dan lain-lain.

Saudara-saudara !

Demikian sebagian dari rencana yang mereka susun semenjak bulan Pebruari tahun ini.

Bangkitlah, bangsaku !

Pemimpin-pemimpin FDR dahulu dengan tergesa-gesa telah memberitahukan, bahwa program mereka itu dipalsukan oleh lawan mereka. Tetapi Kejadian-kejadian yang akhir ini membuktikan dengan nyata, bahwa program itu sebenar-benarnya, seperti yang terjadi sebagai penculikan dan lain-lain sebagainya, cocok benar dengan program itu.

Maka oleh karena itu, saudara-saudara bangsaku, bangkitlah !

Pemerintah kita mau dirobohkan oleh pengacau yang tidak sabar menunggu putusan rakyat pada pemilihan umum.

Negara kita mau dihancurkan.

Mari kita basmi bersama-sama pengacau-pengacau itu.

Mari kita datangkan kembali keadaan yang aman ke bawah pimpinan pemerintah.

Mari, jangan ragu-ragu!

Insy Allah, kita pasti menang !

Sekian.

Sekali merdeka, tetap merdeka !

Sumber : Nasution, Abdul Haris, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948*, Bandung, Disjarah AD dan Angkasa, hlm. 243-246.

## Lampiran 5

### Pidato Muso

“Pada tanggal 18 September 1948 rakyat daerah Madiun telah memegang kekuatan negara dalam tangannya sendiri. Dengan begitu rakyat Madiun telah melaksanakan kewajiban revolusi nasional kita, bahwa ia seharusnya dipimpin oleh rakyat sendiri dan bukan oleh kelas lain.

Sudah 3 tahun revolusi nasional kita berjalan di bawah pimpinannya kaum borjuis-nasional, yang bersifat goyang menghadapi imperialis seumumnya dan terhadap Amerika khususnya. Inilah sebab yang terakhir bahwa keadaan ekonomi dan politik dalam Republik semuanya mejadi terus-menerus buruk.

Dengan begitu rakyat semuanya, kaum buruh dan tani khususnya, sama sekali tak dapat membedakan keadaan sekarang ini daripada keadaan selama zaman Belanda dan Jepang.

Sebaliknya, anasir-anasis yang memerintah telah memakai revolusi kita sebagai kuda-kudaan untuk menguntungkan diri. Mereka sewaktu pendudukan Jepang telah menjadi quisling-quisling, budak-budak Jepang, tukang jual romusha dan propagandis-propagandis Heiho. Lebih dari 2 milyon wanita Indonesia telah menjadi janda lantaran lakinya menjadi romusha. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali pada imperialis Amerika !

Sukarno dengan memakai alasan-alasan palsu telah menuduh FDR dan PKI sebagai tukang pengacau dan lain-lain.

Lupakah Sukarno bahwa ia di Solo telah memakai kaum pengkhianat Trotskis untuk melakukan penculikan-penculikan dan teror terhadap orang-orang komunis ???

Lupakah Sukarno dkk, bahwa ia telah membantu dan mengesahkan kejahatan-kejahatan Siliwangi dan kaum teroris itu ???

Apakah maksud Sukarno dkk., ex-pedagang romusha, dengan melepaskan penjahat-penjahat Trotskis Tan Malaka dkk, yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya.

Dalam 3 tahun ini teranglah pula bahwa Sukarno-Hatta romusha verkopers, quislings, telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda, Inggris dan sekarang juga akan menjual Indonesia dan rakyat pada imperialis Amerika.

Bolehkah orang-orang semacam itu bilang, bahwa mereka mempunyai hak yang sah untuk memerintah Republik kita ???

Rakyat Indonesia tidak butuh.

Rakyat belum lupa semboyan-semboyan Sukarno.

Mereka mengerti, bahwa kaum dagang romusha tak becus memerintah negara. Oleh karena itu, rakyat Madiun dan juga di daerah-daerah lain sekarang akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis itu. Sukarno seama membudak Jepang telah bilang: “Untuk Inggris; linggis, untuk Amerika: seterika!” Rakyat belum lupa ini!!!

Bukan Sukarno, bukan Hatta yang melawan Belanda, Inggris dan Amerika sekarang ini, tetapi rakyat Indonesia sendiri !!!

Berhubung dengan itu, kejadian di Madiun dan lain-lain tempat, untuk rakyat seluruh Indonesia adalah sinyal untuk merebut kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Inilah jaminan satu-satunya, bahwa Republik kita akan berdaulat benar-benar, dan akan cakap menghadapi serangan-serangan dari luar dan untuk selama-lamanya melepaskan diri dari bujang-bujang imperialisme itu.

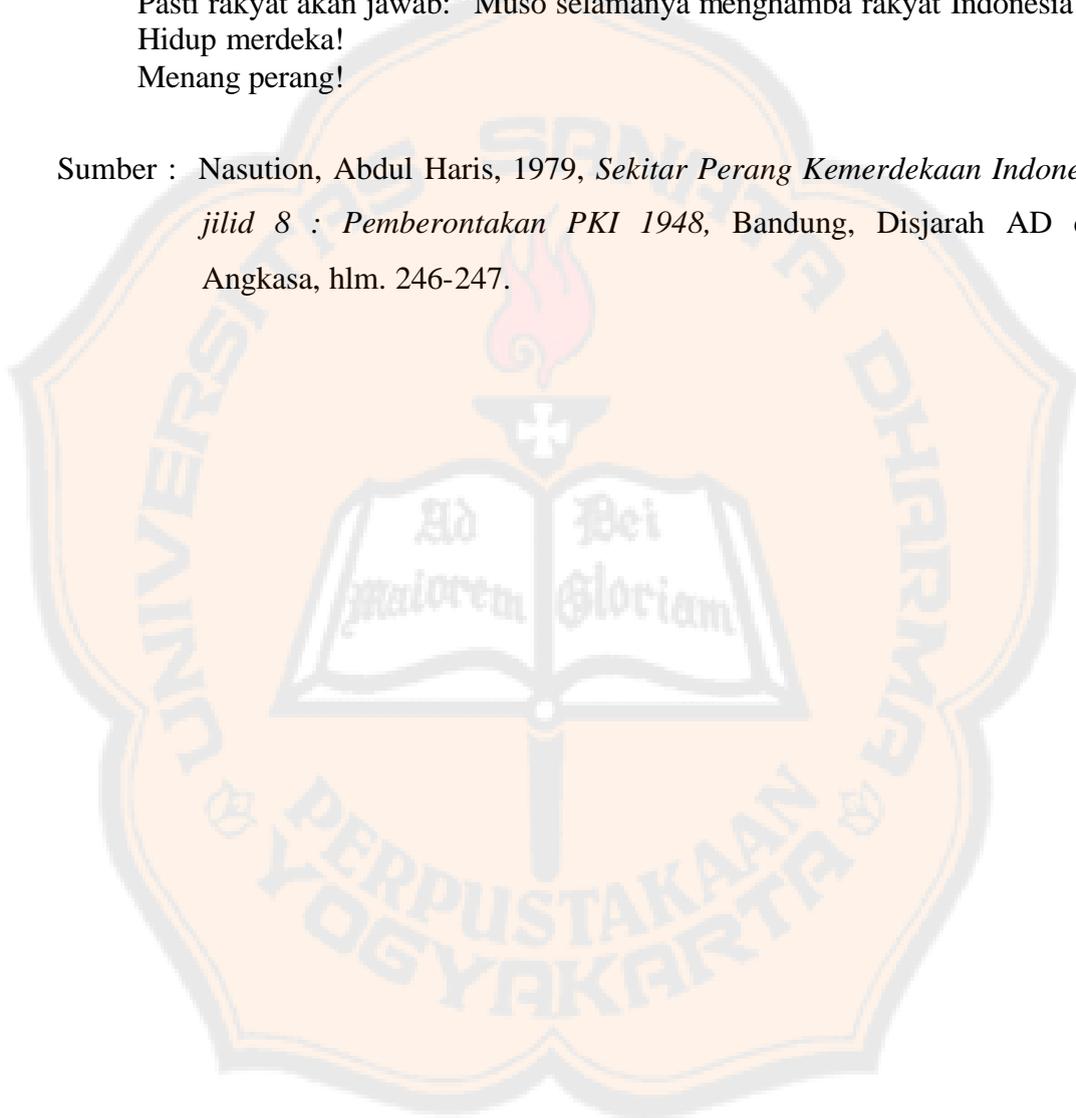
Rakyat seharusnya menjawab : “Sukarno-Hatta, budak-budak Jepang dan Amerika ! Memang ciri wanci lali ginowo mati“!

Pasti rakyat akan jawab: “Musu selamanya menghamba rakyat Indonesia”!

Hidup merdeka!

Menang perang!

Sumber : Nasution, Abdul Haris, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948*, Bandung, Disjarah AD dan Angkasa, hlm. 246-247.



**Lampiran 6**

**Undang-undang Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada  
Presiden Dalam Keadaan Bahaya**

**Presiden Republik Indonesia**

Menimbang :

bahwa untuk menjamin keselamatan negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak pada dewasa ini, perlu diberikan kekuasaan penuh (plein pouvoir) kepada Presiden;

Mengingat :

Pasal 12 Undang-undang Dasar dan Undang-undang Keadaan Bahaya tertanggal 6 Juni 1946 no. 6;

Mengingat pula :

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat,

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Undang-undang Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya.

Satu-satunya pasal

Selama tiga bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 1948 kepada Presiden diberikan kekuasaan penuh (plein pouvoir) untuk menjalankan tindakan-tindakan dan peraturan-peraturan, dengan menyimpang dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, guna menjamin keselamatan negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 20 September 1948

Presiden Republik Indonesia,

Sukarno

Menteri Dalam Negeri a.i.

Menteri Pertahanan a.i.

Sukiman

Moh. Hatta

Menteri Kehakiman

Susanto Tirtoprojo

Diumumkan  
Pada tanggal 20 September 1948

Sekretaris Negara

A.G. Pringgodigdo

Kami harap Badan Pekerja sudi menerimanya dengan selekas-lekasnya, agar supaya pemerintah mendapat pegangan untuk mengatasi segala kemungkinan.

Sumber : Nasution, Abdul Haris, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948*, Bandung, Disjarah AD dan Angkasa, hlm. 251-252.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



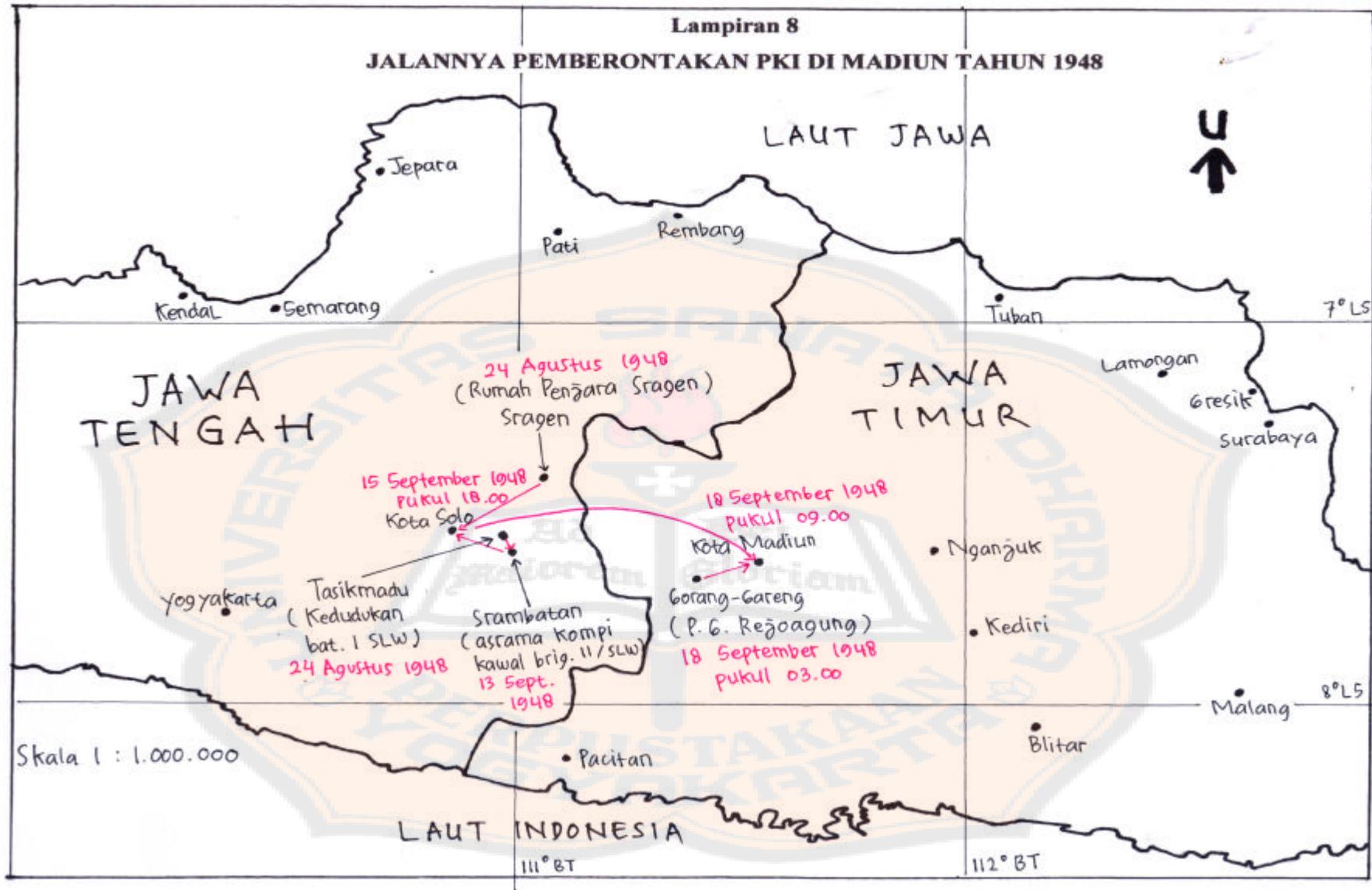
Sumber :

Peta geografis : Achmad Chaldun, 1989, *ATLAS : IPS, Indonesia Wawasan Nusantara dan Dunia*, PT Karya Pembina Swajaya, Surabaya, hlm. 29-30.

Peta historis : Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)*, Yayasan Telapak, Jakarta.

Catatan : Detail warna merah yang menunjukkan daerah komunis dibuat sendiri oleh penulis berdasarkan sumber peta historis diatas.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



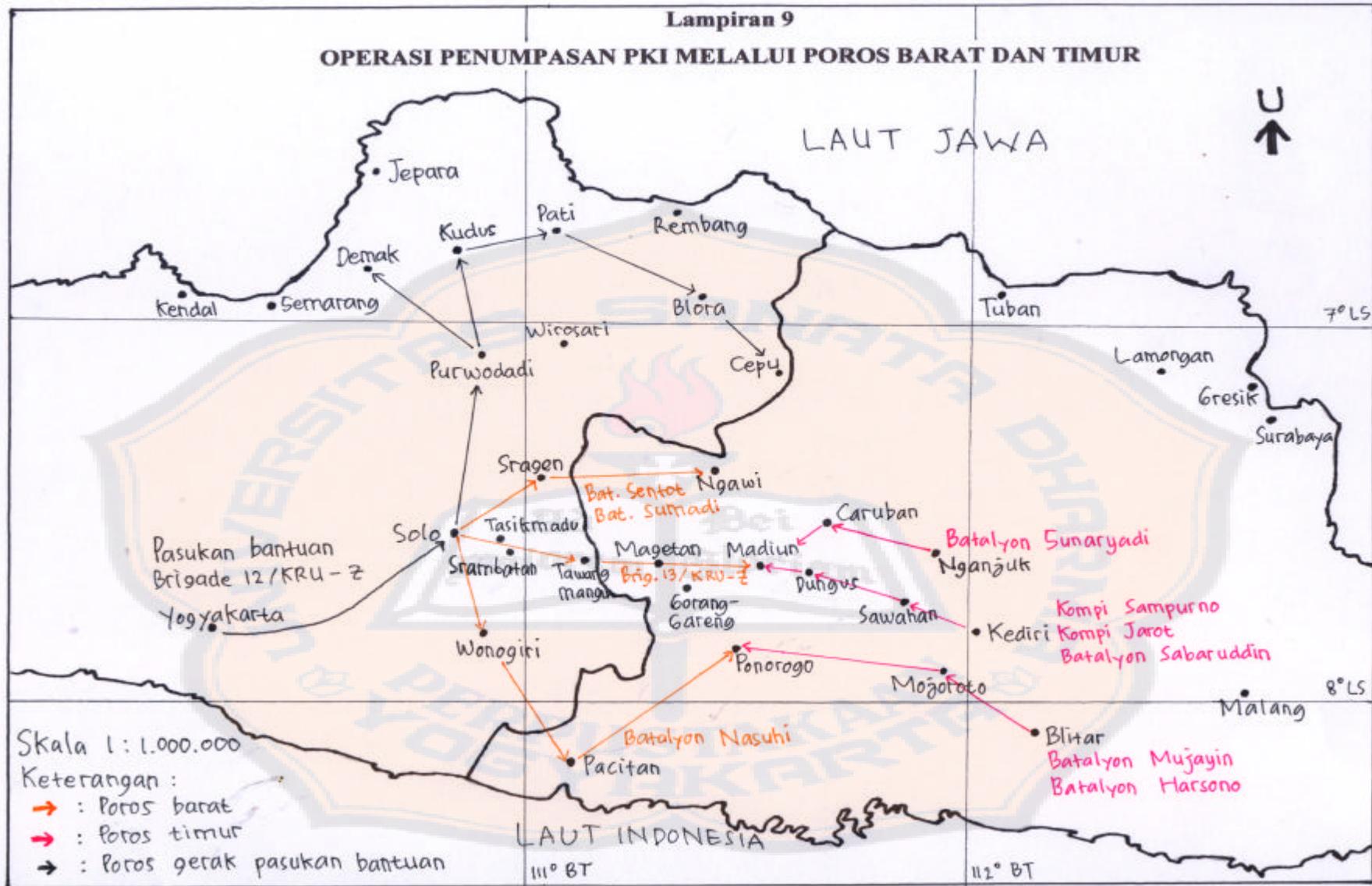
Sumber :

Peta geografis : Achmad Chalduh, 1989, *ATLAS : IPS, Indonesia Wawasan Nusantara dan Dunia*, PT Karya Pembina Swajaya, Surabaya, hlm. 29-30.

Peta historis : A. H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948*, Disjarah AD dan Angkasa, Bandung.

Catatan : Detail anak panah, tanggal, bulan dan tahun pada peta dibuat sendiri oleh penulis berdasarkan sumber peta historis diatas.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



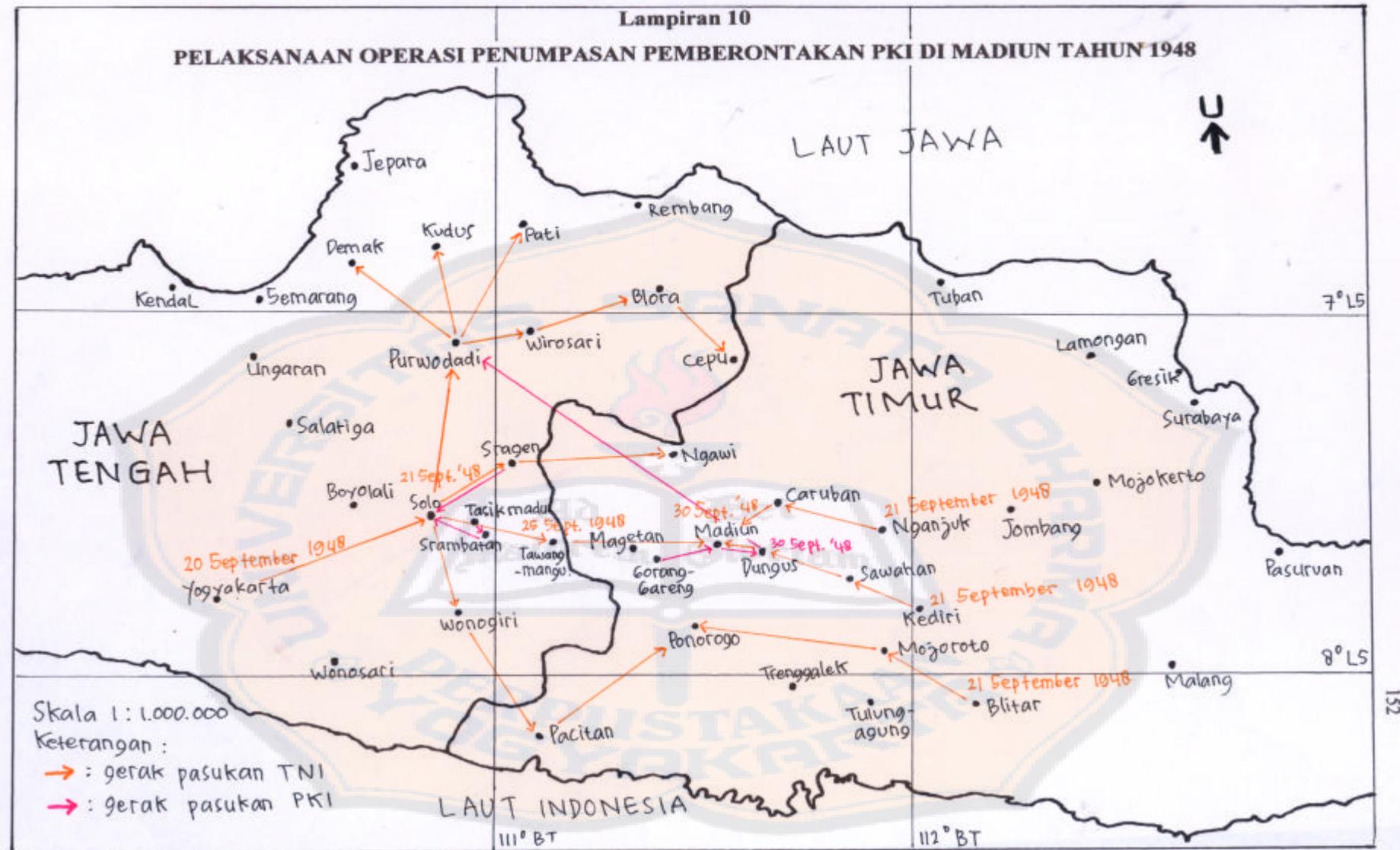
Sumber :

Peta geografis : Achmad Chaldun, 1989, *ATLAS : IPS, Indonesia Wawasan Nusantara dan Dunia*, PT Karya Pembina Swajaya, Surabaya, hlm. 29-30.

Peta historis : Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)*, Yayasan Telapak, Jakarta.

Catatan : Detail warna, anak panah dan nama-nama pasukan dibuat sendiri oleh penulis berdasarkan sumber peta historis diatas.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

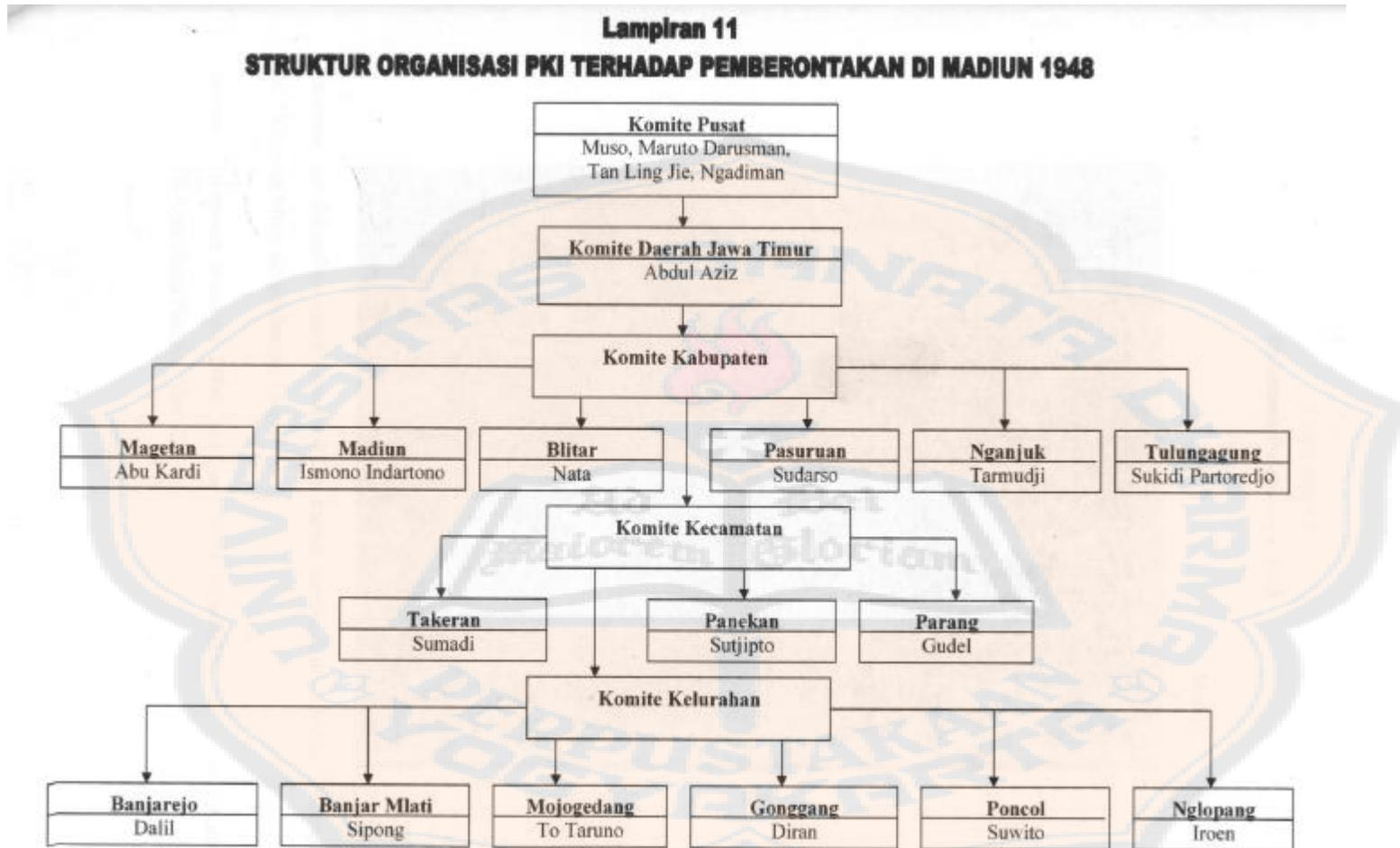


Sumber :

Peta geografis : Achmad Chaldun, 1989, *ATLAS : IPS, Indonesia Wawasan Nusantara dan Dunia*, PT Karya Pembina Swajaya, Surabaya, hlm. 29-30.

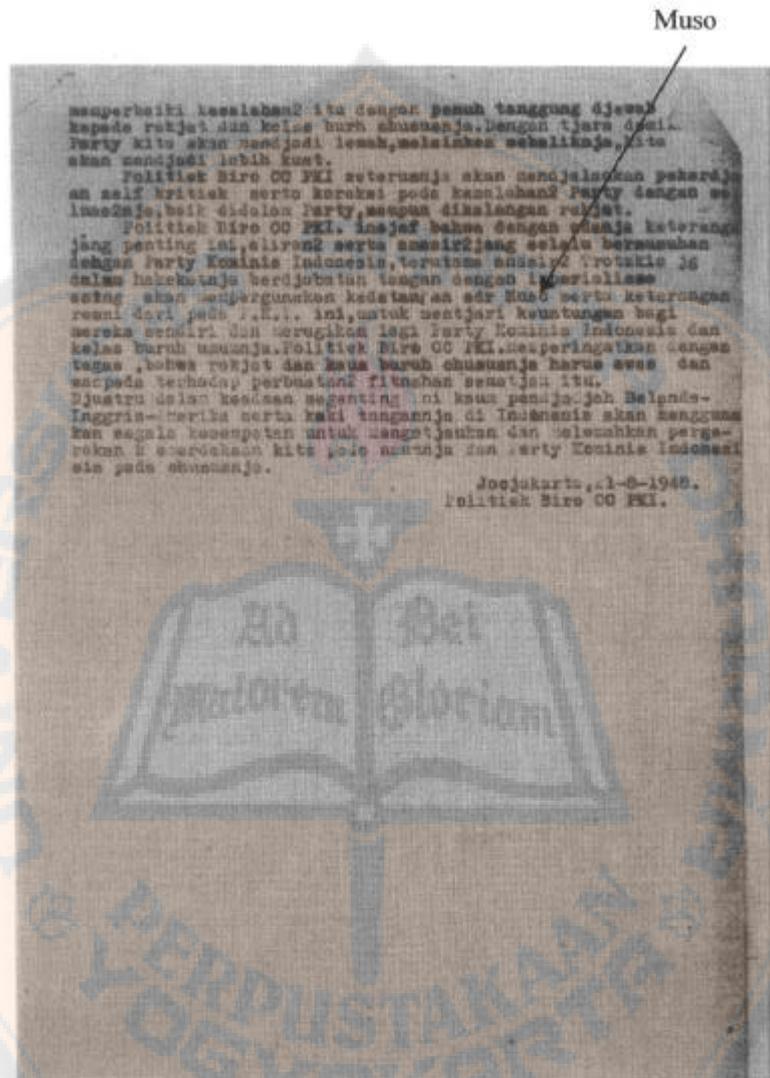
Peta historis : Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)*, Yayasan Telapak, Jakarta.

Catatan : Detail warna, anak panah, tanggal, bulan dan tahun pada peta dibuat sendiri oleh penulis berdasarkan sumber peta historis diatas.



Sumber : Maksu, Agus Sunyoto, dan A. Zainuddin, 1990, *Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Lampiran 12  
 Dokumen Politbiro CC PKI



Lampiran ini digunakan untuk menunjukkan bahwa berdasarkan dokumen Politbiro CC PKI nama Muso ditulis dengan 1 huruf s.

Sumber : Himawan Soetanto, 2006, *Madiun : Dari Republik ke Republik*, Jakarta, PT Kata Hasta Pustaka, hlm. 222.

Lampiran 13

Paspor Muso

Soeparto



Lampiran ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Muso bisa kembali lagi ke Indonesia dengan menggunakan nama samaran Soeparto.

Sumber : Himawan Soetanto, 2006, *Medium : Dari Republik ke Republik*, Jakarta, PT Kata Hasta Pustaka, hlm. 209.

Lampiran 14

MUSO



Sumber : Ann Swift, 1989, *The Road to Madiun : The Indonesian Communist Uprising of 1948*, Cornell Modern Indonesia Project, New York, hlm. xi.

Lampiran 15

**SURIPNO**



Sumber : Ann Swift, 1989, *The Road to Madiun : The Indonesian Communist Uprising of 1948*, Cornell Modern Indonesia Project, New York, hlm. 32.

Lampiran 16

**AMIR SYARIFUDDIN**



Sumber : Ann Swift, 1989, *The Road to Madiun : The Indonesian Communist Uprising of 1948*, Cornell Modern Indonesia Project, New York, hlm. 4.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### SILABUS BERBASIS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah  
 Satuan Pendidikan : SMA  
 Kelas / Semester : XI IPS/ 2  
 Tahun Pelajaran : 2007 / 2008  
 Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan Bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Penilaian			Waktu	Sumber
				Jenis tagihan	Bentuk tagihan	Contoh tagihan		
Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain : PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Azis, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI).	Mendiskusikan latar belakang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.	Latar belakang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 : 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. 2. Pembentukan FDR. 3. Re-Ra APRI. 4. Kedatangan Muso dari Moskow. 5. Latar belakang geografis, sosial, ekonomi, kepartaian, dan pemerintahan di Madiun.	Siswa mampu mendiskusikan latar belakang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.	Non-tes	Laporan hasil diskusi kelompok.	Buatlah laporan hasil diskusi kelompok tentang latar belakang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 !	2 X 45 menit.	Himawan Soetanto, 1994, <i>Perintah Presiden Soekarno : "Rebut Kembali Madiun..."</i> , Jakarta, PT Pustaka Sinar Harapan.  Himawan Soetanto, 2006, <i>Madiun : dari Republik ke Republik</i> , Jakarta, PT Kata Hasta Pustaka.  Abdul Haris Nasution, <i>Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948</i> , Bandung, Disjarah AD dan Angkasa.
	Mendeskripsikan proses meletusnya pemberontakan PKI di Madiun	Meletusnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 : 1. Persiapan	Siswa mampu mendeskripsikan proses meletusnya pemberontakan	Tes	Essay tertulis.	1. Uraikan persiapan PKI untuk memberontak di Madiun !		

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<p>tahun 1948.</p> <p>Mendiskusikan usaha pemerintah RI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.</p>	<p>2. Jalannya Pemberontakan</p> <p>3. Keterlibatan masyarakat dalam pemberontakan</p> <p>4. Korban pemberontakan</p> <p>5. Dampak pemberontakan</p> <p>Usaha pemerintah RI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan operasi penumpasan.</li> <li>2. Pelaksanaan operasi penumpasan.</li> <li>3. Penangkapan Muso dan para pemimpin PKI lainnya.</li> </ol>	<p>PKI di Madiun tahun 1948.</p> <p>Siswa mampu mendiskusikan usaha pemerintah RI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.</p>	<p>Non-tes</p>	<p>Laporan hasil diskusi kelompok.</p>	<p>2.Siapa saja yang menjadi korban pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 ?</p> <p>3.Jelaskan dampak dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 !</p> <p>Buatlah laporan hasil diskusi kelompok tentang usaha pemerintah RI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 !</p>	<p>Maksum, Agus Sunyoto, dan A Zainuddin, <i>Lubang-lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun</i>, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti.</p>
--	--	--	----------------	--	---	--

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Yogyakarta, Februari 2008  
Guru Mata Pelajaran

Nama  
NIP

Andina Putri Nugraheni

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( RPP )**

Mata Pelajaran : Sejarah  
Satuan Pendidikan : SMA  
Kelas/Semester : XI IPS/2  
Tahun Pelajaran : 2007/2008  
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit.

- I. Standar Kompetensi  
Menganalisis perjuangan Bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.
- II. Kompetensi Dasar  
Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain : PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Azis, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI).
- III. Materi Pokok  
Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
- IV. Indikator
  1. Mendiskusikan latar belakang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  2. Mendeskripsikan proses meletusnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  3. Mendiskusikan usaha pemerintah RI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
- V. Pengalaman Belajar
  1. Siswa mampu menjelaskan latar belakang politik pemerintahan pusat RI yang mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  2. Siswa mampu menjelaskan keterkaitan antara kedatangan Muso dari Moskow dengan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  3. Siswa mampu menganalisis situasi geografis, sosial, ekonomi, kepartaian, dan pemerintahan di Madiun sehingga dipilih sebagai pusat pemberontakan PKI.
  4. Siswa mampu mendeskripsikan kronologi terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  5. Siswa mampu menganalisis korban dan dampak dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  6. Siswa mampu menganalisis usaha pemerintah RI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.

## VI. Langkah-Langkah Pembelajaran

### A. Pendahuluan

1. Guru membuka pelajaran dengan mengajak para siswa berdoa, kemudian mengabsen kehadiran siswa.
2. Tanya jawab materi pelajaran sebelumnya.
3. Mendeskripsikan secara singkat bahan ajar yang akan dipelajari.
4. Menginformasikan esensi kompetensi dasar dan relevansi bahan ajar.

### B. Kegiatan Inti

1. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa, salah satu diantaranya dijadikan ketua kelompok.
2. Setiap kelompok diberi tugas untuk berdiskusi membahas permasalahan yang berbeda dalam waktu 20 menit, dan membuat laporan tertulis untuk dipresentasikan.
3. Setiap siswa diminta membuat laporan tertulis hasil diskusi pleno.
4. Pembagian tugas diskusi kelompok adalah :
  - Kelompok 1 membahas dan membuat laporan tertulis tentang latar belakang politik pemerintahan pusat RI yang mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  - Kelompok 2 membahas dan membuat laporan tertulis tentang keterkaitan antara kedatangan Muso dari Moskow dengan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  - Kelompok 3 membahas dan membuat laporan tertulis tentang situasi geografis, sosial, ekonomi, kepartaian, dan pemerintahan di Madiun sehingga dipilih menjadi pusat pemberontakan PKI.
  - Kelompok 4 membahas dan membuat laporan tertulis tentang persiapan PKI secara organisasi, keuangan, persenjataan, dan militer untuk melancarkan pemberontakan di Madiun.
  - Kelompok 5 membahas dan membuat laporan tertulis tentang proses meletusnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  - Kelompok 6 membahas dan membuat laporan tertulis tentang korban dan dampak pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
  - Kelompok 7 membahas dan membuat laporan tertulis tentang operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun dari arah barat (Solo).
  - Kelompok 8 membahas dan membuat laporan tertulis tentang operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun dari arah timur (Kediri, Blitar, Nganjuk).
5. Setelah diskusi kelompok selesai, ketua kelompok mempersentasikan hasil diskusi di depan kelas dan siswa yang lain diberi kesempatan untuk bertanya/menanggapi.
6. Guru mengklarifikasi jawaban yang kurang tepat dan memberi penguatan pada jawaban yang benar.
7. Siswa diberi kesempatan untuk mencatat hal-hal yang penting.

C. Penutup

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari.
2. Masing-masing siswa mengumpulkan laporan tertulis hasil diskusi pleno.
3. Tindak lanjut : siswa diminta untuk mempelajari materi pelajaran selanjutnya.
4. Berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran.

VII. Metode Belajar

1. Diskusi
2. Presentasi
3. Tanya Jawab

VIII. Media dan Sumber Belajar

A. Media : Peta, gambar-gambar, OHP/Viewer.

B. Sumber Belajar :

Fadli Zon dan Muhammadiyah Halwan Aliuddin, (ed). 2005. *Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948*. Jakarta : Komite Waspada Komunisme.

Himawan Soetanto. 1994. *Perintah Presiden Soekarno : "Rebut Kembali Madiun..."*. Jakarta : PT Pustaka Sinar Harapan.

----- . 2006. *Madiun : Dari Republik ke Republik*. Jakarta : PT Kata Hasta Pustaka.

Maksum, dkk. 1990. *Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Nasution, Abdul Haris. 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 8 : Pemberontakan PKI 1948*. Bandung : Disjarah AD dan Angkasa.

Sartono Kartodirjo, dkk. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5*. Jakarta : PT Balai Pustaka.

IX. Penilaian

A. Penilaian Proses

Alat penilaian : Lembar oservasi

Bentuk penilaian : Format penilaian

Lembar observasi

No	Nama siswa	Aspek penilaian								Jumlah skor	Nilai	Predikat
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1.												
2.												
3.												
dst												

Aspek penilaian :

1. Tidak terlambat mengikuti pelajaran.
2. Membawa buku-buku pelajaran.
3. Mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk.
4. Mampu belajar secara mandiri dan berkelompok.
5. Mengajukan pertanyaan dan tanggapan.
6. Tidak memaksakan kehendak dalam diskusi.
7. Santun dalam berkomunikasi.
8. Menyerahkan tugas tepat waktu.

Rentang skor : 1-4

Skor maksimal : 32

Nilai :  $(\text{Skor perolehan} : \text{skor maksimal}) \times 100$

Predikat : A : 86 - 100

B : 76 - 85

C : 60 - 75

D : 50 - 59

E : = 49

F : tidak ikut.

#### B. Penilaian Hasil

a. Alat penilaian : Non-tes

Bentuk penilaian : Laporan hasil diskusi kelompok.

Butir-butir soal :

1. Jelaskan latar belakang politik pemerintahan pusat RI yang mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 !
2. Jelaskan keterkaitan antara kedatangan Muso dari Moskow dengan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 !
3. Bagaimana situasi geografis, sosial, ekonomi, kepartaian, dan pemerintahan di Madiun sehingga dipilih sebagai pusat pemberontakan PKI ?
4. Jelaskan persiapan PKI secara organisasi, keuangan, persenjataan, dan militer untuk memberontak di Madiun !
5. Deskripsikan kronologi terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 !
6. Jelaskan korban dan dampak dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 !
7. Bagaimana pemerintah RI melaksanakan operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun dari arah barat (Solo) ?
8. Bagaimana pemerintah RI melaksanakan operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun dari arah timur (Kediri, Blitar, Nganjuk) ?

- b. Alat penilaian : Tes  
Bentuk penilaian : Essay tertulis  
Butir-butir soal :
1. Uraikan persiapan PKI untuk memberontak di Madiun !
  2. Mengapa pertempuran antara pasukan TNI dan pasukan PKI terjadi di kota Solo, bukan di Madiun ?
  3. Bagaimana pelaksanaan pemerintahan Front Nasional di Madiun ?
  4. Siapa saja yang menjadi korban pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 ?
  5. Jelaskan dampak dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 !

Mengetahui  
Kepala Sekolah

NIP

Yogyakarta, Februari 2008

Guru Bidang Studi

Andina Putri Nugraheni

